

Book Chapter

AKUNTABILITAS & DINAMIKA

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Aco Firman | Hasanuddin Remmang | Rahman
Haeruddin Saleh | Sampurisiah | Herminawaty Abubakar
Musafir Perkasa | Muh. Yusuf Saleh | Tahir
Firman Menne | Ratih Purwati Tahir | Muhtar Sapiri
Sukmawati Mardjuni | Thamrin Abduh

Editor:

Miah Said | Muhlis Ruslan | Chahyono | A. Musfirah



Penerbit
Pusaka Almaida

AKUNTABILITAS & DINAMIKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ISBN 978-623-226-297-3



PASCASARJANA
UNIVERSITAS
BOSOWA

Book Chapter

AKUNTABILITAS & DINAMIKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Penulis:

Aco Firman	Hasanuddin Remmang
Rahman	Haeruddin Saleh
Sampurisiah	Herminawaty Abubakar
Musafir Perkasa	Muh. Yusuf Saleh
Tahir	Firman Menne
Ratih Purwati Tahir	Muhtar Sapiri
Sukmawati Mardjuni	Thamrin Abduh

Editor:

Miah Said | Muhlis Ruslan | Chahyono | A. Musfirah

Book Chapter

**AKUNTABILITAS & DINAMIKA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Penulis:

Aco Firman	Hasanuddin Remmang
Rahman	Haeruddin Saleh
Sampurisiah	Herminawaty Abubakar
Musafir Perkasa	Muh. Yusuf Saleh
Tahir	Firman Menne
Ratih Purwati Tahir	Muhtar Sapiri
Sukmawati Mardjuni	Thamrin Abduh

Editor:

Miah Said
Muhlis Ruslan
Chahyono
A. Musfirah

Tata Letak
Mutmainnah

vi + 286 halaman
18 x 26 cm

Cetakan: 2021

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN : 978-623-226-297-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka Almaida
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga *Book Chapter* dengan judul **“Akuntabilitas dan Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah”** telah terbit. *Book chapter* ini merupakan bagian dari Program Studi Magister Manajemen Universitas Bosowa, yang ditulis oleh beberapa mahasiswa dan tenaga pengajar dan dikemas dalam satu topik.

Secara garis besar, *Book Chapter* ini menjelaskan gambaran akutabilitas, independensi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di daerah, walaupun dipengaruhi berbagai hal dalam prosesnya tetapi diharapkan tetap mengedepankan kualitas dan epat guna. *Book Chapter* ini memiliki peran sebagai diseminasi (penyebarluasan) informasi bidang manajemen keuangan sehingga memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Berbagai artikel penelitian tersebut diharapkan dapat menggambarkan manajemen keuangan pada era industri 4.0 ke depan sehingga pengelolaan keuangan yang ada di Indonesia siap menghadapi kondisi disrupsi atau perubahan secara fundamental yang berpengaruh terhadap kehidupan organisasi.

Book Chapter ini terdiri atas 6 bab, yang ditulis oleh Aco Firman, S.Kom., M.Si., Rahman, SE., M.Si., Sampurisiah, SE., M.Si., Musafir Perkasa, SE., M.Si., Tahir, SE., M.Si., Ratih Purwati Tahir, SE., M.Si., Dr. Hasanuddin Remmang, SE., M.Si., Dr. Haeruddin Saleh, SE., M.Si., Dr.Muh. Yusuh Saleh, SE., M.Si., Dr. Sukmawati Mardjuni, SE., M.Si., Dr.Firman Menne, SE., M.Si., Dr.Thamrin Abduh, SE., M.Si., Dr. Herminawaty Abubakar, SE., M.M., dan Dr. Muhtar Sapiri, SE., M.M., Semua konten dan konteks yang disajikan dalam *book chapter* ini berbasis hasil penelitian, sehingga tidak hanya bersifat konseptual, namun telah diuji secara empiris.

Harapan kami, dengan terbitnya *book chapter* ini, semoga dapat menambah referensi dan wawasan tentang upaya membentuk iklim akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dengan berbagai dinamikanya dapat bermanfaat kepada masyarakat dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh berbagai pihak.

Makassar, Oktober 2021

Penyunting

DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v
CHAPTER 1	
Faktor-Faktor Pengelolaan Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene	1
Penulis:	
Aco Firman¹, Haeruddin Saleh², Muh. Yusuf Saleh³	
CHAPTER 2	
Kapasitas Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kabupaten Majene)	41
Penulis:	
Rahman¹, Sukmawati Mardjuni², Haeruddin Saleh³	
CHAPTER 3	
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Polewali Mandar.....	85
Penulis:	
Sampurisiah¹, Firman Menne², Haeruddin Saleh³	
CHAPTER 4	
Pengaruh Akuntabilitas, Independensi dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Hasil Audit Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Majene	145
Penulis:	
Musafir Perkasa¹, Herminawaty AB², Muhtar Sapiri³	

CHAPTER 5

Analisis Tingkat Fraud Dana Desa Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Bana, Kecamatan Bontocani)..... 199

Penulis:

Tahir¹, Thamrin Abduh², Seri Suriani³

CHAPTER 6

Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polman 245

Penulis:

Ratih Purwati Tahir¹, Hasanuddin Remmang², Firman Menne³

CHAPTER 1

FAKTOR-FAKTOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJENE

Aco Firman¹

Haeruddin Saleh²

Muhammad Yusuf Saleh³

^{1,2,3}Program Studi Magister Manajemen, Universitas Bosowa

Email: aco.firman@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan menginterpretasi, Pengaruh Mekanisme Pengelolaan Keuangan Terhadap Penyerapan Anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Majene karena pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene telah menggunakan Perencanaan berbasis Aplikasi (*E-Planning*), dengan perencanaan yang baik dan terukur akan menghasilkan Output dan Outcome yang baik, salah merencanakan berarti merencanakan kegagalan. 2. Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran di Kabupaten Majene karena sumber Daya Manusia yang ada di Organisasi Perangkat Daerah telah mengikuti Diklat – Diklat yang berkaitan dengan Keuangan dengan latar belakang Pendidikan yang sesuai di bidang pengelolaan keuangan sehingga menghasilkan akuntabilitas Keuangan yang baik dan handal. 3. Reformasi Birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran di Kabupaten Majene karena dengan adanya Reformasi Birokrasi di bidang Struktur organisasi dan penempatan pejabat sesuai dengan keahlian masing-masing (*The Right Man on The Right job*).

Kata kunci: Perencanaan Anggaran berbasis Kinerja dan Aplikasi.

A. PENDAHULUAN

Rendahnya penyerapan anggaran di Pemerintah daerah kabupaten Majene, kerap kali di jadikan sebagai gambaran buruknya kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Penyerapan anggaran sendiri memang sebagai hal yang

sangat penting untuk menilai terlaksannya program kegiatan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran. Akan tetapi sejatinya kinerja Organisasi Perangkat Daerah tidak bisa diukur semata-mata dengan penyerapan anggaran. Ketidak tercapaian serapan anggaran setiap tahun memang akan berakibat tidak terlaksananya secara keseluruhan program kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan di dalam APBD Pemerintah Kabupaten Majene

Permasalahan lambatnya penyerapan anggaran menjadi fenomena klasik di pemerintahan khususnya pemerintah daerah. Penyerapan anggaran secara umum hanya memiliki akselerasi tinggi pada saat akhir tahun. Sedangkan di awal tahun, umumnya sulit direalisasikan sebagaimana yang diharapkan, Walaupun tingginya realisasi anggaran bukan merupakan tolak ukur utama dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Majene.

Seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penganggaran belanja publik, maka diperkenalkanlah system penganggaran yang berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) sebagai pengganti sistem penganggaran lama dengan sistem tradisional yang bersifat incrementalism dan struktur susunan anggarannya bersifat line item. Dalam system tradisional penekanan utama adalah terhadap input, di mana perubahan terletak pada jumlah anggaran yang meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Performance based budgeting dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas daerah sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. Penganggaran berbasis kinerja menetapkan kinerja sebagai tujuan utama sehingga diperlukan alat ukur kinerja yang jelas dan transparan berupaindikator kinerja (*performance indicators*).

Selain indikator kinerja juga diperlukan adanya sasaran (*targets*) yang jelas agar kinerja dapat diukur dan diperbandingkan sehingga selanjutnya

dapat dinilai efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan. Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif.

Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi), dan (2) indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Ketiga pokok bahasan dalam *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif) terkait satu dengan yang lain. Ekonomis membahas mengenai masukan (*input*), efisiensi membahas masukan (*input*) dan keluaran (*output*), dan efektivitas membahas mengenai keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*). Tingkat penyerapan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Majene sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (*audited*) dalam dua tahun terakhir (2018-2019) menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja Kabupaten Majene tahun 2018-2019 belum mencapai 100% yaitu masing-masing untuk Tahun 2018 hanya mencapai 90.73% dan untuk Tahun 2019 hanya mencapai 92.11 %.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Majene tahun 2018-2019, dapat dilihat penyerapan anggaran Kabupaten Majene pada tahun 2018 di triwulan empat dengan total anggaran belanja sebesar Rp 309.944.582.621.88, hingga akhir Desember 2018 (akhir triwulan keempat) realisasi keuangan yang mampu diserap untuk pelaksanaan program kegiatan adalah sebesar 89.65%.

Realisasi anggaran belanja di triwulan keempat seharusnya telah mencapai 100% dari total anggaran belanja jika dilihat dari rencana pencairan anggaran kas dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Majene tahun 2018 IV masing-masing sebesar 20%; 20 %; 30%; dan 30%. Begitu juga yang terjadi pada tahun 2019 tingkat penyerapan anggaran per triwulan yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Majene, penyerapan anggaran tidak optimal. sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
 Realisasi Penyerapan Anggaran Kab.Majene Tahun 2018-2019
 (dalam Rupiah)

Tahun	Pagu Anggaran	Triwulan	Realisasi	%
2018	179.676.882.908.38	1	106.110.242.616.00	49.96
	206,551.948.404.38	11	198.255.230.755.00	92.60
	223.323.361.516.38	111	240.169.539.696.00	122.79
	311.954.256.317.67	IV	309.944.582.621.88	86.65
2019	84.294.380.430.00	1	80.345.278.617.00	95.70
	223.011.071.995.00	11	220.011.897.521.00	94.90
	229.740.714,374.00	111	229.740.714,374.00	100
	231.216.154.167.00	IV	225.543.768.421.76	97.00

Sumber Data : Laporan Reviu Penyerapan Anggaran Inspektorat Kab.Majene

Untuk tahun 2018 penyerapan anggaran belanja Kabupaten Majene juga masih rendah Serapan anggaran belanja langsung hingga Juli 2018 baru terealisasi 20,3%. Ini artinya masih banyak kegiatan yang belum di laksanakan sehingga serapan danahnya belum maksimal.

Penelitian mengenai Pengaruh Mekanisme Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene terhadap Penyerapan anggaran telah dilakukan sebelumnya oleh Nova Dwiyana (2017) menghasilkan penelitian bahwa secara simultan menunjukkan bahwa perencanaan, peraturan, sumber daya manusia, teknis, koordinasi dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja hasil penelitiannya menunjukkan bahwa baik secara simultan mendukung hipotesis bahwa kapasitas sumber dayamanusia, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Pada penelitian yang lain seperti yang dilakukan oleh Rifai, et. Al (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, regulasi, pelaksanaan, desentralisasi, koordinasi dan sumberdaya manusia tidak berpengaruh pada keterlambatan daya serap anggaran. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda untuk variabel independen terhadap penyerapan anggaran. Untuk factor sumber daya manusia, perencanaan, peraturan dan koordinasi hasil penelitian Nova Dwiyana (2017).

1. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakannya (Mardiasmo, 2009). Penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh SKPD. Noviwijaya (2013) penyerapan anggaran SKPD merupakan “proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran”. Kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil apabila realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan fisik pekerjaan dilapangan yang telah diselesaikan, dengan anggapan bahwa fisik pekerjaan tersebut relatif sama dengan target penyelesaian pekerjaan yang direncanakan (Nugroho dan Ananda, 2013).

Penyerapan anggaran tidak hanya diukur berdasarkan seberapa besar anggaran yang terserap dalam sebuah program kegiatan yang telah direncanakan, namun juga mengukur efisiensi anggaran serta efektivitas anggaran tersebut. Kuswoyo (2011) selain kualitas perencanaan anggaran, kualitas SDB penyerapan anggaran juga dipengaruhi pelaksanaan program kegiatan. Dalam pelaksanaan anggaran, persoalan- persoalan yang sering terjadi dalam internal satuan kerja meliputi keterlambatan penetapan surat keputusan pejabat pembuat komitmen (PPK) pejabat pengelola keuangan, dan kebiasaan pengelola anggaran menunda pekerjaan, serta tidak adanya reward dan punishment bagi keberhasilan/kegagalan pengelolaan keuangan di satker juga menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran (Miliasih, 2012).

Siswanto dan Rahayu, (2010), Maulana (2011), Kuswoyo (2011), Herriyanto (2012), Arif (2012) dan Putri (2014) membuktikan bahwa faktor SDM, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran memberi pengaruh bagi penyerapan anggaran SKPD. Suhipna, (2013) mengemukakan beberapa factor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu faktor individu, organisasi dan psikologis. Faktor individu terkait pada bagaimana seorang pegawai yang menangani langsung anggaran memberikan kinerja dalam

pelaksanaan tugasnya. Seringkali pegawai yang tidak memiliki kompetensi yang memadai menduduki jabatan penting dan diberikan tanggungjawab terhadap realisasi anggaran.

Faktor organisasi juga menentukan bagaimana anggaran itu disusun melalui perencanaan yang tepat sehingga dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Faktor psikologis ikut mempengaruhi penyerapan anggaran. Dimana tekanan dari pihak luar juga memberikan kontribusi terhadap rendahnya penyerapan anggaran.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran

Faktor terpenting dalam penyerapan anggaran agar dapat lebih maksimal adalah perencanaan. Permasalahan yang timbul dalam perencanaan anggaran disebabkan karena masih adanya anggapan bahwa tidak semua anggaran yang diusulkan akan disetujui, sehingga anggaran yang diusulkan lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan faktor kemudahan implementasi dan kebutuhan riil di lapangan (Septianova dan Helmy, 2013).

Selain itu, perencanaan kegiatan kurang matang dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaannya (Tunggal, 2011). Perencanaan anggaran juga memberi kontribusi bagi penyerapan anggaran pemerintah daerah. Notoatmodjo (2003) "perencanaan adalah inti manajemen karena semua kegiatan organisasi yang bersangkutan didasarkan pada rencana tersebut". Untuk mengimplementasikan perencanaan atas suatu kegiatan tentu dibutuhkan anggaran.

Mardiasmo (2009) anggaran merupakan "pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial". Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam perencanaan anggaran yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran diantaranya:

- a. Perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Data pendukung yang tidak lengkap pada saat penyusunan anggaran
- c. Salah penentuan akun sehingga perlu merevisi dokumen anggaran
- d. Penyusunan pagu anggaran yang tidak sesuai harga pasar

- e. Term of Reference(TOR) salah/tidak lengkap
- f. Kerangka Acuan Kerja salah/tidak di buat
- g. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak di dukum oleh harga pasar setempat
- h. Rencana Anggaran Belanja (RAB) tidak sesuai dengan satuan biaya
Perencanaan anggaran yang akurat akan mempermudah pelaksanaan anggaran.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Toni (2011) meneliti faktor-faktor penyebab rendahnya daya serap anggaran pada KPPN Bandung, hasilnya menunjukkan bahwa salah satu factor penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran lemahnya perencanaan anggaran.

Demikian pula pada penelitian Siswanto dan Rahayu, (2011) serta Murtini (2009) menunjukkan lemahnya serapan anggaran dikarenakan lemahnya perencanaan. Bakara (2000) menemukan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta belum tercapai sesuai yang diharapkan. Utari (2009) dalam studi kualitatifnya meneliti kendala dan hambatan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, hasilnya menunjukkan bahwa :

- a. Struktur SKPD belum memberikan ruang yang cukup bagi perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi
- b. Tim anggaran belum terlibat secara penuh pada setiap tahapan perencanaan
- c. kurangnya pengetahuan, pemahaman dan juga motivasi dari para pegawai yang berhubungan pengelolaan keuangan. Untuk menerapkan anggaran kinerja secara optimal

Proses perencanaan kegiatan dalam penganggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Sejak dua belas bulan sebelum tahun anggaran dimulai, proses perencanaan dan penggaran sudah mulai berjalan. Setiap satuan kerja yang akan mengajukan sebuah kegiatan, harus menyusun Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya

(RAB) disertai syarat-syarat pendukung administratif sesuai jenis kegiatan masing-masing. Perencanaan anggaran yang tidak baik sering menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga harus direvisi atau bahkan tidak dapat direalisasi sama sekali (BPKP, 2011).

Secara empirik, hal ini juga telah dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan Bakara (2000) dan Akadira (2010) yang mengungkapkan bahwa perencanaan yang baik akan sangat membantu tingkat penyerapan.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada beberapa SKPD disebabkan SKPD tersebut belum mampu memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang kompeten dan perencanaan anggaran yang tidak matang (Maulana, 2011). Penyerapan anggaran SKPD akan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang dimiliki satuan kerja baik.

United Nations Development Programs (2008) mengartikan kualitas SDM sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu, yang mengacu pada keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Semakin baik kualitas sumber daya manusia suatu SKPD sebagai penerima amanah (steward) dalam menjalankan program dan kegiatan dari pemberi amanah (principal) maka serapan anggarannya akan semakin baik, karena SDM-nya sudah mengerti akan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

Penelitian Miliasih (2012) menemukan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas baik pejabat pengelola maupun staf dapat mengakibatkan terlambatnya penyerapan anggaran. Hasil penelitian Arif & Halim (2013) menunjukkan bahwa penempatan pegawai memerlukan perhatian yang penuh dari pimpinan daerah dan pimpinan SKPD. Utari (2009) dalam studi menemukan bahwa kurangnya pengetahuan, pemahaman dan juga motivasi dari para pegawai untuk menerapkan anggaran kinerja secara optimal.

4. Reformasi Birokrasi

Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

Makna reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, dan dengan upaya luar biasa. Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigam dan peran baru.

Atas dasar makna tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat:

- a. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan
- b. Menjadikan Negara yang memiliki birokrasi yang bersih, mampu, dan melayani.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
- d. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi.
- e. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi

- f. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan strategis

Selain itu, diterbitkan pula 9 (sembilan) Pedoman dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Permenpan-RB No. 7 sampai dengan No. 15 yang meliputi pedoman tentang Pengajuan dokumen usulan sampai dengan mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja. Pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing instansi pemerintah dilakukan berdasarkan kebijakan/program/kegiatan yang telah digariskan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Road Map reformasi Birokrasi, serta berbagai pedoman pelaksanaannya.

Selanjutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi Dalam rangka itu, ditetapkan Permenpanrb No. 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan untuk operasionalisasinya ditetapkan Permenpanrb No. 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online. Pedoman dan Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk melakukan penilaian upaya pencapaian program Reformasi Birokrasi sejalan dengan pencapaian sasaran, indikator dan target nasional. PMPRB mengkaitkan penilaian atas output dan outcome pelaksanaan program reformasi birokrasi di instansi pemerintah, serta pencapaian Indikator Kinerja Utama masing-masing instansi pemerintah dengan indikator keberhasilan reformasi birokrasi secara nasional. Sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), berperan sangat penting dalam mengetahui dan menilai serta mengawal pencapaian reformasi birokrasi sebagaimana diharapkan.

5. Proses Lelang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia semua paket kegiatan harus di laksanakan melalui proses lelang namun sebelumnya di lakukan pengimputan semua

paket belanja ke dalam Aplikasi Sirup pada Bagian ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Majene

Informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen (Herriyanto, 2012) diantaranya:

- a. Peraturan perundang-undangan yang diterapkan
- b. Jenis kontrak
- c. Sumber dana
- d. Metoda pengadaan
- e. Nilai kontrak
- f. Standar-standar Nasional Indonesia

Ketentuan pokok dalam penyusunan dokumen pengadaan (Rahayu, 2011) antara lain:

- a. Dokumen pengadaan disiapkan panitia/pejabat pengadaan dan disahkan pengguna barang/jasa.
- b. Isi harus lengkap dan jelas, serta tidak menimbulkan penafsiran jamak (multi tafsir).
- c. Perubahan (adendum) dokumen diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survey. Menurut Nawawi (2003 : 64) metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian deskriptif adalah metode survey.

Metode survey adalah penelitian yang mengambil sample dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok Menurut format penelitian dan tingkat eksplanasinya penelitian

initergolong penelitian kausal komparatif yaitu penelitian yang menyelidikikemungkinan hubungan sebab akibat yang ada, mencari kembali fakta yangmungkin menjadi penyebab melalui data tertentu (Supriana, 2016).

2. Populasi dan Sampel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2016 Daerah Kabupaten Majene jumlah OPD di Kabupaten Majene adalah 56 (Lima puluh Enam) SKPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Sekretariat Korpri Inspektorat, Satpol PP, 20 (dua puluh) Dinas, 7 (tujuh) Badan dan 8 (delapan) Kecamatan. 20 (Dua Puluh) Kelurahan Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (Kasubag Keuangan dan Kasubag Perencanaan) dan dari 56 (lima puluh enam) SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Majene. Pengambilan sampel menggunakan metode sensus sehingga jumlah sampel sebanyak 2×56 SKPD yaitu 120 responden.

3. Vaeriable Penelitian

Realisasi anggaran merupakan tindakan menindaklanjuti rencana anggaran sesuai dengan alokasi dana yang telah tertuang di dalam APBD. Anggaran dapat terserap secara maksimal ataupun tidak. Saat ini di Kabupaten Majene terdapat beberapa OPD yang mengalami penyerapan anggaran yang rendah. Penyerapan anggaran yang rendah ini disebabkan selain karena tidak dijalankannya program-program yang sudah direncanakan mengingat anggaran yang besar sudah disetujui dan juga karena adanya kemungkinan dalam pelaksanaan program terdapat beberapa hambatan yang dapat menunda terselesainya program sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pada penelitian ini akan dilihat apa saja factor/hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Majene Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Variabel independen merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain.

X1= Perencanaan Anggaran

X2= Kualitas SDM

X3= Reformasi Birokrasi

X4= Proses Lelang

Y = Penyerapan Anggaran

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan dalam sebuah kuisisioner yang akan diisi oleh responden. Butir pertanyaan dan pilihan jawaban dalam kuisisioner disesuaikan dengan variabel-variabel yang akan diukur. Kuisisioner akan diantarkan langsung kepada responden, dan jika memungkinkan kuisisioner akan langsung diambil kembali setelah diisi oleh responden. Namun, jika tidak memungkinkan maka kuisisioner akan diambil paling lambat 1 minggu setelah penyerahan atau sesuai waktu yang telah disepakati dengan responden. Kuisisioner yang diajukan kepada 56 SKPD diantaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyulu Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyulu Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Diskoperindag dan UKM), Dinas Pendidikan (Diknas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perkebunan (Disbun) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Kuisisioner diukur menggunakan skala likert dengan menggunakan penilaian yang pertama yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju dan penilaian sangat sering, sering, kadang-kadang, pernah dan tidak pernah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Lubis (2015) menyebutkan data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti pada saat berlangsungnya penelitian tersebut. Data sekunder adalah data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang bisa diperoleh dari instansi-instansi terkait (Supriana, 2016). Untuk pengumpulan data primer akan digunakan kuisisioner yaitu pertanyaan tertulis yang akan dijawab oleh responden. Indikator dan kuisisioner yang berhubungan dengan variabel

perencanaan anggaran dan variabel sumber daya manusia dirancang dan diadopsi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh Zarinah (2016), Malahayati (2015) dan Herryanto (2012). Indikator dan kuesioner yang berhubungan dengan reformasi birokrasi, disiplin kerja dan motivasi dirancang dan diadopsi berdasarkan PP 58 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan analisis moderating. Pengujian untuk hipotesis pertama menggunakan metode regresi berganda dan untuk hipotesis kedua dengan pengujian efek moderating. Metode ini membutuhkan 2 persamaan regresi, yang pertama bertujuan menguji pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan yang kedua menguji apakah variabel moderasi mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Validitas merupakan akurasi temuan penelitian yang mencerminkan kebenaran sekalipun responden yang dijadikan pengujian berbeda. Instrumen berarti menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas pertanyaan atau pernyataan kuesioner dari Korelasi Product Moment dari Karl Pearson yang dilihat dari r hitung untuk tiap butir dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari ($>$) r tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid tetapi sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari ($<$) r tabel, maka skor butir pertanyaan atau pernyataan kuesioner tidak valid. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel degree of freedom (df) = $n - 2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013).

b. Uji Realibilitas

Uji Realibilitas adalah alat uji untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten. Ghozali (2016) menyatakan bahwa pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Repeated Measure atau pengukuran ulang dilakukan dengan cara memberikankuesioner (pertanyaan) yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudiandilihat apakah responden tetap konsisten dengan jawabannya.
- 2) One Shot atau pengukuran sekali saja dilakukan dengan cara hanya sekali saja kuesioner diberikan kepada responden dan kemudian hasilnya dibandingkan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Pengujian reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan oneshot atau pengukuran sekali saja dan untuk pengujian reliabilitasnya digunakan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,70$ (Ghozali, 2016).

c. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis mengenai perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap penyerapan anggaran SKPD pada Pemerintah Kabupaten Majene baik secara simultan maupun secara parsial, dilakukan pengujian hipotesis secara simultan dengan uji F dan secara parsial dengan uji t.

d. Uji F (F-Test)

Untuk menguji hipotesis secara simultan dilakukan dengan uji F, Pengujian ini dilakukan untuk melihat semua variabel independen mempunyaipengaruh secara serempak (simultan) terhadap variabel dependen. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan uji F adalah:

H0 : $\beta = 0$ Perencanaan Anggaran, Kualitas SDM, Reformasi Birokrasi dan Disiplin Kerja secara serempak tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

H1 : $\beta \neq 0$ Perencanaan Anggaran, Kualitas SDM, Reformasi Birokrasi dan Disiplin Kerja secara serempak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Uji F dalam penelitian ini tingkat keyakinan menggunakan α 5%., sehingga kriteria pengujian adalah:

P Value (Sig) < 0,05 = Ho (terima H1 tolak Ho)

P Value (Sig) > 0,05 = H1 (terima Ho tolak H1)

e. Uji t (t-Test)

Untuk menguji hipotesis secara parsial dilakukan uji t. Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan uji t adalah:

H0 : $\beta = 0$ Perencanaan Anggaran, Kualitas SDM, Reformasi Birokrasi dan Disiplin Kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

H1 : $\beta \neq 0$ Perencanaan Anggaran, Kualitas SDM, Reformasi Birokrasi dan Disiplin Kerja secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai signifikansi α

Pengujian ini dilakukan untuk melihat tingkat pengaruh dengan tingkat kepercayaan 95% yang signifikan berdasarkan pada α 5%. Kriteria pengujian:

P Value (Sig) < 0,05 = Ho (terima H1 tolak Ho)

P Value (Sig) > 0,05 = H1 (terima Ho tolak H1)

f. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh atau variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian dilakukan berdasarkan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (α), maka variabel independen secara

individu berpengaruh terhadap terhadap variabel dependen. Namun jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 (α), maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap terhadap variabel dependen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Karakteristik Responden

- **Deskriptif Berdasarkan Jenis Kelamin**

Deskripsi berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi (%)
Laki – Laki	96	80
Perempuan	24	20
Jumlah	120	100

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden jenis kelamin terbanyak pada laki-laki berjumlah 96 orang atau 80%, sedangkan sisanya 24 orang atau 20% dipenuhi oleh jenis kelamin perempuan. Artinya sebagai besar responden yang mengisi kuesioner adalah laki-laki.

- **Deskriptif Berdasarkan Umur**

Deskripsi berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Umur

Usia	Frekuensi	Presentasi (%)
20-30 Tahun	24	20
31-45 Tahun	62	52
46-55 Tahun	26	22
Lebih dari 55 Tahun	8	6
Jumlah	120	100

Pada tabel 3.4 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan usia terbesar berada pada responden berusia 31-45 tahun sebanyak 62 orang atau 52%. Responden yang berusia 46-55 tahun sebanyak 26 orang atau 22%. Kemudian responden yang berusia lebih dari 55 tahun sebanyak 8 orang atau 6%. Sedangkan responden berusia 20-30 tahun sebanyak 24 orang atau 20%.

- Deskriptif Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Deskripsi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi (%)
SLTA	8	6
D3	0	0
S1	98	82
S2	14	12
S3	0	0
Jumlah	120	100

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan terbesar berada responden S1 sebanyak 98 orang atau 82%, responden yang tingkat pendidikan SLTA sebanyak 8 orang atau 6%, responden yang tingkat pendidikan S2 sebanyak 14 orang atau 12%. Dari 120 Responden. Sedangkan responden yang tingkat pendidikan D3 dan S3 tidak ada (0%).

b. Deskriptif Variabel

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten majene terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Majene. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu Perencanaan Anggaran (X1), Kualitas SDM (X2), Reformasi Birokrasi (X3) dan Proses Lelang (X4). Sedangkan Penyerapan

Anggaran (Y) adalah sebagai variabel dependennya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Pemerintah Kabupaten Majene dan Data Sekunder yang diperoleh dari hasil hitungan program SPSS Versi 26 For Windows melalui hasil jawaban pegawai yang diberikan melalui koesioner.

a. Perencanaan Anggaran (X1)

Perencanaan anggaran merupakan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD dimulai dari RKPD sampai RKA SKPD. Deskripsi terhadap variabel perencanaan anggaran, dilakukan dari hasil jawaban responden

mengenai pertanyaan indikator-indikator variabel perencanaan anggaran dengan nilai rata-rata sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tanggapan Responden atas Perencanaan Anggaran

Indikator	Jawaban					Jumlah
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
X1.1	17 (14,16%)	40 (33,33%)	25 (20,83%)	24 (20%)	14 (11,66%)	120 (100%)
X1.2	14 (11,66%)	63 (52,5%)	24 (20%)	17 (14,16%)	2 (1,66%)	120 (100%)
X1.3	34 (28,33%)	27 (22,5%)	13 (10,83%)	31 (25,83%)	15 (12,5%)	120 (100%)
X1.4	15 (12,5%)	41 (34,16%)	24 (20%)	25 (20,83%)	15 (12,5%)	120 (100%)
X1.5	16 (13,33%)	49 (40,83%)	23 (19,16%)	24 (20%)	8 (6,66%)	120 (100%)
X1.6	26 (21,66%)	32 (26,66%)	22 (18,33%)	21 (17,5%)	19 (15,83%)	120 (100%)
X1.7	24 (20%)	32 (26,66%)	28 (23,33%)	26 (21,66%)	10 (8,33%)	120 (100%)
X1.8	22 (18,33%)	51 (42,5%)	22 (18,33%)	21 (17,5%)	4 (3,33%)	120 (100%)
X1.9	15 (12,5%)	46 (38,33%)	27 (22,5%)	25 (20,83%)	7 (5,83%)	120 (100%)
Rata-rata	16,94%	35,27%	19,25%	17,49%	8,7%	100%

Sumber: Hasil dari pengolahan data primer, 2020

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai perencanaan anggaran, kebanyakan responden memberikan jawaban setuju dengan rata-rata 35,27%.

b. Deskripsi variabel kualitas SDM

Kualitas SDM merupakan kemampuan yang dimiliki oleh ASN yang mengacu pada keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Deskripsi terhadap variabel kualitas SDM dilakukan dari hasil jawaban responden mengenai pertanyaan indikator-indikator kualitas SDM dengan nilai rata-rata sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden atas Variabel Kualitas SDM

Indikator	Jawaban					Jumlah
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
X2.1	21 (17,5%)	38 (31,66%)	30 (25%)	24 (20%)	17 (14,16%)	120 (100%)
X2.2	27 (22,5%)	44 (36,66%)	23 (19,16%)	18 (15%)	8 (6,66%)	120 (100%)
X2.3	30 (25%)	44 (36,66%)	25 (20,83%)	16 (13,33%)	5 (4,16%)	120 (100%)
X2.4	22 (18,33%)	51 (42,5%)	21 (17,5%)	22 (18,33%)	4 (3,33%)	120 (100%)
X2.5	21 (17,5%)	44 (36,66%)	24 (20%)	25 (20,83%)	6 (5%)	120 (100%)
X2.6	22 (18,33%)	44 (36,66%)	21 (17,5%)	23 (19,16%)	15 (12,5%)	120 (100%)
X2.7	29 (24,16%)	32 (26,66%)	20 (16,66%)	26 (21,66%)	13 (10,83%)	120 (100%)
X2.8	27 (22,5%)	43 (35,83%)	20 (16,66%)	21 (17,5%)	9 (7,5%)	120 (100%)
X2.9	16 (13,33%)	38 (31,66%)	34 (28,33%)	29 (24,16%)	3 (2,5%)	120 (100%)
Rata-rata	15,92%	34,99%	20,18%	18,88%	7,4%	100%

Sumber: Hasil dari pengolahan data primer, 2020

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai kualitas SDM, kebanyakan responden memberikan jawaban setuju dengan rata-rata 34,99%.

c. Deskripsi variabel reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelolah pemerintahan Indonesia dalam hal pengelolaan keuangan negara yang terdesentralisasi, yang diwujudkan dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel dan terukur.

Deskripsi mengenai reformasi birokrasi akan diuraikan berdasarkan jawaban responden mengenai reformasi birokrasi dalam setiap indikator yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tanggapan Responden atas Reformasi Birokrasi

Indikator	Jawaban					Jumlah
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
X3.1	21 (17,5%)	38 (31,66%)	22 (18,33%)	24 (20%)	15 (12,5%)	120 (100%)
X3.2	24 (20%)	58 (48,33%)	16 (13,33%)	18 (15%)	4 (3,33%)	120 (100%)
X3.3	19 (15,83%)	39 (32,5%)	23 (19,16%)	25 (20,83%)	14 (11,66%)	120 (100%)
X3.4	21 (17,5%)	30 (25%)	28 (23,33%)	30 (25%)	11 (9,16%)	120 (100%)
X3.5	30 (25%)	59 (49,16%)	12 (10%)	16 (13,33%)	3 (2,5%)	120 (100%)
X3.6	9 (7,5%)	50 (41,66%)	26 (21,66%)	22 (18,33%)	12 (10%)	120 (100%)
X3.7	14 (11,66%)	64 (53,33%)	14 (11,66%)	20 (16,66%)	8 (6,66%)	120 (100%)
X3.8	29 (24,16%)	48 (40%)	18 (15%)	19 (15,83%)	6 (5%)	120 (100%)
Rata-rata	17,39%	40,2%	14,68%	18,12%	6,97%	100%

Sumber: Hasil dari pengolahan data primer, 2020

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai reformasi birokrasi, kebanyakan responden memberikan jawaban setuju dengan rata-rata 40,2% d. Deskripsi variabel proses lelang

Disiplin kerja merupakan kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang telah direncanakan dengan mematuhi segala aturan dan norma-norma dalam lingkungan kerja.

Berikut disajikan deskripsi proses lelang yang digambarkan dari jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan mengenai indikator pengukuran variabel proses lelang.

Tabel 4.7
Tanggapan Responden atas Variabel Proses Lelang

Indikator	Jawaban					Jumlah
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
X4.1	19 (15,83%)	42 (35%)	22 (18,33%)	24 (20%)	13 (10,83%)	120 (100%)
X4.2	13 (10,83%)	35 (29,16%)	33 (27,5%)	23 (19,16%)	16 (13,33%)	120 (100%)
X4.3	29 (24,16%)	53 (44,16%)	13 (10,83%)	20 (16,66%)	5 (4,16%)	120 (100%)
Rata-rata	16,94%	36,1%	18,88%	18,6%	9,44%	100%

Sumber: Hasil dari pengolahan data primer, 2020

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai proses lelang, kebanyakan responden memberikan jawaban setuju dengan rata-rata 36,1%.

e. Deskripsi variabel penyerapan anggaran

Penyerapan anggaran merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakannya.

Berikut disajikan deskripsi penyerapan anggaran yang digambarkan dari jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan mengenai indikator pengukuran variabel penyerapan anggaran.

Tabel 4.8

Tanggapan Responden atas Variabel Penyerapan Anggaran

Indikator	Jawaban					Jumlah
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
Y1	16 (13,33%)	43 (35,83%)	25 (20,83%)	23 (19,16%)	13 (10,83%)	120 (100%)
Y2	17 (14,16%)	50 (41,66%)	23 (19,16%)	16 (13,33%)	14 (11,66%)	120 (100%)
Y3	24 (20%)	46 (38,33%)	16 (13,33%)	24 (20%)	10 (8,33%)	120 (100%)
Y4	21 (17,5%)	28 (23,33%)	25 (20,83%)	23 (19,16%)	23 (19,16%)	120 (100%)
Y5	21 (17,5%)	30 (25%)	28 (23,33%)	30 (25%)	11 (9,16%)	120 (100%)
Y6	30 (25%)	59 (49,16%)	12 (10%)	16 (13,33%)	3 (2,5%)	120 (100%)
Y7	9 (7,5%)	50 (41,66%)	26 (21,66%)	22 (18,33%)	13 (10,83%)	120 (100%)
Y8	14 (11,66%)	64 (53,33%)	14 (11,66%)	20 (16,66%)	8 (6,66%)	120 (100%)
Rata-rata	15,83%	38,53%	15,93%	18,12%	9,89%	100%

Sumber: Hasil dari pengolahan data primer, 2020

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai penyerapan anggaran, kebanyakan responden memberikan jawaban setuju dengan rata-rata 36,1%.

2. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Validasi

Pengujian validasi data dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan alat ukur dapat mengungkapkan gejala atau kejadian yang diukur. Validasi konstruk dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan bivariante person (korelasi product momen person), dimana menurut Sugiono (2016) adalah cara yang dilakukan dengan mengkorelasikan

masing-masing item dengan nilai total penjumlahan keseluruhan item yang diolah menggunakan program SPSS, dimana dikatakan valid apabila memiliki nilai corrected item total correlation melebihi atau di atas dari 0,30.

Secara statistik angka korelasi yang diperoleh harus diuji terlebih dahulu untuk menyatakan apakah nilai korelasi yang dihasilkan signifikan atau tidak. Jika angka korelasi yang diperoleh di bawah atau kurang dari 0,30 maka pernyataan tersebut tidak valid atau tidak konsisten dengan pernyataan yang lain, sedangkan apabila di atas atau melebihi dari 0,30 berarti indikator yang digunakan sudah valid.

Untuk hasil lengkap dari uji validasi atas perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi, proses lelang dan penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Validasi
Item-Total Statistics

Variabel	Correcte Item- Total Correlation	Nilai r Standar	Keterangan	Interpretas
X1.1	0,391	0,30	> 0,30	Valid
X1.2	0,475	0,30	> 0,30	Valid
X1.3	0,453	0,30	> 0,30	Valid
X1.4	0,415	0,30	> 0,30	Valid
X1.5	0,476	0,30	> 0,30	Valid
X1.6	0,359	0,30	> 0,30	Valid
X1.7	0,322	0,30	> 0,30	Valid
X1.8	0,359	0,30	> 0,30	Valid
X1.9	0,385	0,30	> 0,30	Valid
X2.1	0,334	0,30	> 0,30	Valid
X2.2	0,458	0,30	> 0,30	Valid
X2.3	0,420	0,30	> 0,30	Valid
X2.4	0,479	0,30	> 0,30	Valid
X2.5	0,407	0,30	> 0,30	Valid
X2.6	0,354	0,30	> 0,30	Valid
X2.7	0,514	0,30	> 0,30	Valid
X2.8	0,358	0,30	> 0,30	Valid
X2.9	0,387	0,30	> 0,30	Valid
X3.1	0,434	0,30	> 0,30	Valid
X3.2	0,463	0,30	> 0,30	Valid
X3.3	0,332	0,30	> 0,30	Valid
X3.4	0,372	0,30	> 0,30	Valid
X3.5	0,428	0,30	> 0,30	Valid
X3.6	0,482	0,30	> 0,30	Valid
X3.7	0,409	0,30	> 0,30	Valid
X3.8	0,411	0,30	> 0,30	Valid
X4.1	0,709	0,30	> 0,30	Valid
X4.2	0,489	0,30	> 0,30	Valid
X4.3	0,553	0,30	> 0,30	Valid
Y1	0,509	0,30	> 0,30	Valid
Y2	0,318	0,30	> 0,30	Valid
Y3	0,428	0,30	> 0,30	Valid
Y4	0,343	0,30	> 0,30	Valid
Y5	0,403	0,30	> 0,30	Valid
Y6	0,306	0,30	> 0,30	Valid
Y7	0,414	0,30	> 0,30	Valid
Y8	0,421	0,30	> 0,30	Valid

Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

Dari tabel uji validasi diatas, tergambarakan variabel perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi dan proses lelang terhadap penyerapan anggaran memiliki nilai corrected item total correlation yang lebih besar dibandingkan dengan r standar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator atau koesioner yang digunakan pada setiap variabel valid.

b. Uji Realibilitas

Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui apakah indikator atau kuesioner yang digunakan dapat dipercaya atau handal sebagai alat ukur variabel. Realibilitas suatu indikator atau kuesioner dapat dilihat dari nilai cronbach's alpha (α), dimana menurut Sugiono (2016) bahwa suatu konstruk atau indikator dikatakan realibel yaitu apabila nilai cronbach's alpha (α) lebih besar ($>$) 0,60 maka indikator atau kuesioner adalah realible, sedangkan apabila nilai cronbach's alpha (α) lebih kecil ($<$) 0,60 maka indikator atau kuesioner tidak realible. Secara keseluruhan uji realibilitas dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10

Hasil Pengujian Realibilitas

Variabel	Cronbachs Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	Standar Realibilitas	Keterangan
Perencanaan Anggaran (X1)	0,702	0,778	0,60	Realiable
Kualitas Sumber Daya Manusia (X2)	0,729	0,759	0,60	Realiable
Reformasi Birokrasi (X3)	0,804	0,605	0,60	Realiable
Proses Lelang (X4)	0,741	0,669	0,60	Realiable
Penyerapan Anggaran (Y)	0,767	0,797	0,60	Realiable

Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

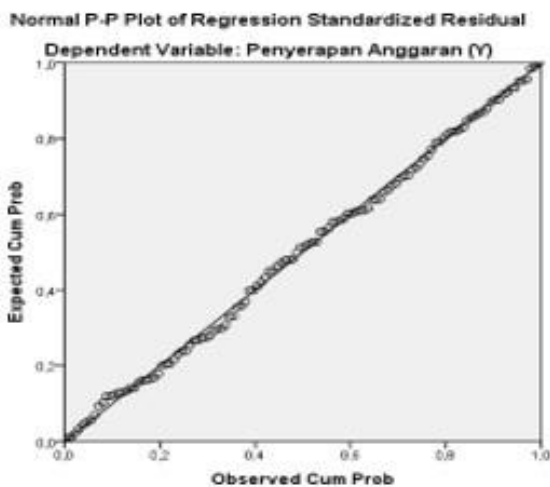
Nilai cronbach's alpha semua variabel yang ditunjukkan tabel diatas, yaitu perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi, proses lelang dan penyerapan anggaran lebih besar dari nilai standar realibilitas yaitu lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator atau koesioner semua variabel handal atau dapat digunakan sebagai alat ukur.

c. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan sebagai syarat dalam menggunakan model regresi agar hasil regresi yang diperoleh merupakan estimasi yang tepat.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan distribusi pada grafik P-P plot. Berikut ini hasil uji normalitas menggunakan grafik P-P Plot menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 26:



Gambar 4.1
Grafik P-P Plot

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal pada grafik histogram, hal ini menunjukkan bahwa pola distribusi normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan grafik P-P plot, model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas berguna untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Cara mengetahui ada tidaknya penyimpangan uji multikolinieritas adalah dengan melihat nilai Tolerance dan VIF masing-masing variabel independen, jika nilai Tolerance > 0.10 dan nilai VIF <10, maka data bebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinieritas

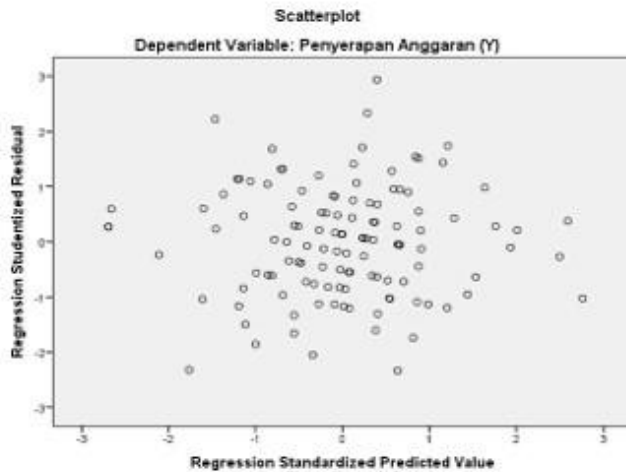
Model	Coefficients						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	2,128	1,787		3,996	,000		
	Perencanaan Anggaran (X1)	,043	,092	,043	2,469	,040	,941	1,063
	Kualitas SDM (X2)	,092	,087	,096	2,061	,001	,977	1,024
	Reformasi Birokrasi (X3)	,239	,103	,214	2,317	,022	,942	1,061
	Proses Lelang (X4)	,150	,142	,099	4,057	,000	,909	1,100

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

Melihat hasil pada tabel 4.9, hasil perhitungan nilai Tolerance tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0.10 dengan nilai Tolerance masing-masing variabel independen Perencanaan Anggaran bernilai sebesar 0.941, Kualitas SDM sebesar 0.977, Reformasi Birokrasi sebesar 0.942 dan Proses Lelang sebesar 0,909. Sementara itu hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal serupa yaitu tidak adanya nilai VIF dari variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 dengan nilai VIF masing-masing variabel independen Perencanaan Anggaran bernilai sebesar 1.063, Kualitas SDM sebesar 1.024, Reformasi Birokrasi sebesar 1.061 dan Proses Lelang sebesar 1.100. Merujuk hasil perhitungan nilai Tolerance dan VIF dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di antara angka 0 pada sumbu Y.



Gambar 4.2

Scatterplot

Berdasarkan gambar 4.2 di atas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik tersebut menyebar di antara angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi linear ada atau tidak korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau periode sebelumnya. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. Berikut hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.12

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.779 ^a	.608	.048	3,109	2,016

a. Predictors: (Constant), Proses Lelang (X4), Kualitas SDM (X2), Reformasi Birokrasi (X3), Perencanaan Anggaran (X1)

b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas nilai Durbin Watson sebesar 2.016, pembandingan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 120 (n), dan jumlah variabel independen 4 (k=4), maka di tabel Durbin Watson akan

didapat nilai du sebesar 1.77. Karena nilai DW 2.016 lebih besar dari batas atas (du) 1.77 dan kurang dari 4 – 1.63 (2.37), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

1. Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi, proses lelang terhadap penyerapan anggaran pada kabupaten Majene, dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis dilakukan berdasarkan nilai dari standardized coefficients hasil regresi antara perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi, proses lelang terhadap penyerapan anggaran.

Untuk lebih jelas akan disajikan hasil olahan data dengan menggunakan program statistical package for the social sciences (SPSS) antara perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi, proses lelang terhadap penyerapan anggaran dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Olahan Data Regresi

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.128	1.787		3.996	.000
	Perencanaan Anggaran (X1)	.043	.092	.043	2.489	.030
	Kualitas SDM (X2)	.092	.087	.096	2.061	.001
	Reformasi Birokrasi (X3)	.239	.103	.214	2.317	.022
	Proses Lelang (X4)	.150	.142	.099	4.057	.000

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

Dari hasil olahan diatas, maka dimasukkan data pada rumus regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4$$

$$Y = 2.128 + 0.043x_1 + 0.092x_2 + 0.239x_3 + 0.150x_4$$

1. Konstanta (a) sebesar 2,128 artinya jika semua variabel bebas yaitu perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi dan proses lelang memiliki nilai 0, maka kualitas audit (Y) memiliki nilai sebesar 2,128.

2. Koefisien regresi (b1) untuk variabel perencanaan anggaran (X1) sebesar 0,043; artinya jika perencanaan anggaran mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka penyerapan anggaran (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,043. Koefisien bernilai positif antara perencanaan anggaran dan penyerapan anggaran.
3. Koefisien regresi (b2) untuk variabel kualitas SDM (X2) sebesar 0,092; artinya jika kualitas SDM mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka penyerapan anggaran (Y) akan naik sebesar 0,092. Koefisien bernilai positif antara kualitas SDM dan penyerapan anggaran.
4. Koefisien regresi (b3) untuk variabel reformasi birokrasi (X3) sebesar 0,239, artinya jika reformasi birokrasi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka penyerapan anggaran (Y) akan naik sebesar 0,239. Koefisien bernilai positif antara reformasi birokrasi dan penyerapan anggaran.
5. Koefisien regresi (b4) untuk variabel proses lelang (X4) sebesar 0,150, artinya jika proses lelang mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka penyerapan anggaran (Y) akan naik sebesar 0,150. Koefisien bernilai positif antara proses lelang dan penyerapan anggaran.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi, proses lelang terhadap penyerapan anggaran pada kabupaten Majene dapat dilihat dari tabel berikut:

Table 4.14
Nilai Koefisien Determenasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.779 ^a	.608	.048	3.109

a. Predictors: (Constant), Perencanaan Anggaran, Kualitas SDM, Reformasi Birokrasi, Proses Lelang
b. Dependent Variable: Penyerapan anggaran

Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

Berdasarkan hasil analisis kolerasi yang dikutip pada table diatas, maka dapat dikatakan bahwa kolerasi atau hubungan antara variabel

perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi, proses lelang mempunyai hubungan yang cukup tinggi terhadap penyerapan anggaran, karena diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,606.

Dari tabel koefisien determinasi di atas, diketahui Adjusted R square adalah 0,606 atau 60,6%. Hal ini berarti sumbangan pengaruh dari variabel independen yaitu perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi, proses lelang terhadap penyerapan anggaran kabupaten Majene adalah 60,6% sedangkan sisanya 39,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Hasil Pengujian Hipotesis

Pembuktian hipotesis yang di sajikan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji parsial (t) dan uji simultan (F) yang diuraikan sebagai berikut:

a. Uji Parsial (t)

Analisis uji parsial (t) dilakukan untuk membuktikan pengaruh signifikan antara variabel independen (perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi, proses lelang) terhadap variabel dependen (penyerapan anggaran).

Dengan melakukan perbandingan antara nilai t hitung (t_{hitung}) dan t tabel (t_{tabel}). Penunjukan diterimahnya hipotesis jika t hitung lebih besar dari t table ($t_{hitung} > t_{tabel}$), t table (t_{tabel}) diperoleh dari banyaknya observasi dikurang banyaknya variable yang digunakan ($n - k - 1$), yaitu $120 - 5 - 1 = 114$, maka diketahui t table adalah 1.65833 (1,658). Dimana derajat signifikan yang digunakan adalah lebih kecil $\alpha = 0,05$, artinya nilai signifikan harus lebih kecil dari derajat kepercayaan (α) atau probabilitas. Untuk hasil yang dikelola, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Uji t coefficient

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	2.128	1.787		3.996			
Perencanaan Anggaran	.043	.092	.043	2.469	1,658	.030	Hipotesa diterima
Kualitas SDM	.092	.087	.096	2.061	1,658	.001	Hipotesa diterima
Reformasi Birokrasi	.239	.103	.214	2.317	1,658	.022	Hipotesa diterima
Proses Lelang	.150	.142	.099	4.057	1,658	.000	Hipotesa diterima

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Perencanaan Anggaran (X1)

Terlihat pada tabel coefficient tersebut bahwa derajat signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan atau probabilitas ($\text{sig} < \alpha$) = $0,030 < 0,05$ maka hipotesis 1 diterima. Dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$) = $2,469 > 1,658$. Terlihat bahwa variabel X1 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

2. Kualitas SDM (X2)

Terlihat pada tabel coefficient tersebut bahwa derajat signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan atau probabilitas ($\text{sig} < \alpha$) = $0,001 < 0,05$ maka hipotesis 2 diterima. Dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$) = $2,061 > 1,658$. Terlihat bahwa variabel X2 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

3. Reformasi Birokrasi (X3)

Terlihat pada tabel coefficient tersebut bahwa derajat signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan atau probabilitas ($\text{sig} < \alpha$) = $0,022 < 0,05$ maka

hipotesis 3 diterima. Dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$) = $2,317 > 1,658$, Terlihat bahwa variabel X3 memiliki kontribusi terhadap Y, Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X3 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

4. Proses Lelang (X4)

Terlihat pada tabel coefficient tersebut bahwa derajat signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan atau probabilitas ($sig, < \alpha$) = $0,000 < 0,05$ maka hipotesis 4 diterima. Dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$) = $4,057 > 1,658$, Terlihat bahwa variabel X3 memiliki kontribusi terhadap Y, Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X3 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses lelang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

b. Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, Dalam penelitian ini variabel independen terdiri dari perencanaan anggaran (X1), kualitas SDM (X2), reformasi birokrasi (X3) dan proses lelang (X4) sedangkan variabel dependen adalah penyerapan anggaran (Y). Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau tidak, maka F hitung harus lebih besar dari F tabel ($F_{hitung} > F_{tabel}$) melalui $sig, \alpha = 0,05$. Untuk mengetahui nilai F tabel (F_{tabel}) dilakukan dengan melihat tabel titik persentase distribusi F dengan probabilitas 0,05 dimana df_1 adalah $k - 1$ ($5 - 1$) = 4 dan df_2 adalah $n - k$ ($120 - 5$) = 116 sehingga diperoleh F tabel (F_{tabel}) = 2,45.

Hasil uji F antara perencanaan anggaran (X1), kualitas SDM (X2), reformasi birokrasi (X3) dan proses lelang (X4) terhadap penyerapan anggaran (Y) dapat dilihat tabel anova hasil perhitungan dari SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.16 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	93.891	4	.423	32.423	.002 ^b
	Residual	1111.478	115	9.665		
	Total	1205.187	119			

a. Predictors: (Constant), Perencanaan Anggaran , Kualitas SDM, Reformasi Birokrasi, Proses Lelang

b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

Untuk membuktikan Hipotesis penelitian yang telah diketahui sebelumnya dapat dilihat berdasarkan Tabel 4.16 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 32,423 dengan F tabel ditentukan sebesar 2,45. Maka dapat lihat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel ($F_{hitung} > F_{tabel}$) = $32,423 > 2,45$. Dengan demikian hipotesis 6 penelitian diterima, artinya variabel perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi dan proses lelang secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara positif terhadap penyerapan anggaran kabupaten Majene.

Sementara itu berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa nilai probabilitas (Sig.) yang dihasilkan sebesar 0,002, Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05) diperoleh nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa dalam penelitian ini variabel perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi dan proses lelang secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan anggaran, atau dapat dikatakan bahwa berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, diterima.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini membahas tentang sejauh mana pengaruh perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi dan proses lelang terhadap peningkatan penyerapan anggaran pada kabupaten Majene. Jenis penelitian ini adalah asosiatif, dimana dalam penelitian ini mencoba untuk menerawang hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis dalam penelitian ini, melihat hubungan perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran, hubungan kualitas SDM terhadap penyerapan anggaran, hubungan reformasi birokrasi terhadap penyerapan anggaran, hubungan

proses lelang terhadap penyerapan anggaran dan hubungan keempat variabel independen yaitu perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi dan proses lelang secara bersamaan terhadap variabel dependen yaitu penyerapan anggaran

Penelitian ini mengambil sampel sebagai responden sebanyak 120 orang untuk menjadi alat ukur dengan berbagai karakteristik. Berdasarkan karakteristik tingkatan umur diketahui jumlah responden yang memiliki tingkatan umur antara 31 sampai 45 tahun sebanyak 62 orang dengan persentase 52%. Usia yang dianggap produktif karena mampu menyerap dan menerima hal yang baru serta memiliki semangat yang tinggi. Selanjutnya pada karakteristik tingkat pendidikan, pada tingkat strata satu (S1) memiliki angka yang lebih banyak yaitu 98 orang dengan persentase 82%. Tingkat pendidikan yang tinggi dianggap lebih produktif dalam melaksanakan dan memahami pekerjaannya. Karakteristik pada jenis kelamin jumlah laki-laki jauh lebih banyak yaitu sebesar 96 orang dengan persentase 80%. Umumnya laki-laki lebih produktif dibandingkan perempuan. Hal ini dikarenakan faktor fisik laki-laki jauh lebih besar dari pada perempuan, terutama bidang pekerjaan yang lebih menguras tenaga.

Pada analisis masalah selanjutnya dalam penelitian ini, mencoba mengetahui seberapa besar variabel perencanaan anggaran, kualitas SDM, reformasi birokrasi dan proses lelang berpengaruh pada variabel penyerapan anggaran pada kabupaten Majene. Untuk menguji penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda, uji F atau uji simultan dan uji t atau uji parsial. Secara umum hasil penelitian ini memuaskan. Segala hipotesis yang digambarkan diterima berdasarkan analisis hasil jawaban responden pada kabupaten Majene yang terkelola.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, Proses Lelang terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Majene Berdasarkan hasil analisis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, proses lelang secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Majene. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, proses lelang merupakan faktor-faktor yang sangat perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Majene.

2. Saran

Dari hasil penelitian dan keterbatasan penelitian ini, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk :

1. Melakukan metode wawancara secara langsung dan mendalam kepada responden untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.
2. Menambah dan mempertimbangkan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran SKPD seperti variabel waktu penetapan anggaran dan sistem pengendalian intern pemerintah.
3. Dalam rangka mengoptimalkan penyerapan anggaran SKPD Pemerintah Kabupaten Majene. dapat meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi secara optimal, meningkatkan kualitas aparatur sipil negara dalam hal kualitas kerja dan disiplin kerja serta motivasi terutama yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan serta memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan metode observasi lapangan untuk dapat mengamati langsung sehingga dapat lebih yakin dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan.

REFERENSI

- Akadira, Tora, 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Amran, 2009. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Departmen Sosial Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ichsan Gorontalo. Vol.4. No.2, Gorontalo.
- Arif, Emkhad. 2012. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I Vol. 19 No. 2 Desember 2012.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).2011. Menyoal Penyerapan Anggaran. Majalah Perwakilan BPKP Provinsi D.I Yogyakarta, Edisi Desember 2011 tahun III/No 6 ISSN 2088-2890.
- Bakara, Bakerlin S., 2000. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pembangunan Pemda DKI Jakarta. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi 1. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Dewi, Aninda Yusmiati, Meirinawati. 2012. Analisis Reformasi Birokrasi (Studi Deskriptif Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I
- Erlina.2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Medan:Usu Press.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herriyanto, H. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementrian/Lembaga di Wilayah Jakarta.Tesis. Jakarta: FEUI.
- Kuncoro, Egiastyo Dwi. 2013. Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi SiPP pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas PU Prov. Kaltim. eJournal Administrasi Bisnis, 2013, 1 (4) ISSN 0000-0000 ejournal.adbisnis.fsip-unmul.ac.id

- Kuswoyo, Iwan Dwi. 2011. Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.
- Malahayati, Cut; Islahuddin; Hasan Basri. 2015. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, Volume 4, No. 1, februari 2015, ISSN 2302-0199 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 9 Pages pp. 11- 19.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Maulana, D. (2011). Analisis Penelusuran Anggaran APBD Provinsi Banten di Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011*. Banten: Universitas Serang Raya.
- Miliasih, Retno. 2012. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. Tesis. Jakarta. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Ministry of Finance, Planning and Economic Development Uganda, 2011, *Absortive Capacity Constrain*.
- Monica, Andrea and Gabriela Monica, 2013. The role of the Government in the absorption of The European Funds in Romania, *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, Vol.2, Issue 4.
- Notoadmodjo, S. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Noviwijaya, A., dan Rohman, A. (2013). Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang I). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 3, Hlm 1.
- Nugroho, M.A., dan Ananda, C.F. (2013). Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir Tahun

- Di KPPN Malang. Jurnal. FE dan Bisnis Universitas Brawijaya.(online) (<http://JIM.FEB.UB.ac.id>). Diakses 17Mei 2015.
- Putri, C.T. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Skripsi.Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Rifai, Ahmad, Biana Adha Inapty, Rr. Sri Pancawati M. 2016. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Pemprov NTB). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Volume 11, No. 1, Januari 2016.
- Ruwaida, Darwanis, Syukriy Abdullah.2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi, Volume 4, No. 4, November 2015, ISSN 2302-0164
- Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 10 Pages pp. 101- 110.
- Said, Mas'ud, 2007, Birokrasi di Negara Birokratis, Malang: UMM Press.
Sedarmayanti.2009.Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: PT Refika Aditama
- Seftianova, R.dan Helmy,A. (2013). Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran pada Satker Wilayah KPPN Malang.JRAK. Vol.4,No. 1,Hlm 75-84.
- Sinaga, Edward James, 2016. Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementrian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Jurnal Rechts Vinding Volume 5 Nomor. 2, Agustus 2016
- Siswanto D.A dan Rahayu L.S. 2011. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementrian/Lembaga TA 2010.
- Sugiyono. 2012. Statistika Untuk Penelitian. Bandung. Penerbit Alfabeta.
Suhipna, D. dan Winarti, 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja
- Penyerapan Anggaran Di Wilayah Kerja Kppn Sragen. Jurnal Ekonomi Volume XXV No. 2.Hal 15-34

- Supriana, Tavi, 2016. Metode Penelitian Sosial Ekonomi, USU Press, Medan.
- Toni. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Daya Serap Anggaran Pada KPPN Bandung.
- Tunggal, T. B. (2011). Problem Klasik Penyerapan Anggaran Harus diatasi. Media Keuangan. Volume VI.
- UNDP. (2008). Capacity Development Practice Note.
- Utomo, Kurniawan Cahyo, 2014. Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai, Reformasi Birokrasi, dan Disiplin Kerja terhadap Motivasi dan Penyerapan Anggaran. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 14, No. 1, April 2014
- Yuhertiana. 2003. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi 1. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Yunarto, I. (2011). Memahami Proses Penganggaran untuk Mendorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran. Yogyakarta:ParisReview.
- Yustini, Santi, 2014. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderating. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 4, No. 2, Agustus 2014.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

CHAPTER 2

KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kabupaten Majene)

Rahman¹

Sukmawati Mardjuni²

Haeruddin Saleh³

^{1,2,3}Program Studi Magister Manajemen, Universitas Bosowa

Email: rahman.01@yahoo.com

Abstrak: Kabupaten Majene merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Barat yang telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari BPK RI. Keberhasilan ini sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Majene mengingat sebelumnya hanya meraih WDP atas Laporan Keuangan selama beberapa tahun. Kualitas Laporan Keuangan menjadi indikator utama dalam pencapaian suatu Daerah karena dalam laporan keuangan mengungkapkan hak dan kewajiban atas penyelenggaraan Pemerintah. Pencapaian tersebut memungkinkan ada peran Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisa kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi, standar akuntansi pemerintahan terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK- OPD), staf keuangan/akuntansi dan bendahara di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Majene sejumlah 40 SKPD. pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus slovin sehingga didapatkan sampel penelitian sejumlah 92 orang. Data dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Program yang

digunakan dalam Pengujian hipotesis ini adalah Program SPSS dengan metode analisis regresi berganda. Penelitian ini membuktikan bahwa 1. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Majene. Entitas akuntansi banyak yang berlatar belakang Pendidikan akuntansi sehingga mampu mengolah Laporan Keuangan yang lebih berkualitas karena sesuai dengan basic keilmuannya, 2. Teknologi informasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene. Pelaksanaan Akuntansi melalui aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Majene terintegrasi cepat, mudah dan akurat dalam mengolah laporan keuangan 3. standar akuntansi pemerintahan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Majene. Prinsip – Prinsip Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan telah disajikan sesuai dengan akuntansi dalam laporan keuangan.

Kata kunci: Kapasitas SDM, Teknologi Informasi, Standar Akuntansi dan Laporan Keuangan.

A. PENDAHULUAN

Besarnya kewenangan daerah merupakan salah satu amanat dari Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan tentang penyerahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah, sehingga timbul tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai organisasi publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan Transparansi dalam mengelola keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta taat kepada peraturan perundang-undangan.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, membawa perubahan atas penyelenggaraan sistem akuntansi dari berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) menjadi berbasis akrual (accrual). Dalam rangka implementasi peraturan tersebut,

maka terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Aspek pengungkapan penuh (full disclosure) menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan akuntansi berbasis akrual. Hal ini terkait dengan pengungkapan hak ataupun kewajiban pemerintah daerah yang dalam penyelenggaraan cash toward accrual dianggap belum mengakomodir secara penuh akan penyajian hak dan kewajiban pemerintah daerah yang semestinya diungkapkan dalam penyusunan laporan keuangan

Perubahan penting terkait dengan perubahan penyelenggaraan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis cash toward accrual menjadi penyelenggaraan akuntansi berbasis accrual adalah perubahan atas jumlah laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan sistem akuntansi accrual, pemerintah daerah selaku entitas pelaporan berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan, yang terdiri atas:

1) Neraca, (2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (3) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD kurung waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Perubahan Peraturan ini tidaklah merubah secara keseluruhan aturan yang telah diterapkan sebelumnya namun masih tetap sejalan dengan paket peraturan lain terkait pengelolaan keuangan yang telah terlebih dahulu ada seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Selanjutnya juga dilakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yaitu digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang dibidang keuangan tersebut mengamanatkan agar Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Majene disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan sampai dengan tahun 2015 dan seluruh transaksi yang telah dilakukan selama periode Tahun Anggaran 2015. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan yaitu menyajikan informasi/data keuangan yang menggambarkan posisi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja dan beban yang tercantum dalam Laporan Keuangan.

Selain hal tersebut, pemberlakuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 mengisyaratkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan tersebut di atas, merupakan rangkuman dari pelaksanaan APBD pada unit kerja terkait yang dipertanggungjawabkan selama satu periode. Oleh sebab itu, keakuratan laporan keuangan yang dihasilkan tergantung pada bagaimana unit kerja membuat dan menyampaikan SPJ. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak hanya sebatas menyampaikan SPJ tetapi lebih dari itu, bahwa SKPD diposisikan sebagai entitas akuntansi. Sebagai entitas akuntansi, SKPD memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD untuk kemudian dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja

keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, untuk:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumberdaya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan sumberdaya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumberdaya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) Indikasi apakah sumberdaya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- 2) Indikasi apakah sumberdaya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam Perda.

Fenomena perkembangan pemerintahan di Indonesia saat ini adalah tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas keuangan adalah pemberian informasi atas aktivitas dalam menjaga keakuratan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, pemerintah wajib merespon tuntutan akuntabilitas tersebut di atas.

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat melalui DPRD setelah terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai dengan Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Akuntabilitas dan transparansi menjadi budaya tanggung jawab penggunaan anggaran negara perlu terus dikembangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas, melalui laporan keuangan yang harus dipublikasikan. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik juga mewajibkan pemerintah memberikan mengenai kinerja badan publik diantaranya yaitu mengenai laporan keuangan yang benar, akurat dan tidak menyesatkan.

Dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah, akan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. Oleh karena itu, tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai atau dengan kata lain, bahwa harus mempunyai nilai. Suwardjono (2005) menyatakan bahwa nilai adalah kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan.

Pentingnya laporan keuangan pemerintah daerah harus disadari bahwa banyak pihak yang mengandalkan dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. akan bermanfaat apabila memenuhi karakteristik kualitatif (qualitative characteristics). Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas yang menjadikan dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat, telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan dan 4) dapat dipahami.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah masih memiliki kelemahan dan kekurangan dalam hal kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengertian pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara mencakup akuntabilitas yang harus diterapkan semua entitas oleh pihak yang melakukan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Faktor kedua adalah pemanfaatan teknologi yang belum maksimal dalam penyusunan laporan keuangan ditandai dengan masih adanya OPD/OPD yang melakukan pencatatan dan pelaporan secara manual transaksi ke dalam buku kas umum (BKU) bendahara pengeluaran dan buku buku pembantu lainnya sehingga memperlama waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Belum maksimalnya penerapan standar akuntansi pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah juga menjadi penyebab kelemahan dan kekurangan dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kelemahan lainnya dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene sendiri, dapat dilihat dari hasil review Inspektorat Kabupaten Majene tahun 2017 dan tahun 2018 yang memberi catatan-catatan berupa kesimpulan dan Saran antara lain

- 1) Seluruh kepala OPD agar membuat Berita Acara Penghentian Penggunaan aset tetap yang rusak berat kemudian direklasifikasikan ke aset lainnya;

- 2) Seluruh kepala OPD agar Dalam menyusun laporan keuangan menyajikan akun-akun yang ada dalam 5 Komponen Laporan yang dimaksud;
- 3) Penyusun LKPD Tahun 2018 agar menjelaskan nilai selisih yang terkait dalam analisis vertikal dan horisontal;
- 4) Penyusun Laporan Keuangan OPD Tahun 2018 agar Transaksi pada akun-akun yang ada pada 5 komponen Laporan Keuangan dijelaskan secara lengkap pada CaLK;
- 5) Bidang akuntansi melakukan rekonsiliasi external pendapatan daerah dengan Kas Daerah ;

Keadaan ini memberikan fakta bahwa laporan keuangan pemerintah daerah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berupa laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Selain temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di atas, fenomena yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Majene yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) masih belum sepenuhnya berlatar belakang pendidikan akuntansi sehingga pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh staf lain, yang mengakibatkan belum sepenuhnya PPK-OPD mampu menyusun laporan keuangan dengan baik dan tepat waktu yaitu selambat- lambat nya 2 (dua) bulan sesudah tahun anggaran berakhir. Begitu juga dengan pegawai yang bekerja di bidang pengelolaan keuangan, masih banyak yang belum memahami sepenuhnya akan tugas dan tanggungjawabnya, sistem akuntansi dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan.

Yuliani (2010) menyatakan bahwa perubahan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara otomatis juga membutuhkan pemahaman akuntansi yang baik dari pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemahaman akuntansi ini berkaitan dengan proses dan prosedur akuntansi yang dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penelitian Hendra (2012) mengungkapkan Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap nilai pelaporan keuangan OPD. Menurut Mahaputra (2014) kapasitas SDM, pemanfaatan sistem keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Karmila (2014) yang menyatakan hanya pemanfaatan teknologi yang berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, sedangkan kapasitas SDM dan pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Begitu juga dengan penelitian Fikri (2015) menunjukkan penerapan SAP, kompetensi aparatur, dan SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

1. Kualitas Laporan Keuangan

Pengertian kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) yaitu merupakan tingkat baik buruknya sesuatu, kadar atau taraf atau derajat sesuatu. Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu merupakan laporan yang terstruktur tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau beberapa entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang mengkan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (stakeholder), tentang kondisi keuangan pemerintah (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya . Secara spesifik,tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik.

Pelaporan keuangan juga membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan untuk memperoleh dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan keuangan sebagai sumber yang penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat. Oleh karena itu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan publik untuk berbagai kepentingan pengguna, salah satunya penggunaan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sebuah laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas apabila tersebut dapat memberikan kepada pemakai laporan keuangan pemerintah baik pihak internal dan eksternal serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta pertanggungjawaban. dikatakan mempunyai kualitas (kebermanfaatan keputusan) apabila tersebut dapat menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, atau masa datang, dapat menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian, serta dapat mengubah keputusan atau perilaku para pemakai laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam paragraf 35 bagian kerangka konseptual, disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada empat karakteristik yang merupakan prasyarat

normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:

1) Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*prediktive value*), yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu (*timeliness*), yaitu informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal

Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a. Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari

sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- c. Netralitas, yaitu informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- d. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entita pelaporan lain pada umumnya.
- e. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Berdasarkan berbagai variable penelitian terdahulu tersebut, peneliti merangkumnya dan fokus pada 3 (tiga) variable yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Standar Akuntansi Pemerintahan .

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil- hasil (outcomes). Menurut Tjiptoherijanto (2001, dikutip dalam Indriasari dan Nahartyo (2008), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-

pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menyusun laporan keuangan diperlukan juga kapasitas sumber daya manusia berupa kompetensi di bidang akuntansi. Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil pengertian kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi pegawai dalam bidang akuntansi yang dimiliki oleh Kasubbag Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) maupun staf keuangan pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dapat mempermudah pekerjaan, mahir, dan memahami sistem pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran yang dikelolanya. Sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi dan keuangan dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan yang berkualitas dalam hal pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan tepat waktu dan andal.

3. Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan

mengelola keuangan, dan menyalurkan keuangan sebagai bentuk pelayanan publik.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi untuk membangun jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Wilkinson et al., (2000) mengatakan pemanfaatan teknologi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan , sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Teknologi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000). Teknologi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan , juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran . Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Teknologi dalam hal ini komputer, juga menghasilkan laporan- laporan dan lainnya.

Hanya saja pengkomputerisasian sistem akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas. Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapan-tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. Output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Terlebih lagi, output dapat didistribusikan kepada orang lain yang terhubung lewat LAN, yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan dalam hal (Wilkinson et al., 2000:76):

- 1) Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat,
- 2) Keakuratan dalam perhitungan dan perbandingan lebih besar,
- 3) Biaya pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah,

- 4) Penyiapan laporan dan Output lainnya lebih tepat waktu,
- 5) Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan,
- 6) Pilihan pemasukan data dan penyediaan Output lebih luas/banyak.
- 7) Produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan

4. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian penerapan SAP yang baik, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah (Nordian, 2006). SAP diatur pertama sekali melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dengan basis kas menuju basis akrual, tetapi penerapannya masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun, sementara sampai dengan tahun 2014 pemerintah pusat terutama pemerintah daerah belum melaksanakan basis akrual tersebut. Oleh karena itu diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual.

Sesuai dengan SAP komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan hasil pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial. Laporan hasil pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK) serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan laporan yang merinci atas pos-pos pelaksanaan anggaran dan laporan finansial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dalam Kerangka Konseptual dinyatakan bahwa setiap entitas pelaporan dalam menghasilkan laporan keuangan berkewajiban untuk melaporkan upaya dan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan suatu entitas secara sistematis dan terstruktur untuk memenuhi kepentingan 1. Akuntabilitas; 2. Manajemen; 3. Transparansi; 4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity); dan 5. Evaluasi Kinerja

Salah saji yang material dalam laporan keuangan (LKPD) dapat dihindari dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keseragaman dari bentuk dan format laporan keuangan yang dijadikan acuan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dimana LKPD harus disajikan sesuai dengan SAP.

B. METODE PENELITIAN

1. Variabel Penelitian

Definisi operasional dari masing-masing variabel merupakan definisi yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan besarnya nilai dari masing-masing variabel tersebut. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah variabel independen dan dependen. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat dan variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006).

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala interval. Menurut Erlina dan Mulyani (2007) skala interval adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori, peringkat dan jarak konstruk yang diukur tetapi tidak menggunakan angka nol sebagai titik awal perhitungan dan bukan angka absolut. Skala interval ini biasanya diukur melalui instrumen kuesioner dengan Skala Likert, yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena pendidikan. Dalam skala sikap terdapat dua bentuk pernyataan yaitu pernyataan positif yang berfungsi untuk mengukur sikap positif, dan pernyataan negative yang berfungsi untuk mengukur

sikap negative objek sikap. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002) skala likert merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setujuannya terhadap subyek, obyek, atau kejadian tertentu. Skala sikap umumnya menggunakan lima angka penilaian yaitu (1) sangat setuju, (2) setuju, (3) tidak pasti atau netral, (4) tidak setuju, dan (5) sangat tidak setuju. Urutan setuju atau tidak setuju dapat juga dibalik mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah Kumpulan fakta data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa latin yang berarti “sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari – hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka , kata – kata atau citra.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian . tujuan penelitian yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara membagikan koesioner kepada setiap responden.

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu data kualitatif (yang berbentuk kata-kata/kalimat) dan data kuantitatif (yang berbentuk angka).

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang memiliki tingkat eksplanasi asosiatif yaitu penelitian yang didasarkan banyaknya obyek yang diteliti yang didesain secara spesifik untuk mengetahui obyek tertentu atau benar-benar fokus pada sampel yang telah ditentukan, sedangkan data yang digunakan adalah data primer melalui yaitu pembagian kuesioner.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda (multiple regression analysis), karena sesuai

dengan tujuan penelitian yaitu untuk menguji dan menganalisis secara parsial dan simultan pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi , Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Majene.

Pengujian kualitas instrument dan data ini berupa uji validitas dan reliabilitas yaitu:

- a. Uji validitas, digunakan untuk mendeteksi adakah pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang/ditukar karena dianggap tidak relevan (Umar, 2009). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Jika r hitung (dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation) lebih besar dari r tabel (untuk degree of freedom (df)= $n-2$ pada tabel r Product Moment) dengan signifikansi 5% dan bernilai positif, maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2013).
- b. Uji reliabilitas, yaitu alat untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten jika diulangi beberapa kali. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,70$ (Nunnally dalam Ghozali, 2013). Hasil Pilot Test untuk pengujian validitas dapat diketahui bahwa seluruh butir pertanyaan pada masing-masing variabel menunjukkan nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan butir pertanyaan untuk semua variabel dinyatakan valid. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas diketahui nilai Cronbach Alpha pada setiap variabel penelitian memiliki nilai lebih besar dari 0,7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner penelitian yang digunakan reliabel atau handal
- c. Koefisien regresi , Pengujian hipotesis pada penelitian ini yaitu variabel independen terhadap variabel dependen dimana model regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel dengan variabel

lain. Metode ini akan menguji tingkat signifikansi dari pengaruh semua variabel independennya. Persamaan regresi hipotesis pertama yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots(1)$$

Dimana:

Y = Kualitas Laporan Keuangan α = Koefisien konstant

β_1, \dots, β_3 = Koefisien regresi

X1= Kapasitas Sumber Daya Manusia

X2= Pemanfaatan Teknologi

X3= Standar Akuntansi Pemerintahan

e = error / Tingkat kesalahan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

a. Deskriptif Berdasarkan Jenis Kelamin

Deskripsi berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi (%)
Laki – Laki	64	70
Perempuan	28	30
Jumlah	92	100

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah responden jenis kelamin terbanyak pada laki-laki berjumlah 64 orang atau 70%, sedangkan sisanya 28 orang atau 30% dipenuhi oleh jenis kelamin perempuan. Artinya sebagai besar responden yang mengisi kuesioner adalah laki-laki.

b. Deskriptif Berdasarkan Umur

Deskripsi berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Umur Responden

Usia	Frekuensi	Presentasi (%)
20-30 Tahun	12	13
31-45 Tahun	45	49
46-55 Tahun	27	30
Lebih dari 55 Tahun	8	8
Jumlah	92	100

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan usia terbesar berada pada responden berusia 31-45 tahun sebanyak 45 orang atau 49%. Responden yang berusia 46-55 tahun sebanyak 27 orang atau 30%. Kemudian responden yang berusia lebih dari 55 tahun sebanyak 8 orang atau 8%. Sedangkan responden berusia 20-30 tahun sebanyak 12 orang atau 13%.

c. Deskriptif Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Deskripsi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi (%)
SLTA	8	9
D3	0	0
S1	68	74
S2	16	17
S3	0	0
Jumlah	92	100

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan terbesar berada responden S1 sebanyak 68 orang atau 74%, responden yang tingkat pendidikan SLTA sebanyak 8 orang atau 9%, responden yang tingkat pendidikan S2 sebanyak 16 orang atau 17%. Dari 51 Responden. Sedangkan responden yang tingkat pendidikan D3 dan S3 tidak ada (0%).

2. Deskriptif Variabel

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kapasitas SDM, Teknologi informasi, dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene pada pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan tiga

variabel independen yaitu Kapasitas SDM (X1), Teknologi informasi (X2), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3).

Sedangkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah sebagai variabel dependennya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari kantor Kabupaten Majene dan Data Sekunder yang diperoleh dari hasil hitungan program SPSS Versi 26 For Windows melalui hasil jawaban pegawai yang diberikan melalui koesioner.

a. Kapasitas SDM (X1)

Kapasitas Sumber Daya Manusia yang merupakan variabel independen adalah kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Deskripsi terhadap variabel kapasitas SDM, dilakukan dari hasil jawaban responden mengenai pertanyaan indikator-indikator variabel kapasitas SDM dengan nilai rata-rata sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tanggapan Responden atas Kapasitas SDM

Indikator	Jawaban					Jumlah
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
X1.1	15 (16,3%)	22 (23,91%)	20 (21,73%)	24 (26,08%)	11 (11,95%)	92 (100%)
X1.2	12 (13,04%)	37 (40,21%)	20 (21,73%)	18 (19,56%)	5 (5,43%)	92 (100%)
X1.3	20 (21,73%)	34 (36,95%)	15 (16,3%)	17 (18,47%)	6 (6,52%)	92 (100%)
X1.4	13 (14,13%)	33 (35,86%)	21 (22,82%)	17 (18,47%)	8 (8,69%)	92 (100%)
X1.5	14 (15,21%)	34 (36,95%)	20 (21,73%)	12 (13,04%)	12 (13,04%)	92 (100%)
X1.6	21 (22,82%)	22 (23,91%)	16 (17,39%)	17 (18,47%)	16 (17,39%)	92 (100%)
X1.7	19 (20,65%)	27 (29,34%)	22 (23,91%)	16 (17,39%)	8 (8,69%)	92 (100%)
X1.8	21 (22,82%)	31 (33,69%)	23 (25%)	16 (17,39%)	1 (1,08)	92 (100%)
X1.9	9 (9,78%)	43 (46,73%)	21 (22,82%)	17 (18,47%)	2 (2,17%)	92 (100%)
X1.10	9 (9,78%)	44 (47,82%)	15 (16,3%)	18 (19,56%)	6 (6,52%)	92 (100%)
X1.11	15 (16,3%)	42 (45,65%)	16 (17,39%)	16 (17,39%)	3 (3,26%)	92 (100%)
Rata-rata	15,7%	36,45%	20,64%	20,15%	7,7%	100%

Sumber: Hasil dari pengolahan data primer, 2020

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai kapasitas SDM, kebanyakan responden memberikan jawaban setuju dengan rata-rata 36,45%.

b. Deskripsi variabel Teknologi informasi

Pemanfaat teknologi Informasi yang meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Deskripsi terhadap variabel Teknologi informasi dilakukan dari hasil jawaban responden mengenai pertanyaan indikator-indikator Teknologi informasi dengan nilai rata-rata sebagai berikut:

Tabel 4.5

Tanggapan Responden atas Variabel Teknologi informasi

Indikator	Jawaban					Jumlah
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
X2.1	12 (13,04%)	34 (36,95%)	18 (19,56%)	19 (20,65%)	9 (9,78%)	92 (100%)
X2.2	14 (15,21%)	34 (36,95%)	18 (19,56%)	18 (19,56%)	8 (8,69%)	92 (100%)
X2.3	14 (15,21%)	42 (45,65%)	14 (15,21%)	15 (16,3%)	7 (7,6%)	92 (100%)
X2.4	20 (21,73%)	32 (34,78%)	15 (16,3%)	13 (14,13%)	12 (13,04%)	92 (100%)
X2.5	12 (13,04%)	35 (38,04%)	18 (19,56%)	18 (19,56%)	9 (9,78%)	92 (100%)
X2.6	25 (27,17%)	18 (19,56%)	20 (21,73%)	19 (20,65%)	10 (10,86%)	92 (100%)
X2.7	14 (15,21%)	45 (48,91%)	12 (13,04%)	15 (16,3%)	6 (6,52%)	92 (100%)
X2.8	13 (14,13%)	35 (38,04%)	22 (23,91%)	16 (17,39%)	6 (6,52%)	92 (100%)
X2.9	27 (29,34%)	48 (52,17%)	10 (10,86%)	4 (4,34%)	3 (3,26%)	92 (100%)
X2.10	28 (30,43%)	47 (51,08%)	10 (10,86%)	5 (5,43%)	2 (2,17%)	92 (100%)
X2.11	31 (33,69%)	44 (47,82%)	13 (14,13%)	2 (2,17%)	2 (2,17%)	92 (100%)
X2.12	36 (39,13%)	46 (50%)	6 (6,52%)	3 (3,26%)	1 (1,08)	92 (100%)
X2.13	34 (36,95%)	41 (44,56%)	11 (11,95%)	4 (4,34%)	2 (2,17%)	92 (100%)
X2.14	42 (45,65%)	38 (41,3%)	9 (9,78%)	2 (2,17%)	1 (1,08)	92 (100%)
Rata-rata	26,91%	45,06%	16,38%	11,87%	6,05%	100%

Sumber: Hasil dari pengolahan data primer, 2020

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai Teknologi informasi, kebanyakan responden memberikan jawaban setuju dengan rata-rata 45,06%.

c. Deskripsi variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)

Standar Akuntansi Pemerintahan Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan SAP oleh OPD didalam menyusun laporan keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP yang terdiri atas 11 (sebelas) pernyataan standar yang diantaranya adalah Penyajian laporan keuangan berbasis akrual, Penyajian LRA berbasis kas, Penyajian CaLK secara lengkap, Pengakuan dan pencatatan persediaan, Pengakuan dan pencatatan aset tetap, Variabel ini diukur melalui skala likert lima dengan menggunakan lima indikator dari penerapan SAP (akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja) yang mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

Deskripsi mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan akan diuraikan berdasarkan jawaban responden mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dalam setiap indikator yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6

Tanggapan Responden atas Standar Akuntansi Pemerintahan

Indikator	Jawaban					Jumlah
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
X3.1	19 (20,65%)	27 (29,34%)	22 (23,91%)	16 (17,39%)	8 (8,69%)	92 (100%)
X3.2	21 (22,82%)	31 (33,69%)	23 (25%)	16 (17,39%)	1 (1,08)	92 (100%)
X3.3	9 (9,78%)	42 (45,65%)	21 (22,82%)	17 (18,47%)	2 (2,17%)	92 (100%)
X3.4	9 (9,78%)	44 (47,82%)	15 (16,3%)	18 (19,56%)	6 (6,52%)	92 (100%)
X3.5	15 (16,3%)	29 (31,52%)	24 (26,08%)	22 (23,91%)	2 (2,17%)	92 (100%)
X3.6	25 (27,17%)	23 (25%)	9 (9,78%)	22 (23,91%)	13 (14,13%)	92 (100%)
X3.7	14 (15,21%)	41 (44,56%)	14 (15,21%)	17 (18,47%)	6 (6,52%)	92 (100%)
X3.8	16 (17,39%)	32 (34,78%)	20 (21,73%)	14 (15,21%)	10 (10,86%)	92 (100%)
X3.9	23 (25%)	67 (72,82%)	2 (2,17%)	0	0	92 (100%)
X3.10	21 (22,82%)	67 (72,82%)	4 (4,34%)	0	0	92 (100%)
X3.11	51 (55,42%)	40 (43,47%)	1 (1,08%)	0	0	92 (100%)
X3.12	39 (42,39%)	49 (53,26%)	4 (4,34%)	0	0	92 (100%)
X3.13	33 (35,86%)	56 (60,86%)	3 (3,26%)	0	0	92 (100%)
X3.14	33 (35,86%)	56 (60,86%)	3 (3,26%)	0	0	92 (100%)
X3.15	32 (34,78%)	51 (55,43%)	5 (5,43%)	2 (2,17%)	0	92 (100%)
X3.16	39 (42,39%)	52 (56,52%)	1 (1,08)	0	0	92 (100%)
X3.17	18 (19,56%)	70 (76,08%)	4 (4,34%)	0	0	92 (100%)
X3.18	10 (10,86%)	78 (84,78%)	4 (4,34%)	0	0	92 (100%)
X3.19	38 (41,3%)	51 (55,43)	3 (3,26%)	0	0	92 (100%)
X3.20	27 (29,34%)	65 (70,06%)	0	0	0	92 (100%)
X3.21	34 (36,95%)	56 (60,86%)	2 (2,17%)	0	0	92 (100%)
X3.22	48 (52,17%)	44 (47,82%)	0	0	0	92 (100%)
X3.23	42 (45,65%)	49 (53,26%)	1 (1,08%)	0	0	92 (100%)
X3.24	39 (42,39%)	51 (55,43%)	2 (2,17%)	0	0	92 (100%)
X3.25	38 (41,3%)	53 (57,6%)	1 (1,08%)	0	0	92 (100%)
X3.26	32 (34,78%)	59 (64,13%)	1 (1,08%)	0	0	92 (100%)
Rata-rata	30,3%	53,6%	7,89%	6,01%	2%	100%

Sumber: Hasil dari pengolahan data primer, 2020

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, kebanyakan responden memberikan jawaban setuju dengan rata-rata 53,6%

d. Deskripsi variabel kualitas laporan keuangan

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berdasarkan pada karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, Indikator

Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah ini menggunakan lima indikator yang mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Berikut disajikan deskripsi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang digambarkan dari jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan mengenai indikator pengukuran variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4.7

Tanggapan Responden atas Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Indikator	Jawaban					Jumlah
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
Y1	17 (18,47%)	30 (32,6%)	21 (22,82%)	19 (20,65%)	5 (5,43%)	92 (100%)
Y2	22 (23,91%)	41 (44,56%)	14 (15,21%)	11 (11,95%)	4 (4,34%)	92 (100%)
Y3	16 (17,39%)	34 (36,95%)	22 (23,91%)	18 (19,56%)	1 (1,08%)	92 (100%)
Y4	17 (18,47%)	33 (35,86%)	17 (18,47%)	18 (19,56%)	7 (7,6%)	92 (100%)
Y5	18 (19,56%)	29 (31,52%)	14 (15,21%)	20 (21,73%)	11 (11,95%)	92 (100%)
Y6	20 (21,73%)	32 (34,78%)	21 (22,82%)	14 (15,21%)	5 (5,43%)	92 (100%)
Y7	14 (15,21%)	41 (44,56%)	17 (18,47%)	19 (20,65%)	1 (1,08%)	92 (100%)
Y8	19 (20,65%)	42 (45,65%)	13 (14,13%)	15 (16,3%)	3 (3,26%)	92 (100%)
Y9	35 (38,04%)	41 (44,56%)	11 (11,95%)	3 (3,26%)	2 (2,17%)	92 (100%)
Y10	36 (39,13%)	34 (36,95%)	14 (15,21%)	7 (7,6%)	1 (1,08%)	92 (100%)
Y11	35 (38,04%)	38 (41,3%)	15 (16,3%)	2 (2,17%)	2 (2,17%)	92 (100%)
Y12	36 (39,13%)	33 (35,86%)	12 (13,04%)	8 (8,69%)	0	92 (100%)
Y13	30 (32,6%)	39 (42,39%)	14 (15,21%)	6 (6,52%)	3 (3,26%)	92 (100%)
Y14	35 (38,04%)	47 (51,08%)	6 (6,52%)	3 (3,26%)	1 (1,08%)	92 (100%)
Rata-rata	27,16%	39,9%	16,37%	12,65%	3,56%	100%

Sumber: Hasil dari pengolahan data primer, 2020

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai kualitas laporan keuangan, kebanyakan responden memberikan jawaban setuju dengan rata-rata 39,9%.

3. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Validasi

Pengujian validasi data dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan alat ukur dapat mengungkapkan gejala atau kejadian yang diukur. Validasi konstruk dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan

bivariate person (korelasi product momen person), dimana menurut Sugiono (2016) adalah cara yang dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing item dengan nilai total penjumlahan keseluruhan item yang diolah menggunakan program SPSS, dimana dikatakan valid apabila memiliki nilai corrected item total correlation melebihi atau di atas dari 0,30.

Secara statistik angka korelasi yang diperoleh harus diuji terlebih dahulu untuk menyatakan apakah nilai korelasi yang dihasilkan signifikan atau tidak. Jika angka korelasi yang diperoleh di bawah atau kurang dari 0,30 maka pernyataan tersebut tidak valid atau tidak konsisten dengan pernyataan yang lain, sedangkan apabila di atas atau melebihi dari 0,30 berarti indikator yang digunakan sudah valid.

Untuk hasil lengkap dari uji validasi atas kapasitas SDM, Teknologi informasi, Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas laporan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Validasi

Item-Total Statistics				
Variabel	Correcte Item- Total Correlation	Nilai r Standar	Keterangan	Interpretas
X1.1	0,476	0,30	> 0,30	Valid
X1.2	0,469	0,30	> 0,30	Valid
X1.3	0,457	0,30	> 0,30	Valid
X1.4	0,413	0,30	> 0,30	Valid
X1.5	0,393	0,30	> 0,30	Valid
X1.6	0,490	0,30	> 0,30	Valid
X1.7	0,342	0,30	> 0,30	Valid
X1.8	0,423	0,30	> 0,30	Valid
X1.9	0,401	0,30	> 0,30	Valid
X1.10	0,430	0,30	> 0,30	Valid
X1.11	0,610	0,30	> 0,30	Valid
X2.1	0,430	0,30	> 0,30	Valid
X2.2	0,401	0,30	> 0,30	Valid
X2.3	0,492	0,30	> 0,30	Valid
X2.4	0,460	0,30	> 0,30	Valid
X2.5	0,449	0,30	> 0,30	Valid
X2.6	0,469	0,30	> 0,30	Valid
X2.7	0,346	0,30	> 0,30	Valid
X2.8	0,367	0,30	> 0,30	Valid
X2.9	0,390	0,30	> 0,30	Valid
X2.10	0,361	0,30	> 0,30	Valid
X2.11	0,473	0,30	> 0,30	Valid
X2.12	0,439	0,30	> 0,30	Valid
X2.13	0,476	0,30	> 0,30	Valid
X2.14	0,407	0,30	> 0,30	Valid
X3.1	0,382	0,30	> 0,30	Valid
X3.2	0,450	0,30	> 0,30	Valid
X3.3	0,454	0,30	> 0,30	Valid
X3.4	0,487	0,30	> 0,30	Valid
X3.5	0,405	0,30	> 0,30	Valid
X3.6	0,438	0,30	> 0,30	Valid
X3.7	0,431	0,30	> 0,30	Valid
X3.8	0,397	0,30	> 0,30	Valid
X3.9	0,529	0,30	> 0,30	Valid
X3.10	0,300	0,30	> 0,30	Valid
X3.11	0,381	0,30	> 0,30	Valid
X3.12	0,468	0,30	> 0,30	Valid
X3.13	0,352	0,30	> 0,30	Valid
X3.14	0,467	0,30	> 0,30	Valid
X3.15	0,370	0,30	> 0,30	Valid
X3.16	0,486	0,30	> 0,30	Valid
X3.17	0,394	0,30	> 0,30	Valid
X3.18	0,336	0,30	> 0,30	Valid
X3.19	0,328	0,30	> 0,30	Valid
X3.20	0,483	0,30	> 0,30	Valid
X3.21	0,462	0,30	> 0,30	Valid
X3.22	0,341	0,30	> 0,30	Valid
X3.23	0,339	0,30	> 0,30	Valid
X3.24	0,342	0,30	> 0,30	Valid
X3.25	0,336	0,30	> 0,30	Valid
X3.26	0,438	0,30	> 0,30	Valid
Y1	0,471	0,30	> 0,30	Valid
Y2	0,465	0,30	> 0,30	Valid
Y3	0,459	0,30	> 0,30	Valid
Y4	0,420	0,30	> 0,30	Valid
Y5	0,498	0,30	> 0,30	Valid
Y6	0,495	0,30	> 0,30	Valid
Y7	0,358	0,30	> 0,30	Valid
Y8	0,352	0,30	> 0,30	Valid
Y9	0,358	0,30	> 0,30	Valid
Y10	0,364	0,30	> 0,30	Valid
Y11	0,404	0,30	> 0,30	Valid
Y12	0,377	0,30	> 0,30	Valid
Y13	0,480	0,30	> 0,30	Valid
Y14	0,354	0,30	> 0,30	Valid

Dari tabel uji validasi diatas, tergambarakan variabel kapasitas SDM, Teknologi informasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan memiliki nilai corrected item total correlation yang lebih besar dibandingkan dengan r standar. Sehingga dapat disimpulkan bahwan semua indikator atau koesioner yang digunakan pada setiap variabel valid.

b. Uji Realibilitas

Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui apakah indikator atau kuesioner yang digunakan dapat dipercaya atau handal sebagai alat ukur variabel. Realibilitas suatu indikator atau kuesioner dapat dilihat dari nilai cronbach's alpha (α), dimana menurut Sugiono (2016) bahwa suatu konstruk atau indikator dikatakan realibel yaitu apabila nilai cronbach's alpha (α) lebih besar ($>$) 0,60 maka indikator atau kuesioner adalah realible, sedangkan apabila nilai cronbach's alpha (α) lebih kecil ($<$) 0,60 maka indikator atau kuesioner tidak realible. Secara keseluruhan uji realibilitas dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Realibilitas

Variabel	Cronbachs Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	Standar Realibilitas	Keterangan
Kapasitas SDM (X1)	0,800	0,778	0,60	Realiable
Teknologi informasi (X2)	0,779	0,759	0,60	Realiable
SAP (X3)	0,784	0,605	0,60	Realiable
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,703	0,669	0,60	Realiable

Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

Nilai cronbach's alpha semua variabel yang ditunjukkan tabel diatas, yaitu kapasitas SDM, Teknologi informasi, Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas laporan keuangan lebih besar dari nilai standar realibilitas yaitu lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator atau koesioner semua variabel handal atau dapat digunakan sebagai alat ukur.

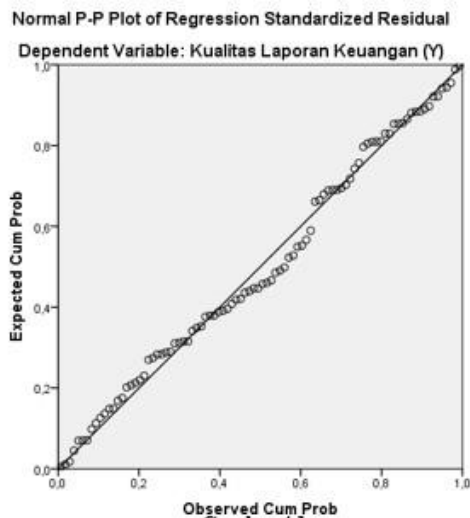
4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan sebagai syarat dalam menggunakan model regresi agar hasil regresi yang diperoleh merupakan estimasi yang tepat.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan distribusi pada grafik

P- P plot. Berikut ini hasil uji normalitas menggunakan grafik P-P Plot menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 26:



Gambar 4.1

Grafik P-P Plot

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal pada grafik histogram, hal ini menunjukkan bahwa pola distribusi normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan grafik P-P plot, model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas berguna untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Cara mengetahui ada tidaknya penyimpangan uji multikolinieritas adalah dengan melihat nilai Tolerance dan VIF masing-masing variabel independen, jika nilai Tolerance > 0.10 dan nilai VIF <10, maka data bebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel 4.10

Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	35,061	9,958		23,521	,001		
	Kapasitas SDM (X1)	,060	,112	,056	4,538	,012	,883	1,133
	Teknologi informasi (X2)	,234	,101	,240	2,319	,023	,909	1,100
	Implementasi SA (X3)	,029	,075	,041	5,386	,001	,817	1,224

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Melihat hasil pada tabel 4.10, hasil perhitungan nilai Tolerance tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0.10 dengan nilai Tolerance masing-masing variabel independen Kapasitas SDM bernilai sebesar 0.883, Teknologi informasi sebesar 0.909, dan Implementasi SA sebesar 0.817. Sementara itu hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal serupa yaitu tidak adanya nilai VIF dari variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 dengan nilai VIF masing-masing variabel independen bernilai Kapasitas SDM sebesar 1.133, Teknologi informasi sebesar 1.100, dan Implementasi SA sebesar 1.224. Merujuk hasil perhitungan nilai Tolerance dan VIF dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di antara angka 0 pada sumbu Y.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi linear ada atau tidak korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ atau periode sebelumnya. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. Berikut hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.11
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,750 ^a	,562	,030	3,137	2,209

a. Predictors: (Constant), Implementasi SA (X3), Teknologi informasi (X2), Kapasitas SDM (X1)

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas nilai Durbin Watson sebesar 2.209, pembandingan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 92 (n), dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka di tabel Durbin Watson akan didapat nilai du sebesar 1.72. Karena nilai DW 2.209 lebih besar dari batas atas (du) 1.72 dan kurang dari 4 – 1.59 (2.41), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

e. Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh kapasitas SDM, Teknologi informasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada kabupaten Majene, dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis dilakukan berdasarkan nilai dari standardized coefficients hasil regresi antara kapasitas SDM, Teknologi informasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.

Untuk lebih jelas akan disajikan hasil olahan data dengan menggunakan program statistical package for the social sciences (SPSS) antara kapasitas SDM, Teknologi informasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.12
 Hasil Olahan Data Regresi

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	
	B	Std. Error				
1						
	(Constant)	35.061		23.521	.001	
	Kapasitas SDM (X1)	.060	.112	.056	4.538	.012
	Teknologi informasi (X2)	.234	.101	.240	2.319	.023
	Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)	.029	.075	.041	5.388	.001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)
 Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

Dari hasil olahan diatas, maka dimasukkan data pada rumus regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 35.061 + 0.060X_1 + 0.234X_2 + 0.029X_3$$

- 1) Konstanta (a) sebesar 35,061 artinya jika semua variabel bebas yaitu kapasitas SDM, Teknologi informasi, Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai 0, maka kualitas laporan keuangan (Y) memiliki nilai sebesar 35,061.
- 2) Koefisien regresi (b1) untuk variabel kapasitas SDM (X1) sebesar 0,060; artinya jika kapasitas SDM mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,060. Koefisien bernilai positif antara kapasitas SDM dan kualitas laporan keuangan.
- 3) Koefisien regresi (b2) untuk variabel Teknologi informasi (X2) sebesar 0,234; artinya jika Teknologi informasi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan (Y) akan naik sebesar 0,234. Koefisien bernilai positif antara Teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan.
- 4) Koefisien regresi (b3) untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) sebesar 0,029, artinya jika Standar Akuntansi Pemerintahan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan (Y) akan naik sebesar 0,228. Koefisien bernilai positif antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara kapasitas SDM, Teknologi informasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan

terhadap kualitas laporan keuangan pada kabupaten Majene dapat dilihat dari tabel berikut:

Table 4.13
Nilai Koefisien Determenasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750 ^a	.562	.030	3.137

a. Predictors: (Constant), Standar Akuntansi Pemerintahan (X3), Teknologi informasi(X2), Kapasitas SDM (X1)

b. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan

Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

Berdasarkan hasil analisis kolerasi yang dikutip pada table diatas, maka dapat dikatakan bahwa kolerasi atau hubungan antara variable kapasitas SDM, Teknologi informasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai hubungan yang cukup tinggi terhadap kualitas laporan keuangan, karena diperoleh nilai koefisien kolerasi (r) sebesar 0,562.

Dari tabel koefisien determinasi di atas, diketahui Adjusted R square adalah 0,562 atau 56%. Hal ini berarti sumbangan pengaruh dari variabel independen yaitu kapasitas SDM, Teknologi informasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten Majene adalah 56% sedangkan sisanya 44% dipengaruhi oleh variable-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

f. Pengujian Hipotesis

Pembuktian hipotesis yang di sajikan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji parsial (t) dan uji simultan (F) yang diuraikan sebagai berikut:

a. Uji Parsial (t)

Analisis uji parsial (t) dilakukan untuk membuktikan pengaruh signifikan antara variable independen (kapasitas SDM, Teknologi informasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan) terhadap variable dependen (kualitas laporan keuangan). Dengan melakukan perbandingan antara nilai t hitung (thitung) dan t tabel (ttabel). Penunjukan diterimahnya hipotesis jika t hitung lebih besar dari t table (thitung > ttabel), t table (ttabel) diperoleh dari

banyaknya observasi dikurang banyaknya variable yang digunakan ($n - k - 1$), yaitu $92 - 4 - 1 = 87$, maka diketahui t table adalah 1,66256 (1,662). Dimana derajat signifikan yang digunakan adalah lebih kecil $\alpha = 0,05$, artinya nilai signifikan harus lebih kecil dari derajat kepercayaan (α) atau probabilitas. Untuk hasil yang dikelola, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.14 Uji t coefficient

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	35.061	9.958	.	23.521		.001	
Kapasitas SDM	.060	.112	.056	4.538	1,662	.012	Hipotesa diterima
Teknologi informasi	.234	.101	.240	2.319	1,662	.023	Hipotesa diterima
SAP	.029	.075	.041	5.386	1,662	.001	Hipotesa diterima

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Kapasitas SDM (X1)

Terlihat pada tabel coefficient tersebut bahwa derajat signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan atau probabilitas ($\text{sig.} < \alpha$) = $0,012 < 0,05$ maka hipotesis 1 diterima. Dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$) = $4,538 > 1,662$. Terlihat bahwa variabel X1 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Teknologi informasi (X2)

Terlihat pada tabel coefficient tersebut bahwa derajat signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan atau probabilitas ($\text{sig.} < \alpha$) = $0,023 < 0,05$ maka hipotesis 2 diterima. Dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$) = $2,319 > 1,661$. Terlihat bahwa variabel X2 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan (X3)

Terlihat pada tabel coefficient tersebut bahwa derajat signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan atau probabilitas ($\text{sig}, < \alpha$) = $0,001 < 0,05$ maka hipotesis 3 diterima. Dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$) = $5,386 > 1,662$. Terlihat bahwa variabel X3 memiliki kontribusi terhadap Y, Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X3 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, Dalam penelitian ini variabel independen terdiri dari kapasitas SDM (X1), Teknologi informasi (X2), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3), sedangkan variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan (Y). Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau tidak, maka F hitung harus lebih besar dari F tabel ($F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$) melalui $\text{sig}, \alpha = 0,05$. Untuk mengetahui nilai F tabel (F_{tabel}) dilakukan dengan melihat tabel titik persentase distribusi F dengan probabilitas 0,05 dimana df_1 adalah $k - 1$ ($4 - 1$) = 3 dan df_2 adalah $n - k$ ($92 - 4$) = 88 sehingga diperoleh F tabel (F_{tabel}) = 2,71.

Hasil uji F antara kapasitas SDM (X1), Teknologi informasi (X2), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (X3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) dapat dilihat tabel anova hasil perhitungan dari SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.15 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	57.600	3	19.200	31.951	.032 ^b
	Residual	865.835	88	9.839		
	Total	923.435	91			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

b. Predictors: (Constant), Standar Akuntansi Pemerintahan (X3), Teknologi informasi (X2), Kapasitas SDM (X1)

Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

Untuk membuktikan Hipotesis penelitian yang telah diketahui sebelumnya dapat dilihat berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 31,951 dengan F tabel ditentukan sebesar 2,71. Maka dapat

lihat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel ($F_{hitung} > F_{tabel}$) = 31,951 > 2,90. Dengan demikian hipotesis 5 penelitian diterima, artinya kapasitas SDM, Teknologi informasi, dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten Majene.

Sementara itu berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa nilai probabilitas (Sig.) yang dihasilkan sebesar 0,032. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05) diperoleh nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa dalam penelitian ini variabel kapasitas SDM, Teknologi informasi, dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, atau dapat dikatakan bahwa berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, diterima.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini membahas tentang sejauh mana pengaruh kapasitas SDM, Teknologi informasi, dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada kabupaten Majene. Jenis penelitian ini adalah asosiatif, dimana dalam penelitian ini mencoba untuk menerawang hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis dalam penelitian ini, melihat hubungan kapasitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan, hubungan Teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, hubungan

Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, dan hubungan ketiga variabel independen yaitu kapasitas SDM, Teknologi informasi, dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara bersamaan terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini mengambil sampel sebagai responden sebanyak 92 orang untuk menjadi alat ukur dengan berbagai karakteristik. Berdasarkan karakteristik tingkatan umur diketahui jumlah responden yang memiliki tingkatan umur antara 31 sampai 45 tahun sebanyak 45 orang dengan persentase 49%. Usia yang dianggap produktif karena mampu menyerap

dan menerima hal yang baru serta memiliki semangat yang tinggi. Selanjutnya pada karakteristik tingkat pendidikan, pada tingkat strata satu (S1) memiliki angka yang lebih banyak yaitu 68 orang dengan persentase 74%. Tingkat pendidikan yang tinggi dianggap lebih produktif dalam melaksanakan dan memahami pekerjaannya. Karakteristik pada jenis kelamin jumlah laki-laki jauh lebih banyak yaitu sebesar 64 orang dengan persentase 70%. Umumnya laki-laki lebih produktif dibandingkan perempuan. Hal ini dikarenakan faktor fisik laki-laki jauh lebih besar dari pada perempuan, terutama bidang pekerjaan yang lebih menguras tenaga.

Pada analisis masalah selanjutnya dalam penelitian ini, mencoba mengetahui seberapa besar variabel kapasitas SDM, Teknologi informasi, dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh pada variabel kualitas laporan keuangan pada kabupaten Majene. Untuk menguji penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda, uji F atau uji simultan dan uji t atau uji parsial. Secara umum hasil penelitian ini memuaskan. Segala hipotesis yang digambarkan diterima berdasarkan analisis hasil jawaban responden pada kabupaten Majene yang terkelola.

1. Kapasitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil analisis persamaan regresi maka diperoleh hasil bahwa kapasitas SDM memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kabupaten Majene. Dapat dikatakan bahwa indikator yang membentuk kapasitas SDM telah menjadi bukti empirik sebagai syarat peningkatkan kualitas audit.

Hasil dari penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Irwan (2011) dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Populasi penelitian ini yaitu 36 SKPD pada Sumatera Barat dan tiap SKPD diwakili oleh 1 orang yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai responden. Pengumpulan data dengan kuesioner dengan alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kompetensi SDM berpengaruh terhadap

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah dipengaruhi oleh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi SDM serta 3) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi SDM dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Teknologi informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil pengelolaan data regresi diperoleh hasil bahwa Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kabupaten Majene. Dapat dikatakan bahwa indikator yang membentuk pemanfaatan TI telah menjadi bukti empirik sebagai syarat peningkatan kualitas audit.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadila Ariesta (2013) meneliti tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Pasaman Barat). Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Pasaman Barat yang berjumlah 38 SKPD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. Metode pengumpulan data adalah dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi berganda dengan uji t. Hasil dari penelitian ini adalah pada pengujian pertama didapatkan hasil bahwa kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan. Pada pengujian kedua didapatkan hasil bahwa kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada kabupaten majene memiliki hasil berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini berdasarkan hasil yang ditunjukkan melalui analisis persamaan

regresi. Artinya bahwa makin besar Standar Akuntansi Pemerintahan, maka makin besar pula peningkatan kualitas laporan keuangan yang dapat terjadi. Dapat dikatakan bahwa sikap pegawai dalam memanfaatkan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi indikator Standar Akuntansi Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armando (2013) tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada SKPD di Bukit Tinggi). Teknik analisis data menggunakan analisis jalur dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel eksogen dan pengawasan keuangan daerah sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah Bukit Tinggi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, Hal ini disebabkan karena sub bagian Akuntansi pada setiap OPD memiliki latar belakang Pendidikan Akuntansi , Tugas Pokok dan fungsi ditetapkan dengan jelas pada bidang akuntansi dan sub bagian Keuangan selalu diikuti sertakan dalam kegiatan Diklat Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan ;
- b. Bahwa Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene. Hal tersebut disebabkan karena setiap OPD pada sub Bagian Akuntansi/Keuangan telah memiliki Komputer dan Jaringan Internet dimana Proses Akuntansi dan pelaporan telah dilakukan secara

Komputerisasi sehingga sistem informasi dapat terintegrasi dengan cepat, muda dan akurat dalam mengelolah Laporan keuangan .

- c. Bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene hal ini disebabkan karena dalam penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh setiap OPD telah mengacu dan berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimana dalam SAP tersebut telah disajikan seluruh Prinsip – Prinsip yang terkait dengan Akuntansi.

2. Saran

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

- a. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel penelitian lainnya diluar penelitian ini seperti komitmen organisasi, kerjasama tim, budaya kerja dan lain-lain untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene.
- b. Peneliti selanjutnya dapat lebih maksimal dalam memperoleh data melalui kuesioner dan dengan mencari waktu yang tepat bagi responden untuk mengisi kuesioner melalui wawancara langsung, memberikan pemahaman kepada responden yang kurang paham terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan sehingga pengisian kuesioner lebih jelas dan terhindar dari biasanya jawaban responden.
- c. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah responden dari para pengguna laporan keuangan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene sebagai pihak legislatif, sehingga didapatkan hasil persepsi tentang penilaian kualitas laporan keuangan dari segala sudut pandang yang berbeda agar dapat diketahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Majene.

REFERENSI

- Ariesta, F. (2013) . Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD di Kabupaten Pasaman Barat).Diakses dari Situs Web
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/52/40>
- Choirunisah, F. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang Tahun 2008) (Tesis). Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Fikri, M.A., Inapty, B.A. dan Martiningsih, RR.S.P. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada OPD-OPD di Pemprov. NTB), Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVIII. Medan.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi (Edisi Ketujuh).Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriasari, D. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Diakses dari <https://smartaccounting.files.wordpress.com/2011/03>
- Irwan, D. (2011). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Tesis). Universitas Negeri Padang, Padang.
- Karmila, Tanjung, A.R. dan Darlis, E. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi , dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah,

- Jurnal Sorot Vol. 9, No. 1. Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.
- Kementerian Dalam Negeri. (2006), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- . (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- . (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- , Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 46A Tahun 2003 tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.
- Mahaputra, I.P.U.R. dan Putra, I.W. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Gianyar), Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No.2, Agustus 2014. Universitas Udayana, Bali.
- Mahmudi. (2007). Analisis Laporan Keuangan Daerah : Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Modo, S.M., Saerang, D.P.E. dan Popuptra, A.T. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud), Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Vol 7, No 2 (2016): Goodwill Vol. 7 No. 2 Desember 2016
- Nordiawan, D. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Nuryanto, M. dan Afiah, N.N. (2013). The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province Indonesia). World Review of Business Research, vol. 3. No. 4. 157–171
- , Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah.

- , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- , Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Sagara, Y. (2015). The Effect of Implementation Accounting Information System and Competence of Human Resources on the Quality of Financial Reporting, *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 6, No. 10. Universitas Padjajaran, Bandung.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Tanjung, A.H. (2009). *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk OPD*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wansyah, H., Darwanis dan Bakar, U. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan OPD Pada Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi* Vol.1 No.1, Agustus 2012. Diakses dari <http://prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmia/index.php>
- Wilkinson, J.W., Cerullo, M.J., Raval, V. and Wong-On-Wing, B. (2000). *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. (4th Edition). United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd.
- Windrastuti, I., Adisasmita, H.R. dan Damayanti, R.A. (2013). Pengaruh Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Diakses dari Situs Web <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files>
- Winidyaningrum, C. dan Rahmawati. (2010) . Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan

Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). SNA XIII. Purwokerto.

Yuliani, S. dkk. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol. 3. No. 2.

CHAPTER 3

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Sampurisiah¹

Firman Menne²

Haeruddin Saleh³

^{1,2,3}Program Studi Magister Manajemen, Universitas Bosowa

Email: sampurisiah.mn@gmail.com

Abstrak: Akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tujuan penting dalam tata kelola pemerintah yang bersih (good governance) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan efektifitas pengelolaan aset sebagai variabel moderasi pada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi sebanyak 151 orang yang semuanya dijadikan responden. Data diperoleh menggunakan metode survei, dan instrumen penelitian berbentuk kuesioner. Responden tersebut merupakan penyusun laporan keuangan, bendahara pengeluaran dan pengurus barang pada 47 SKPD, serta staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta Bidang Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Untuk menguji hipotesis digunakan Structural Equation Modelling (SEM) berbasis Warp Partial Least Square (WarpPLS). Data diolah dengan program WarpPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian variabel efektifitas pengelolaan aset mampu memperkuat pengaruh variabel independen tersebut terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, efektifitas pengelolaan aset daerah, kualitas informasi laporan keuangan.

A. PENDAHULUAN

Reformasi keuangan negara menghasilkan desentralisasi dan otonomi daerah yang membawa konsekuensi perubahan yang sangat penting, terutama mengenai fungsi dan kewenangan pemerintah daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, desentralisasi memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan di daerah masing-masing secara lebih intensif.

Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sendiri daerahnya, maka dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Pemerintah daerah harus berkreasi dan lebih inovatif dalam menciptakan terobosan-terobosan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan bagi masyarakat. Disisi lain, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengelola dana publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tujuan penting dalam tata kelola pemerintah yang bersih (*good governance*).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Artinya, boleh dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu acuan yang dapat digunakan untuk mengukur *good governance* sesuai dengan pernyataan Sadjarto (2000), yang mengatakan laporan keuangan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan *good governance* dan pernyataan Wiratraman (2008) yang menyatakan bahwa melalui laporan keuangan maka unsur akuntabilitas dalam mencapai *good governance* dapat terpenuhi.

Menurut PSAP No.1 tentang penyajian laporan keuangan, yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah merupakan laporan yang

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk itu, laporan keuangan yang dibuat hendaknya harus berkualitas dan mudah dipahami sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Kualitas laporan keuangan menjadi tuntutan publik akan pengelolaan pemerintahan yang baik sehingga memerlukan adanya pengembangan paradigma serta prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah. Jika informasi yang terkandung pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah memenuhi syarat-syarat tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah, berarti pemerintah daerah telah mampu untuk mewujudkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu indikator dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, ini berarti bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tersebut sudah diungkapkan dan disajikan secara wajar dan berkualitas. Akan tetapi faktanya, beberapa laporan keuangan pemerintah daerah masih bermasalah dalam penyajiannya.

Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar mengindikasikan bahwa perlu adanya perbaikan secara berkesinambungan, karena baru pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016 s.d. 2018 laporan keuangan Kabupaten Polewali Mandar memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), walaupun tetap saja masih ada permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah seperti masalah pengelolaan aset tetap dan adanya kelemahan sistem

pengendalian intern serta ketidakpatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Berikut gambaran opini BPK dan temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 5 (lima) tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Opini dan Temuan Pemeriksaan BPK R.I. Perwakilan Sulawesi Barat atas LKPD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar periode 2014 s.d. 2018

No.	Tahun	Opini	Temuan terkait Pengelolaan Aset
1	2014	WDP	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan aset tetap barang milik daerah belum memadai - Penyajian saldo aset tetap dan akumulasi penyusutan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
2	2015	WDP	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat aset tanah di bawah jalan atas 375 ruas jalan pada Dinas Pekerjaan Umum belum dilakukan penilaian - Terdapat aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor senilai Rp. 10,93 milyar yang diragukan kewajaran nilainya dan terdapat aset kendaraan dinas pada sekretariat daerah sebesar Rp. 27,92 milyar yang diragukan kebenarannya. - Aset tetap berupa gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset baru dari pekerjaan peningkatan/rehabilitasi/renovasi, serta dari perencanaan serta retensi 5%.
3	2016	WTP	<ul style="list-style-type: none"> - Penganggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 senilai Rp.10.015.309.090,00 tidak tepat. - Penatausahaan aset tetap belum dilaksanakan secara tertib

4	2017	WTP	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 senilai Rp. 17.263.372.944,17 yang berpengaruh pada nilai aset tetap - Masih Adanya Kelemahan dalam Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
5	2018	WTP	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Ketidaktepatan terhadap peraturan perundang-undangan - Adanya Aset tetap tanah yang belum dinilai secara wajar pada 12 Ruas Jalan dan 3 pasar Kecamatan

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat atas LKPD Pemerintah Kabupaten Polewali Barat

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, permasalahan yang sering muncul dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah penyajian aset tetap yang tidak diyakini kewajarannya dan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta adanya kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Hal-hal seperti ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Rendahnya kualitas LKPD dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian mengenai pentingnya kompetensi SDM dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh banyak peneliti dengan hasil yang bervariasi. Roviyanthi (2011), Sukmaningrum (2011), Nurillah (2014), Mahaputra (2014), Afiah (2014) membuktikan secara empiris bahwa SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas, dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi keuangan Pemerintahan Daerah (Nurillah, 2014 : 10). Seorang dikatakan

mempunyai kompetensi ketika orang tersebut memiliki keterampilan dalam mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang membuat kesalahan. Peningkatan kapabilitas kerja dilakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan aspek-aspek yang melatarbelakangi unsur tersebut yakni peningkatan keterampilan kerja individu dan pengetahuan yang dilakukan dengan cara membina sikap mental individu serta situasi atau lingkungan yang mendorong timbulnya kepuasan dan kemauan kerja individu.

Kompetensi pegawai yang menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Polewali Mandar belum memadai. Salah satu indikatornya adalah latar belakang pendidikan pegawai yang bertanggung jawab menyusun laporan keuangan SKPD. Dari 47 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, hanya 11 orang atau 23 persen dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan 36 orang dengan latar belakang pendidikan non akuntansi atau 77 persen.

Rendahnya kompetensi dan pengembangan kualitas SDM dianggap sebagai pemicu produktivitas kerja individu maupun organisasi menurun. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh George Edward III (1980 : 53) yang menyatakan bahwa faktor sumber daya memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Lebih lanjut pentingnya SDM dalam pengelolaan aset didukung oleh hasil penelitian Yunita (2016), Syahrani (2015), Erimalata (2016), Arlini (2014), Simamora (2013), dan Hanis (2012).

Hasil penelitian Evicahyani (2015 : 8) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan. Akan tetapi dalam penelitian lainnya yang dilakukan Komarasari (2017 : 9) yang menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, peneliti menganggap variabel ini perlu dilakukan penelitian kembali untuk menguji kembali apakah kompetensi sumber daya manusia ini mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, disamping dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, diperlukan pula suatu sistem informasi yang dapat membantu pemerintah daerah dan tentunya dengan dukungan pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan kebutuhan bagi suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatannya. Kelangsungan hidup organisasi sangatlah sulit tanpa penggunaan teknologi informasi. Manajemen organisasi sektor publik harus tanggap pada perubahan lingkungan jika ingin organisasinya tetap dapat berjalan serta adanya peningkatan kinerja. Manajemen organisasi juga harus peka terhadap perkembangan teknologi informasi yang mencakup peralatan teknik serta proses dalam mengubah suatu masukan menjadi keluaran sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, manajemen dalam organisasi harus memahami dengan baik bagaimana teknologi informasi ini bekerja dalam menyediakan informasi dalam organisasi. Perubahan lingkungan ini menuntun manajemen aset sebagai suatu sistem informasi untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami dan teruji dalam rangka pengambilan keputusan manajemen.

Tidak sedikit teknologi informasi yang mengalami kegagalan dalam penerapannya, salah satu penyebabnya adalah pengguna yang tidak mempunyai niat atau keinginan untuk menggunakannya dengan alasan mengalami kesulitan dalam mengaplikasikannya, dan biasanya pengguna telah terbiasa dan nyaman dengan sebuah aplikasi atau metode kerja yang sebatas semi manual, atau dapat dikatakan bahwa mereka berupaya mempertahankan kebiasaan lama dan sulit beralih dan merubah mindset pada hal yang baru. Kondisi tersebut dapat dikaji melalui teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang diprakarsai oleh Davis (1986), yang mana merupakan salah satu jenis teori dengan pendekatan perilaku yang digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi, yaitu menekankan pada kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan sebuah sistem informasi.

Keberadaan teknologi informasi tidak semata dipandang mampu mengurangi biaya operasional melalui otomatisasi pekerjaan atau kemampuan membantu pengambilan keputusan (Ellitan dan Anatan, 2015 : 149), melainkan Cordata (1996) memberikan pendapat bahwa terdapat tiga peran utama teknologi informasi, diantaranya: (1) mampu melakukan pengawasan secara langsung terhadap sebuah proses; (2) dapat menyimpan informasi penting dan berguna yang tersimpan dalam database dan dapat diakses setiap diperlukan; (3) memperpendek jalur komunikasi dan mempercepat sebuah proses demi meminimalisir siklus waktu, meningkatkan efisiensi dan pelayanan operasi. Dalam hal sistem informasi dalam kaitannya dengan pengelolaan aset, telah didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap pengelolaan aset (Yunita, 2016; Erimalata, 2016; Arlini, 2014; dan Azhar, 2013).

Pemanfaatan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, seperti yang dikemukakan oleh Komarasari (2017), dan Kurniawan (2016), yang dalam penelitiannya menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi pendapat berbeda dikemukakan oleh Seno (2013: 108), yang dalam penelitiannya menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peneliti juga menganggap variabel ini perlu dilakukan penelitian kembali untuk menguji kembali apakah pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lainnya yang sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan adalah pengelolaan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pengelolaan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan aset operasional pemerintah secara keseluruhan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aset tetap mempunyai sifat yang rentan terhadap penurunan kemampuan operasi sesuai dengan pemanfaatan atau penggunaannya. Sehingga seharusnya

pemerintah memberikan informasi mengenai nilai aset tetap yang dimilikinya secara wajar supaya dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan mengenai proses pengelolaan aset tetap, yang dimulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan aset tetap, penggunaan, pemanfaatan, pertukaran, pelepasan serta penghapusan.

Kelemahan dan kesalahan pencatatan, pembukuan serta pelaporan aset tetap akan berdampak langsung terhadap kewajaran laporan keuangan. Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah, pengakuan/penilaian dan penyajian serta pengungkapan aset tetap daerah menjadi fokus utama. Hal ini karena aset tetap daerah memiliki nilai yang sangat signifikan dan kompleks. Perbandingan nilai aset tetap terhadap total aset pada LKPD relatif sangat material. Oleh karena itu, aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah perlu dikelola secara efektif.

Tujuan dari pengelolaan aset tetap daerah adalah dalam rangka mengoptimalkan potensi pelayanan publik dari aset itu sendiri, meminimalisasi biaya dan resiko serta untuk meningkatkan nilai modal yang alami serta sosial dalam siklus hidup suatu aset. Untuk melakukan pengelolaan aktiva/aset daerah sangat dibutuhkan sebuah standar akuntansi sebagai wujud pedoman pertanggungjawaban keuangan pemerintah.

Efektifitas pengelolaan aset daerah adalah bagian dari kebijakan yang sangat penting dari pemerintah daerah karena di dalamnya terdapat tujuan yang strategis yang dapat diwujudkan dan dapat dijalankan dengan melakukan langkah-langkah : identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah; penerapan sistem informasi manajemen aset daerah; pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset; dan pelibatan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan penilai independen (Mardiasmo, 2004).

Oleh karena itu, dengan adanya pengelolaan aset daerah yang efektif dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, kemudian ditunjang dengan sumber daya manusia yang kompeten, maka diharapkan akan memberikan solusi yang tepat terhadap masalah-masalah

yang selama ini menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sebagaimana permasalahan yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dimana penyajian laporan keuangan pemerintah daerah masih terkendali oleh beberapa hal seperti yang disebutkan di atas. Bahkan untuk tahun 2015, Kabupaten Polewali Mandar merupakan satu-satunya kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat yang belum mendapat opini WTP tersebut.

Pemilihan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini adalah mengingat LKPD Kabupaten Polewali Mandar termasuk kabupaten yang belum pernah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sampai dengan tahun 2015, dengan masih adanya temuan-temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset dimana BPK-RI banyak memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan. Meskipun setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan perbaikan dalam hal tata kelola keuangan tetapi di beberapa sisi masih perlu ada perbaikan lagi. Pihak BPK-RI Perwakilan Sulawesi Barat tetap mendorong upaya-upaya perbaikan tata kelola keuangan supaya menjadi lebih baik lagi kedepannya. Langkah-langkah selanjutnya yang tak kalah penting dalam rangka memperbaiki tata kelola keuangan adalah dengan menindaklanjuti temuan pemeriksaan yang diberikan oleh BPK-RI dengan kinerja yang lebih baik serta memberikan penanganan yang optimal tentang kelemahan-kelemahan yang ada. Sinergitas antara pihak-pihak yang terkait diharapkan dapat bekerjasama untuk memperbaiki apa yang menjadi kelemahan dan faktor-faktor yang menentukan kualitas LKPD di Kabupaten Polewali Mandar.

Tidak banyak penelitian yang meneliti tentang pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap laporan keuangan dengan menggunakan pengelolaan aset daerah sebagai variabel moderasi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yunita (2016), meneliti tentang pengaruh sumber daya manusia dan sistem informasi terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah dan dampaknya terhadap laporan keuangan yang

dilakukan di Kota Palopo. Begitupun penelitian yang dilakukan Bangun (2015) yang meneliti tentang pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan dengan pengelolaan barang milik daerah sebagai variabel intervening. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti mencoba untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menempatkan variabel efektifitas pengelolaan aset daerah sebagai variabel moderasi, dimana hal ini tidak dilakukan dalam penelitian sebelumnya.

1. *Stewardship Theory*

Penelitian ini mendasarkan pada *stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991), yang memberikan gambaran tentang situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu semata tetapi lebih ditujukan kepada sasaran utama untuk kepentingan organisasi. Teori ini berasumsi bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan dengan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan tentang maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan *steward*. Maksimalisasi utilitas kedua kelompok ini akhirnya akan memaksimalkan kepentingan-kepentingan individu yang ada didalam kelompok organisasi tersebut.

Teori *stewardship* sering disebut sebagai teori pengelolaan, memandang manajemen sebagai *stewards* (pelayan/penerima amanah/pengelola) akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dipertimbangkan dapat menjelaskan hubungan antara variabel, dengan asumsi bahwa untuk melaksanakan amanah tersebut maka *stewards* (manajemen) akan mengalokasikan sumber daya dana serta strategi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik dan menyajikan pertanggungjawaban yang diperlukan dengan baik pula.

Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi yang tepat merupakan faktor penting guna mendukung *steward* dalam melaksanakan amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian dengan pelaksanaan pengelolaan aset daerah yang efektif akan membantu *steward* dalam pengelolaan keuangan dan penyajian laporan

keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diamanahkan oleh undang-undang.

Pada awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku *principals* sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan sangat jelas. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan negara, peran akuntansi sangat diperlukan. Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (*stewards/manajemen*) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara *principals* dengan *stewards* didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. *Stewardship theory* merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik.

Dampak dari teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah bisa menggambarkan adanya kemampuan pemerintah daerah sebagai suatu lembaga publik yang dapat dipercaya untuk bekerja sesuai dengan kepentingan masyarakat dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar, membuat pertanggungjawaban keuangan terhadap sumber daya yang diamanahkan kepadanya, sehingga dapat tercapai secara optimal mengenai tujuan ekonomi dan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut maka *stewards* harus mengerahkan semua kapabilitas serta keahlian yang dimilikinya dalam melaksanakan pengendalian intern untuk secara efektif supaya bisa memberikan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

Menurut Podrug (2011) beberapa pertimbangan penggunaan *stewardship theory* sehubungan dengan masalah penelitian ini :

- a. Manajemen sebagai *steward* (pelayan/penerima amanah/pengelola)
Stewardship theory berasumsi bahwa manajemen suatu organisasi berfungsi sebagai "*stewards*/penatalayanan", akan bertindak dengan bijaksana, penuh kesadaran dan arif bagi kepentingan organisasi. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini bertindak sebagai *stewards*, penerima amanah dengan memberikan kinerja yang maksimal bagi organisasi dan para *stakeholder*.
- b. Pendekatan *governance* menggunakan sosiologi dan psikologi
Teori *stewardship* menggunakan pendekatan *governance* atas dasar sosiologi dan psikologi yang telah dirancang untuk para peneliti dalam mengevaluasi situasi dimana manajemen sebagai *stewards* (pelayan) bisa termotivasi dalam bekerja sesuai dengan kemauan *principal* dan organisasi. Dampaknya pada penelitian ini adalah pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik bukan dilandasi untuk kepentingan ekonomi semata tetapi juga terdapat pertimbangan sosiologis maupun psikologis guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
Penelitian ini lebih mengarah ke pendekatan *governance* yaitu menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang berkualitas dengan mempertimbangkan faktor sosiologi dan psikologi. Pertimbangan faktor sosiologi dilakukan pada saat analisis variabel kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Pertimbangan faktor psikologi dilakukan pada analisis moderasi variabel pengelolaan aset daerah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
- c. Model manusia dalam berperilaku kolektif untuk kepentingan organisasi
Model of man pada *stewardship theory* didasarkan pada *steward* (pelayan) yang memiliki tindakan kolektif atau berkelompok, bekerja sama dengan utilitas tinggi dan selalu bersedia untuk melayani. Terdapat pilihan antara perilaku *self-serving* dan pro-organisasi. *Steward* akan

menggantikan atau mengalihkan *self-serving* dalam bertindak kooperatif. Walaupun kepentingan antara *steward* dan *principal* yang tidak sama, tetapi *steward* tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. *Steward* tetap berpedoman bahwa terdapat kepentingan yang lebih besar pada tindakan kooperatif dan tindakan tersebut dianggap tindakan rasional yang dapat diterima, contohnya dengan melakukan peningkatan kinerja dan efisiensi biaya.

d. Motivasi pemimpin sejalan dengan tujuan *principal*

Teori *stewardship* adalah teori yang memberikan gambaran tentang situasi dimana para pimpinan tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi sehingga *steward* (manajemen) bertindak sesuai keinginan *principal*.

Konteks penelitian ini adalah pengaruh pengelolaan aset daerah dalam hubungan antara sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai *stewards* yang lebih condong bersikap sesuai dengan persepsi teori pengelolaan (*stewardship theory*). Seorang yang berpikiran rasional yang tidak termotivasi oleh keinginan individualnya, akan tetapi lebih sebagai penerima amanah (penatalayanan) yang memiliki motif yang sama dengan *principal*.

e. Kepentingan manajer - *principal* adalah konvergensi

Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa kepentingan manajer dan *principal* adalah konvergensi artinya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu semata-mata untuk kepentingan organisasi. Jika kepentingan organisasi tercapai maka kepentingan individu juga terpenuhi. Penelitian ini menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi yang dimoderasi oleh pengelolaan aset daerah yang efektif, diasumsikan mempunyai tujuan yang sama dengan *principal* yaitu guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

- f. Struktur berupa fasilitasi dan pemberdayaan
Stewardship theory menggunakan struktur yang memberdayakan dan memfasilitasi. Penelitian ini menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dengan dimoderasi oleh pengelolaan aset daerah yang efektif. Penggunaan variabel tersebut, diharapkan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
- g. Sikap pemilik mempertimbangkan risiko
Teori *stewardship* cenderung mempertimbangkan risiko. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin dihadapi untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
- h. Hubungan *principal*-manajemen saling percaya
Teori *stewardship* dibangun atas asumsi mengenai sifat dari manusia yakni manusia pada hakekatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Filosofi tersebut terdapat dalam hubungan antara *principals* dan manajemen. Teori *stewardship* memandang manajemen sebagai institusi yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan *principals* maupun organisasi.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai suatu lembaga pemerintahan yang dijalankan secara berkualitas, transparan dan dapat diandalkan untuk bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban terhadap amanah yang diberikan kepadanya, sehingga tujuan pelayanan publik dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* (manajemen) mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model yang selanjutnya dalam penelitian ini disingkat menjadi TAM, merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned*

Action (TRA) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1980) dan dikembangkan oleh Davis (1993). Model TRA (*Theory of Reasoned Action*) merupakan teori tindakan yang beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Reaksi dan persepsi pengguna teknologi informasi (TI) akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah persepsi pengguna terhadap kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna teknologi, sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan TI menjadikan tindakan/perilaku orang tersebut sebagai tolok ukur dalam penerimaan sebuah teknologi. TAM beranggapan bahwa penerimaan seorang individu atas teknologi informasi yang berikan kepadanya akan dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu persepsi kebermanfaatan (*Perceived Usefulness*) dan persepsi kemudahan dalam penggunaannya (*Perceived Ease of Use*).

Menurut Davis (1993), persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kebermanfaatan akan mempengaruhi minat atau perilaku pengguna terhadap penggunaan teknologi. Dimana persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi informasi merupakan tingkatan dimana seseorang akan percaya bahwa penggunaan teknologi tersebut mudah untuk dipahami. Persepsi kemudahan penggunaan juga akan mempengaruhi persepsi manfaat yang merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan efektifitas dan produktifitas dari kegunaan dalam tugas secara menyeluruh untuk meningkatkan kinerja orang yang menggunakan sistem tersebut. Minat perilaku penggunaan teknologi informasi merupakan bentuk keyakinan seseorang dalam penggunaan teknologi informasi sehingga akan meningkatkan minat seseorang, yang pada akhirnya akan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan pekerjaan.

Tujuan utama TAM adalah untuk memberikan dasar penelusuran dari pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap dan tujuan

pengguna. TAM menyediakan suatu basis teoritis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi dalam suatu organisasi. TAM menjelaskan hubungan sebab akibat antara keyakinan (akan manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan penggunaannya) dan perilaku, tujuan/keperluan, dan penggunaan aktual dari pengguna/user suatu sistem informasi.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian yang telah dikemukakan terdahulu, maka tipe penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan pendekatan kausalitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel dengan melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Serta apakah efektifitas pengelolaan aset daerah dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, mengingat peneliti merupakan salah satu aparatur yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui apa yang mempengaruhi kualitas LKPD. Objek penelitian ini adalah kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, efektifitas pengelolaan aset daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Adapun rentang waktu yang direncanakan dalam melakukan penelitian ini yaitu kurang lebih 1 (satu) bulan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah 47 SKPD yang terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 28 Badan/Dinas/Kantor, 16 Kecamatan dan Bidang Pengelola Aset Daerah serta Bidang Akuntansi dan Pelaporan selaku PPKD Kabupaten Polewali Mandar yang berjumlah 10 orang. Oleh karena itu, total populasi yang akan diberikan kuesioner sebanyak 151 populasi. Seluruh populasi adalah sampel maka penelitian ini akan menggunakan metode survei.

4. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu:

a. Variabel terikat (*Dependen Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi pusat perhatian penelitian atau variabel yang dipengaruhi yang dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau dependen variabel adalah kualitas laporan keuangan (Y).

b. Variabel bebas (*Independen Variable*)

Variabel bebas atau independen variabel adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik itu secara positif atau negatif dan dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas atau independen variabel adalah:

- Kompetensi sumber daya manusia (X1);
- Pemanfaatan teknologi informasi (X2);

c. Variabel Moderasi (*Moderating Variable*)

Variabel moderating terbentuk karena adanya hubungan antara variabel Independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat). Variabel moderating adalah salah satu jenis variabel yang memiliki kemampuan dalam memperkuat atau bahkan memperlemah suatu hubungan secara langsung yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun variabel moderating dalam penelitian ini adalah efektifitas pengelolaan aset tetap (X3).

5. Instrumen Penelitian

Pengukuran yang digunakan untuk mengukur instrumen atas tanggapan responden adalah dengan menggunakan skala *Likert* dengan interval 1 (satu) sampai lima (lima) menyesuaikan pernyataan yang diajukan. Adapun interval jawaban dan skor yang diberikan untuk setiap item pernyataan, yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner (angket) yakni dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012). Pernyataan dalam kuesioner ini diambil dari beberapa penelitian sebelumnya. Instrumen penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang merupakan penggambaran variabel yang akan diteliti dan berfungsi sebagai pembuktian hipotesis.

6. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Kuesioner dibagikan langsung oleh peneliti di masing-masing SKPD. Kuesioner ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur dan ditujukan kepada masing-masing responden dengan maksud untuk memperoleh informasi tertulis yang berkaitan dengan pengaruh efektifitas pengelolaan aset daerah dalam hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

7. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode survei yaitu melalui kuesioner yang diberikan kepada responden di SKPD. Kuesioner berisikan sejumlah pertanyaan dan pernyataan yang telah disusun secara terstruktur, disampaikan kepada responden untuk ditanggapi sesuai dengan kondisi yang dialami oleh responden yang bersangkutan. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan model pernyataan tertutup. Bentuk tertutup yakni pernyataan yang sudah disertai alternatif jawaban

sebelumnya, sehingga responden dapat memilih salah satu dari alternatif jawaban tersebut.

Pada masing-masing SKPD akan diberikan 3 (tiga) kuesioner yang akan diisi oleh:

- a. Pengurus Barang SKPD yang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.
- b. Penyusun laporan keuangan SKPD yang bertugas membuat laporan keuangan SKPD.
- c. Bendahara Pengeluaran SKPD yang bertugas menatausahakan belanja SKPD.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data serta uji statistik yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian, yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan efektifitas pengelolaan aset daerah serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis yang dilakukan adalah deskripsi nilai minimum (Min), maximum (Max), rata-rata dan standar deviasi (SD) dari setiap variabel.

b. Analisis Persamaan Struktural

Untuk menganalisis hasil penelitian ini, maka digunakan analisis persamaan struktural atau *structural equation model* (SEM) dengan alternatif *warpPLS*. *Structural equation model* atau SEM adalah suatu teknik statistika yang memungkinkan dilakukan pengujian suatu rangkaian hubungan yang relatif kompleks secara berjenjang dan simultan. Hubungan yang kompleks dapat terbentuk antara satu atau beberapa variabel independen. Dalam SEM, kemungkinan suatu variabel laten atau variabel konstruk yang dibentuk oleh beberapa indikator dan kemungkinan terdapat suatu variabel yang berfungsi ganda yaitu bisa sebagai variabel independen pada suatu hubungan, namun bisa menjadi variabel dependen pada hubungan yang

lain mengingat terdapatnya hubungan kausalitas yang simultan dan berjenjang.

Structural equation model (SEM) ini biasanya melibatkan software AMOS dan LISREL dalam pengolahan datanya. Kedua *software* itu mengharuskan beberapa persyaratan dan asumsi tertentu yang harus dipenuhi agar data bisa dianalisis diolah. Dilihat dari fleksibilitasnya, beberapa data tertentu tidak dapat dioperasikan dengan AMOS dan LISREL, misalnya data harus berdistribusi normal, baik secara *univariat* maupun *multivariat*. Demikian juga skala ukuran data harus seragam, misalnya dalam penggunaan AMOS dan LISREL mensyaratkan data harus dalam skala interval atau rasio, dan jumlah sampel harus pada jumlah yang cukup besar. Untuk menanggulangi permasalahan diatas diperkenalkan metode yang bernama PLS.

WarpPLS merupakan metode analisis yang *powerful* karena tidak mengasumsikan data harus dalam skala pengukuran tertentu karena berbasis *statistic nonparametric* dan juga dapat digunakan untuk jumlah sampel relatif kecil (minimal direkomendasikan berkisar dari 30 sampai 100). Pendekatan PLS berdistribusi bebas, yakni tidak mengasumsikan data harus berdistribusi tertentu, misalnya harus berdistribusi normal. Data yang akan diolah dapat berupa data nominal, ordinal, interval dan rasio.

Untuk tujuan prediksi, pendekatan *warpPLS* lebih cocok karena pendekatan ini mengasumsikan bahwa semua ukuran varian adalah berguna untuk dijelaskan. Oleh karena pendekatan untuk mengestimasi variabel laten dianggap sebagai kombinasi linier dari indikator, maka menghindarkan masalah *indeterminacy* dan memberikan definisi yang pasti dari komponen skor (Ghozali, 2011).

Pengukuran *inner model* dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun *robust* dan akurat (Hussein, 2015). Model struktural (*inner model*) dalam PLS dievaluasi dengan *predictive-relevance* (Q²) yang merupakan uji *Goodness of Fit Model*, serta nilai koefisien *path* atau *t-values* tiap *path* untuk uji signifikansi antar-konstruk dalam model

struktural (pengujian hipotesis). Pengujian *Goodness of Fit* menggunakan nilai *predictive-relevance* (Q^2) yang diperoleh dengan rumus:

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2)(1 - R_3^2) \dots (1 - R_p^2)$$

dimana $R_1^2, R_2^2 \dots R_p^2$ adalah *R-Square* variabel endogen dalam model. Interpretasi Q^2 sama dengan koefisien determinasi total (R^2) pada analisis jalur. Nilai *R-square* (R^2) digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai *R-square* (R^2) berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan (Abdillah dan Jogiyanto, 2015:197). Untuk pengujian hipotesis (tingkat signifikansi) ditunjukkan oleh nilai koefisien *path* atau *inner model*. Skor koefisien *path* atau *inner model* yang ditunjukkan oleh nilai T-statistik, harus di atas 1,96 untuk hipotesis dua ekor (*two-tailed*) dan di atas 1,64 untuk hipotesis satu ekor (*one-tailed*), untuk pengujian hipotesis pada *alpha* 5%.

9. Validitas dan Reliabilitas Data

a. Uji validitas

Validitas terdiri atas validitas eksternal dan internal. Validitas eksternal menunjukkan bahwa hasil dari suatu penelitian adalah valid yang dapat digeneralisir ke semua objek, situasi, dan waktu yang berbeda. Sementara validitas internal menunjukkan kemampuan dari instrumen penelitian untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dari suatu konsep (Abdillah dan Jogiyanto, 2015). Validitas ini terdiri atas validitas kualitatif dan validitas konstruk. Penelitian ini dilakukan validitas konstruk yang menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukuran untuk mendefinisikan suatu konstruk. Uji validitas konstruk dalam penelitian ini dilakukan melalui uji validitas konvergen. Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi (Abdillah dan Jogiyanto, 2015:195). Uji validitas konvergen dalam PLS dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan loading factor (korelasi antara skor item dengan skor konstruk) dari indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut. Rule of thumb

yang digunakan untuk uji validitas konvergen adalah outer loading > 0.5 (Chin, 1998 dan Hair, et.al., 2009:679).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran/indeks yang menunjukkan bahwa sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam penelitian mempunyai keandalan sebagai alat ukur atau dapat dipercaya. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal apabila jawaban responden konsistensi dari waktu ke waktu atau suatu alat ukur yang digunakan dua kali atau lebih untuk mengukur gejala yang sama dan pengukuran yang diperoleh relatif konsisten.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi internal alat ukur. Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu *Cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Untuk uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *composite reliability* karena dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. *Composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Rule of thumb nilai *composite reliability* harus di atas 0,7. Nilai *composite reliability* di atas 0,70 menunjukkan bahwa semua variabel laten/konstruk memenuhi kriteria reliabel yang tinggi.

c. Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Sugiyono (2014:99) berpendapat bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis regresi linier dengan menggunakan uji-f dan uji-t.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan memberikan secara langsung kuesioner kepada setiap responden pada objek penelitian di 47 (empat puluh tujuh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Kuesioner diambil kembali setelah diisi oleh responden. Terdapat 151 Kuesioner dibagikan kepada penyusun laporan keuangan, bendahara pengeluaran, pengurus barang dan staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta Bidang Pengelolaan Aset Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Total 145 memenuhi syarat untuk diolah, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang didistribusikan	151	100%
Kuesioner yang tidak kembali	6	3.97%
Kuesioner yang kembali	145	96.03%
Kuesioner yang dapat diolah	145	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Selanjutnya, tabel 4.2 berikut menyajikan karakteristik identitas responden penelitian (145 responden), meliputi nama unit kerja (SKPD), jabatan, pendidikan, pangkat/golongan dan lama bekerja.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Penelitian

No.	Jenis Karakteristik	Sub Karakteristik	Frekuensi	Persentase	
1	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	- Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	3	2,07	
		- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	2,07	
		- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	2,07	
		- Badan Pendapatan Daerah	3	2,07	
		- Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah	3	2,07	
		- Badan Keuangan Daerah			
		- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	2,07	
			3	2,07	
		- Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	3	2,07	

No.	Jenis Karakteristik	Sub Karakteristik	Frekuensi	Persentase
		- Dinas Pemuda Olahraga dan Kepariwisata	3	2,07
		- Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan	3	2,07
		- Dinas Kelautan dan Perikanan	3	2,07
		- Dinas Kesehatan	3	2,07
		- Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	3	2,07
		- Dinas Pertanian dan Peternakan	3	2,07
		- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	2,07
		- Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	2,07
		- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	2,07
		- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	2,07
		- Dinas Perhubungan	3	2,07
		- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	2,07
		- Dinas Sosial	3	2,07
		- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	2,07
		- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3	2,07
			3	2,07

Berdasarkan jawaban responden, maka dapat diuraikan karakteristik responden sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat intelektualitas responden karena setiap penyusun laporan keuangan, bendahara pengeluaran dan pengurus barang dituntut untuk memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keahlian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan yaitu pengelolaan keuangan dan aset secara efisien dan efektif dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Jika dilihat dari pendidikan terakhir, mayoritas responden berpendidikan S1 sebanyak 108 orang (74.48%), diikuti responden berpendidikan S2 sebanyak 21 orang (14.48%) dan Diploma sebanyak 16 orang (11,03%). Hal ini memperlihatkan bahwa responden yang terpilih

dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, yang dirasa memahami isi dari kuesioner yang diberikan. Selain itu, pendidikan berkaitan erat dengan kompetensi yang dimiliki dan dibutuhkan oleh responden untuk menjalankan tugas dan fungsi mengelola keuangan dan aset dengan baik. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat menjadi indikasi wawasan dan cara pandang dalam menilai dan memandang suatu permasalahan sehingga diharapkan dengan bekal pendidikan yang memadai penyusun laporan keuangan, bendahara pengeluaran dan pengurus barang mampu melakukan pengelolaan keuangan dan aset secara efisien dan efektif sehingga dapat mengambil keputusan yang baik terutama dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

b. Jabatan

Berdasarkan data penelitian mayoritas responden memiliki jabatan sebagai penyusun laporan keuangan SKPD, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang masing-masing sebanyak 45 orang (31.03%). Kemudian, kepala bidang/seksi/subag sebanyak 6 orang (4.14%) serta Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta Staf Bidang Pengelolaan Aset sebanyak 4 orang (2.76%). Hal ini menunjukkan bahwa penyusun laporan keuangan SKPD, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang sama-sama mempunyai keterlibatan yang besar dalam kegiatan Pengelolaan Keuangan. Selain itu, penyusun laporan keuangan SKPD, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang masing-masing memiliki peran yang sama dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

c. Pangkat/Golongan

Mayoritas responden pada penelitian ini adalah responden golongan III sebanyak 128 orang (88.28%), pangkat/golongan II sebanyak 16 orang (11,03%) dan pangkat/golongan IV sebanyak 1 orang (0.69%). Hal ini menunjukkan bahwa pengurus barang paling banyak berpangkat/golongan III. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa golongan III dianggap dapat mengelola aset dengan baik dan dianggap memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam mengelola aset.

d. Lama Bekerja

Lama bekerja responden digunakan sebagai acuan untuk mengetahui pengalaman kerja responden selama bekerja di SKPD masing-masing. Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja, diketahui bahwa sebagian besar responden telah bekerja 5 sampai 10 tahun sebanyak 62 orang (42.76%), lama bekerja 10 sampai 15 tahun sebanyak 54 orang (37.24%), telah bekerja lebih dari 15 tahun sebanyak 17 orang (11.72%) dan lama bekerja 1 sampai 5 tahun sebanyak 12 orang (8,28%). Hal tersebut menunjukkan bahwa responden sudah memiliki pengalaman yang banyak sehingga diharapkan mampu memahami permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional, sumber daya manusia mencakup tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman dan pelatihan. Sumber daya manusia harus baik karena sumber daya manusia yang baik akan menunjukkan kapasitas sumber daya yang baik juga. Manusia bertanggung jawab untuk mengelola organisasi, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan elemen penting dan selalu ada dalam organisasi.

Dilihat dari aspek pendidikan, sumber daya manusia yang mengelola keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dapat dikatakan cukup berpendidikan dimana didominasi oleh lulusan sarjana strata satu. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat ini diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kemudian ketika dilihat dari aspek pengalaman, para pegawai yang berkecimpung dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Polewali Mandar di dominasi oleh pegawai yang telah bekerja kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Diikuti oleh pegawai yang mempunyai pengalaman kerja selama 10 sampai 15 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Polewali Mandar telah dikelola oleh orang-orang yang berpengalaman.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi/instansi pemerintah dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan *e-government*. Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi canggih untuk sistem informasi manajemen jaringan bangunan dan proses kerja yang memungkinkan government untuk bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan, disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses pembangunan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Pemerintah Pusat dan Daerah yang berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Menyikapi regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah mencoba untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini tercermin dalam sistem pengelolaan keuangan yang terkomputerisasi yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Dimulai dengan penerapan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) sejak tahun 2010. Kemudian dimutakhirkan dengan penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) yang menerapkan pengelolaan keuangan secara terpadu (*online*).

Teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah dan mengevaluasi kinerja. Informasi manajemen keuangan daerah diperlukan dan digunakan dalam semua proses tahapan manajemen keuangan daerah, meliputi perencanaan hingga pengambilan keputusan. Pemerintah dalam hal ini harus mampu menghadapi tantangan perubahan lingkungan sehingga dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan perubahan teknologi sistem informasi.

4. Hasil Pemeriksaan Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Hasil pemeriksaan validitas dan reliabilitas kuesioner sangat penting dilakukan sebelum data dari hasil pengumpulan kuesioner dapat digunakan untuk analisis yang berikutnya. Kuesioner penelitian ini menggunakan Skala Likert 5 variasi jawaban dari Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju.

1. Pemeriksaan Validitas

Pemeriksaan validitas penelitian memperhatikan nilai korelasi Pearson. Pada penelitian ini instrumen dinyatakan valid jika nilai korelasi (*Corrected Item-Total Correlation*) > 0.3. Hasil lengkap disajikan pada Lampiran 2, dan teringkas pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Item Kuesioner

Variabel	Indikator	Item	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Kesimpulan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	X1.1	X1.1.1	0.439	Valid
		X1.1.2	0.508	Valid
		X1.1.3	0.517	Valid
		X1.1.4	0.472	Valid
		X1.1.5	0.413	Valid
	X1.2	X1.2.1	0.304	Valid
		X1.2.2	0.433	Valid
		X1.2.3	0.354	Valid
		X1.2.4	0.585	Valid
	X1.3	X1.3.1	0.638	Valid
		X1.3.2	0.650	Valid
		X1.3.3	0.499	Valid
	X1.4	X1.4.1	0.644	Valid
X1.4.2		0.432	Valid	
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	X2.1	X2.1.1	0.410	Valid
		X2.1.2	0.528	Valid
		X2.1.3	0.427	Valid
		X2.1.4	0.562	Valid
		X2.1.5	0.630	Valid
		X2.1.6	0.621	Valid
		X2.1.7	0.315	Valid
		X2.1.8	0.409	Valid
		X2.1.9	0.590	Valid
	X2.2	X2.2.1	0.413	Valid
		X2.2.2	0.472	Valid
		X2.2.3	0.582	Valid
		X2.2.4	0.557	Valid
Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah (X3)	X3.1	X3.1.1	0.545	Valid
		X3.1.2	0.436	Valid

Variabel	Indikator	Item	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Kesimpulan
		X3.1.3	0.456	Valid
	X3.2	X3.2.1	0.473	Valid
		X3.2.2	0.301	Valid
		X3.2.3	0.442	Valid
	X3.3	X3.3.1	0.381	Valid
		X3.3.2	0.457	Valid
		X3.3.3	0.422	Valid
	X3.4	X3.4.1	0.457	Valid
		X3.4.2	0.471	Valid
		X3.4.3	0.408	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y1)	X3.5	X3.5.1	0.488	Valid
		X3.5.2	0.595	Valid
	Y1.1	Y1.1.1	0.461	Valid
		Y1.1.2	0.338	Valid
		Y1.1.3	0.491	Valid
	Y1.2	Y1.2.1	0.431	Valid
		Y1.2.2	0.390	Valid
	Y1.3	Y1.3.1	0.470	Valid
Y1.4	Y1.4.1	0.453	Valid	
Y1.5	Y1.5.1	0.411	Valid	

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa seluruh nilai *Corrected Item-Total Correlation* bernilai di atas 0.3. Sehingga seluruh item dari variabel penelitian telah memenuhi validitas karena memiliki nilai di atas 0.3 maka untuk analisis selanjutnya melibatkan seluruh item.

Tahapan selanjutnya disajikan hasil pengujian reliabilitas instrumen. Variabel dinyatakan reliabel apabila nilai *Alpha Cronbach* > 0.6. Hasil pengujian reliabilitas disajikan pada Lampiran 2, dan teringkas pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel	<i>Alpha Cronbach</i>	Kesimpulan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	0.851	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0.830	Reliabel
Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah (X3)	0.821	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y1)	0.736	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai *Alpha Cronbach* dari empat variabel penelitian bernilai lebih dari 0.6. Berdasarkan pemeriksaan di atas maka data hasil kuesioner dapat dinyatakan valid dan reliabel. Oleh karena itu data dari kuesioner dapat digunakan untuk analisis data pada tahapan selanjutnya

2. Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan empat variabel yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah (X3), dan Kualitas Laporan Keuangan (Y). Keempat variabel diukur menggunakan skala Likert 5 tingkat yang dapat diinterpretasi sebagai berikut :

Tabel 4.5. Interpretasi Skala Likert

SKOR/NILAI	PERSEPSI
1,00 – 1,50	Sangat Rendah/ Sangat Jelek
1,50 > – 2,50	Rendah/ Jelek
2,50 > – 3,50	Sedang
3,50 > – 4,50	Tinggi/ Baik
4,50 >	Sangat Tinggi/ Sangat Baik

Sumber: Solimun *et al.* (2017)

Dalam mengetahui karakteristik dari setiap variabel penelitian dapat dikaji berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden dan rata-rata (*mean*) persepsi responden dengan kriteria yang disajikan pada Tabel 4.5.

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) diukur melalui empat indikator yaitu kuantitas dan kualitas staf (X1.1), kewenangan yang dimiliki staf (X1.2), informasi yang dimiliki staf (X1.3), dan fasilitas fisik dan finansial (X1.4). Setiap indikator pada variabel dijelaskan oleh beberapa item-item pertanyaan. Tabel 4.6. menyajikan distribusi frekuensi, persentase jawaban, dan rata-rata jawaban respon tiap item pada masing-masing indikator variabel.

Tabel 4.6. Deskripsi Jawaban Responden tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Indikator dan Item		Frekuensi Jawaban					Persentase Jawaban					Rata-rata	
		STS	TS	N	S	SS	STS	TS	N	S	SS	Item	Indikator
X1.1	X1.1.1	0	5	32	88	22	0%	3%	22%	60%	15%	3.86	3.92
	X1.1.2	0	5	34	85	23	0%	3%	23%	58%	16%	3.86	
	X1.1.3	0	4	31	79	33	0%	3%	21%	54%	22%	3.96	
	X1.1.4	0	5	38	82	22	0%	3%	26%	56%	15%	3.82	
	X1.1.5	0	0	27	78	42	0%	0%	18%	53%	29%	4.10	
X1.2	X1.2.1	1	0	18	80	48	1%	0%	12%	54%	33%	4.18	4.00
	X1.2.2	2	6	33	76	30	1%	4%	22%	52%	20%	3.86	
	X1.2.3	0	2	16	87	0	0%	1%	11%	59%	0%	4.15	
	X1.2.4	1	18	18	81	29	1%	12%	12%	55%	20%	3.81	
X1.3	X1.3.1	0	16	26	74	31	0%	11%	18%	50%	21%	3.82	3.95
	X1.3.2	0	13	13	65	56	0%	9%	9%	44%	38%	4.12	
	X1.3.3	0	14	25	66	42	0%	10%	17%	45%	29%	3.93	
X1.4	X1.4.1	0	8	35	86	18	0%	5%	24%	59%	12%	3.78	3.83
	X1.4.2	0	7	30	84	26	0%	5%	20%	57%	18%	3.88	
Rata-rata Variabel												3.93	

Sumber: Data Penelitian (2020)

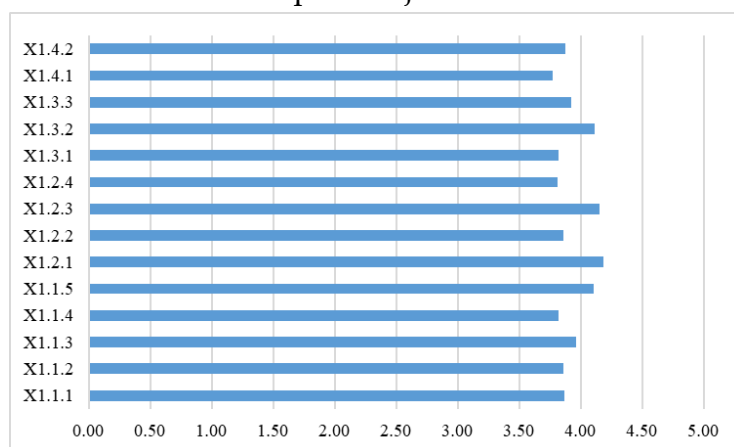
Hasil yang tersaji pada Tabel 4.6. menunjukkan bahwa untuk keempat indikator pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) berada pada taraf yang baik/tinggi dengan merujuk Tabel 4.5. Namun, meskipun sudah dalam kategori baik, nilai rata-rata variabel belum maksimal, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar masih harus melakukan upaya penguatan indikator-indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan pemerintahan.

Pada indikator kuantitas dan kualitas staf (X1.1) mayoritas responden menjawab Setuju, dan pada indikator ini tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Namun, terdapat beberapa item yang menjawab tidak setuju dengan jumlah yang sedikit. Nilai rata-rata skor indikator yang menunjukkan nilai 3,92 mengindikasikan bahwa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menilai kuantitas dan

kualitas staf di lingkungan pemerintah daerah dalam kondisi kualitas staf pemerintahan yang baik.

Berbeda dengan indikator X1.1, pada indikator kewenangan yang dimiliki staf (X1.2) terdapat responden penelitian yang menjawab sangat tidak setuju, hanya pada item X1.2.3 yang menjawab minimal tidak setuju. Pada indikator ini mayoritas responden menjawab setuju dan disusul sangat setuju. Nilai rata-rata skor indikator yaitu 4,00 maka mengindikasikan bahwa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menilai kewenangan yang dimiliki staf sudah berjalan dengan baik sesuai yang diatur oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut juga sama pada indikator X1.3 dan X1.4, mayoritas responden setuju bahwa informasi yang dimiliki staf dan fasilitas fisik maupun finansial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sudah dalam kondisi taraf yang baik dengan merujuk Tabel 4.5. Pada dua indikator terakhir ini tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, namun pada indikator X1.3 (informasi yang dimiliki staf) cukup banyak responden yang menjawab tidak setuju pada item kuesioner yang diajukan. Rata-rata skor item dapat disajikan dalam bentuk Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Grafik Rata-rata Skor Item Variabel X1

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Variabel Teknologi Informasi (X2) diukur melalui dua indikator yaitu Kemudahan Penggunaan (X2.1) dan Kebermanfaatan (X2.2). Setiap indikator pada variabel dijelaskan oleh beberapa item-item pertanyaan.

Tabel 4.7. menyajikan distribusi frekuensi, persentase jawaban, dan rata-rata jawaban respon tiap *item* pada masing-masing indikator variabel.

Tabel 4.7. Deskripsi Jawaban Responden tentang Teknologi Informasi (X2)

Indikator dan Item	Frekuensi Jawaban					Persentase Jawaban					Rata-rata		
	STS	TS	N	S	SS	STS	TS	N	S	SS	Item	Indikator	
X2.1	X2.1.1	0	6	25	101	15	0%	4%	17%	69%	10%	3.85	3.76
	X2.1.2	1	6	23	101	16	1%	4%	16%	69%	11%	3.85	
	X2.1.3	0	3	28	97	19	0%	2%	19%	66%	13%	3.90	
	X2.1.4	0	7	29	85	26	0%	5%	20%	58%	18%	3.88	
	X2.1.5	0	4	28	85	30	0%	3%	19%	58%	20%	3.96	
	X2.1.6	1	5	33	84	24	1%	3%	22%	57%	16%	3.85	
	X2.1.7	4	49	45	36	13	3%	33%	31%	24%	9%	3.03	
	X2.1.8	4	19	30	78	4	3%	13%	20%	53%	3%	3.56	
	X2.1.9	1	3	22	104	17	1%	2%	15%	71%	12%	3.90	
X2.2	X2.2.1	0	5	15	99	28	0%	3%	10%	67%	19%	4.02	4.07
	X2.2.2	0	1	15	105	26	0%	1%	10%	71%	18%	4.06	
	X2.2.3	0	1	14	94	38	0%	1%	10%	64%	26%	4.15	
	X2.2.4	0	2	17	99	29	0%	1%	12%	67%	20%	4.05	
Rata-rata Variabel											3.91		

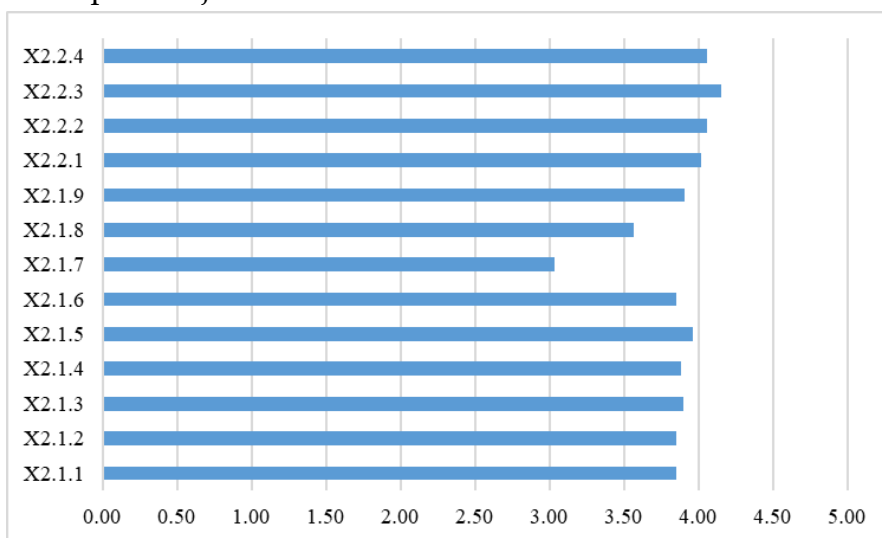
Sumber: Data Penelitian (2020)

Hasil yang tersaji pada Tabel 4.7. menunjukkan bahwa variabel Teknologi Informasi (X2) berada pada kategori yang baik/tinggi dengan merujuk Tabel 4.5. Namun, meskipun sudah dalam kategori baik, nilai rata-rata variabel belum maksimal, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar masih harus melakukan upaya penguatan indikator-indikator untuk aspek penggunaan dan kebermanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Indikator Kemudahan Penggunaan (X2.1) memiliki sembilan item penting yang dinilai oleh responden. Mayoritas responden SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menjawab setuju bahwa terdapat kemudahan penggunaan teknologi informasi. Pada indikator ini terdapat responden penelitian yang menjawab item dengan sangat tidak setuju, namun juga ada item yang dinilai minimal tidak setuju saja. Sehingga SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menilai kemudahan penggunaan teknologi informasi sudah berjalan dengan baik, dengan merujuk nilai rata-rata variabel sebesar 3.76 namun nilai ini masih sangat dekat dengan kategori cukup (Tabel 4.5.) sehingga pemerintah

masih harus meningkatkan penggunaan teknologi informasi sehingga karyawan pemerintah memiliki kemudahan penggunaan.

Berbeda dengan indikator X2.1, pada indikator Kebermanfaatan (X2.2) tidak terdapat responden penelitian yang menjawab sangat tidak setuju karena minimal responden menjawab tidak setuju. Pada indikator ini mayoritas responden menjawab setuju dan disusul sangat setuju. Nilai rata-rata skor indikator yaitu 4,07 maka mengindikasikan bahwa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menilai kebermanfaatan teknologi informasi sudah berjalan dengan baik. Rata-rata skor item dapat disajikan dalam bentuk Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Grafik Rata-rata Skor Item Variabel X2

c. Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah (X3)

Variabel Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah (X3) diukur melalui lima indikator yaitu Inventaris aset (X3.1), legal audit (X3.2), penilaian aset (X3.3), Optimalisasi aset (X3.4) dan Pengawasan dan pengendalian (X3.5). Setiap indikator pada variabel dijelaskan oleh beberapa item-item pertanyaan. Tabel 4.8. menyajikan distribusi frekuensi, persentase jawaban dan rata-rata jawaban respon tiap *item* pada masing-masing indikator variabel.

Tabel 4.8. Deskripsi Jawaban Responden tentang Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah (X3)

Indikator dan Item	Frekuensi Jawaban					Persentase Jawaban					Rata-rata		
	STS	TS	N	S	SS	STS	TS	N	S	SS	Item	Indikator	
X3.1	X3.1.1	0	2	20	105	20	0%	1%	14%	71%	14%	3.97	4.02
	X3.1.2	0	0	14	103	30	0%	0%	10%	70%	20%	4.11	
	X3.1.3	0	4	26	85	32	0%	3%	18%	58%	22%	3.99	
X3.2	X3.2.1	0	1	31	88	27	0%	1%	21%	60%	18%	3.96	4.00
	X3.2.2	0	7	23	86	31	0%	5%	16%	59%	21%	3.96	
	X3.2.3	1	1	22	83	40	1%	1%	15%	56%	27%	4.09	
X3.3	X3.3.1	0	0	18	98	31	0%	0%	12%	67%	21%	4.09	4.05
	X3.3.2	0	5	26	84	0	0%	3%	18%	57%	0%	3.97	
	X3.3.3	0	0	20	92	35	0%	0%	14%	63%	24%	4.10	
X3.4	X3.4.1	0	3	29	92	23	0%	2%	20%	63%	16%	3.92	3.88
	X3.4.2	1	6	33	83	24	1%	4%	22%	56%	16%	3.84	
	X3.4.3	1	3	33	86	24	1%	2%	22%	59%	16%	3.88	
X3.5	X3.5.1	0	3	22	99	23	0%	2%	15%	67%	16%	3.97	3.94
	X3.5.2	0	3	28	96	20	0%	2%	19%	65%	14%	3.90	
Rata-rata Variabel											3.98		

Sumber: Data Penelitian (2020)

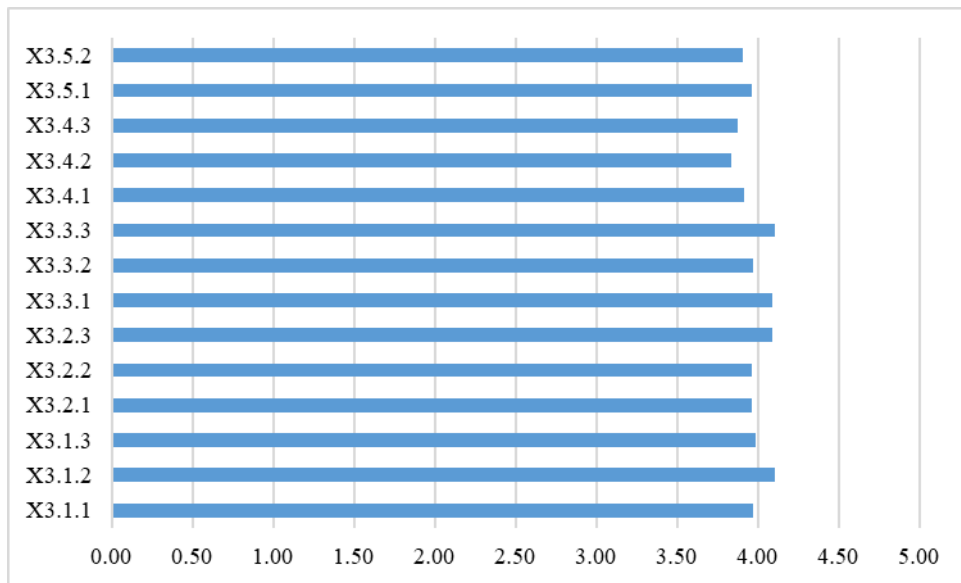
Hasil yang tersaji pada Tabel 4.8. menunjukkan bahwa untuk kelima indikator pada variabel ini berada pada taraf yang Baik/Tinggi dengan merujuk Tabel 4.5. Sehingga dapat dikatakan bahwa responden menilai bahwa Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah telah berjalan secara Baik atau masuk dalam kategori keberhasilan yang Tinggi. Namun, meskipun sudah dalam kategori Baik nilai rata-rata variabel belum maksimal, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar masih harus melakukan upaya penguatan indikator-indikator Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah di lingkungan pemerintahan.

Indikator Inventaris Aset (X3.1) memiliki item atau butir pertanyaan kuesioner sebanyak tiga buah. Pada indikator ini mayoritas responden menjawab Setuju kemudian disusul Sangat Setuju. Pada indikator ini juga tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Namun, pada beberapa item yang menjawab tidak setuju dengan jumlah yang sedikit. Nilai rata-rata skor indikator yang menunjukkan nilai 4,02 mengindikasikan bahwa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menilai inventaris aset di lingkungan pemerintah daerah sudah dalam kondisi yang baik namun masih harus ditingkatkan.

Indikator kedua dari variabel ini yaitu Legal Audit (X3.2) di mana memiliki item kuesioner sebanyak tiga buah yang terlampir pada lampiran kuesioner. Berbeda dengan indikator X3.1, pada indikator Legal Audit (X3.2) terdapat responden penelitian yang menjawab sangat tidak setuju, hanya pada item X3.2.3. Untuk item lainnya hanya menjawab minimal tidak setuju saja. Pada indikator ini mayoritas responden menjawab setuju dan sangat setuju. Nilai rata-rata skor indikator yaitu 4,00 maka mengindikasikan bahwa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memberikan persepsi bahwa legal audit sudah dalam kondisi yang baik atau berhasil dengan merujuk interpretasi Tabel 4.5.

Indikator ketiga yaitu Penilaian Aset (X3.3) memiliki item kuesioner sebanyak tiga buah. Indikator ini memiliki nilai rata-rata skor yaitu 4,05 maka dengan merujuk Tabel 4.5. dapat diindikasikan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian bahwa penilaian aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sudah berjalan dengan baik atau dalam taraf keberhasilan yang tinggi. Kondisi ini didukung dengan jawaban responden yang mayoritas menjawab setuju dan sangat setuju pada butir atau item kuesioner yang telah diajukan. Namun, pemerintah daerah masih harus meningkatkan penilaian terhadap aset agar dapat diperoleh hasil yang sangat baik/sangat tinggi di kemudian hari.

Hal tersebut juga sama pada indikator X3.4 (optimalisasi aset) dan X3.5 (pengawasan dan pengendalian), mayoritas responden setuju bahwa optimalisasi aset dan pengawasan serta pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sudah dalam kondisi yang baik atau berhasil dengan merujuk Tabel 4.5. Pada dua indikator terakhir ini responden juga cenderung menjawab netral atau ragu-ragu terhadap item-item pertanyaan yang diajukan, sehingga Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu memberikan perhatian lebih kepada beberapa aspek yang tergambar pada item-item pertanyaan kuesioner indikator X3.4 dan X3.5. Rata-rata skor item dapat disajikan dalam bentuk Gambar 4.3.



Gambar 4.3. Grafik Rata-rata Skor Item Variabel X3

d. Kualitas Laporan Keuangan (Y1)

Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diukur melalui lima indikator yaitu Laporan keuangan disajikan dengan relevan (Y1.1), Laporan keuangan disajikan dengan andal (Y1.2), Laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami (Y1.3), Laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan (Y1.4), dan Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Y1.5). Setiap indikator pada variabel dijelaskan oleh beberapa item-item pertanyaan. Tabel 4.9. menyajikan distribusi frekuensi, persentase jawaban dan rata-rata jawaban respon tiap *item* pada masing-masing indikator variabel.

Tabel 4.9. Deskripsi Jawaban Responden tentang Kualitas Laporan Keuangan (Y1)

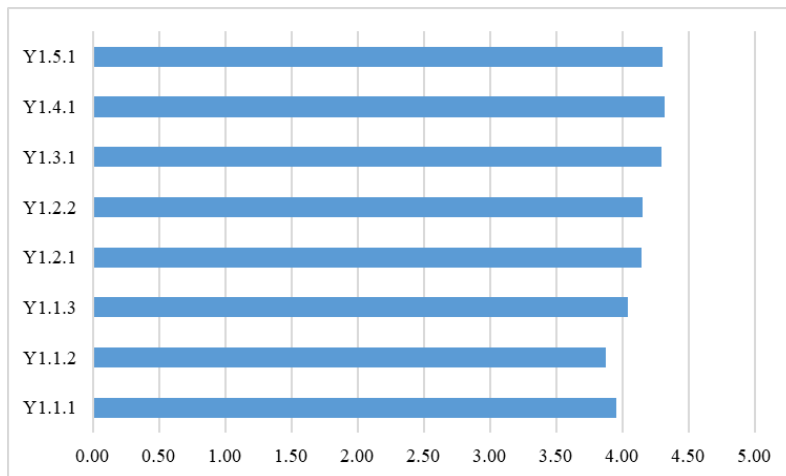
Indikator dan Item	Frekuensi Jawaban					Persentase Jawaban					Rata-rata	
	STS	TS	N	S	SS	STS	TS	N	S	SS	Item	Indikator
Y1.1	Y1.1.1	0	6	21	94	26	0%	4%	14%	64%	18%	3.96
	Y1.1.2	0	10	22	91	24	0%	7%	15%	62%	16%	
	Y1.1.3	0	3	21	90	33	0%	2%	14%	61%	22%	
Y1.2	Y1.2.1	0	1	24	75	47	0%	1%	16%	51%	32%	4.15
	Y1.2.2	0	2	26	66	53	0%	1%	18%	45%	36%	
Y1.3	Y1.3.1	0	1	19	62	65	0%	1%	13%	42%	44%	4.30
Y1.4	Y1.4.1	0	1	12	73	61	0%	1%	8%	50%	41%	4.32
Y1.5	Y1.5.1	0	1	13	73	0	0%	1%	9%	50%	0%	4.31
Rata-rata Variabel											4.21	

Sumber: Data Penelitian (2020)

Hasil yang tersaji pada Tabel 4.9. menunjukkan bahwa untuk kelima indikator pada variabel ini berada pada taraf yang Baik/Tinggi dengan merujuk Tabel 4.5. Sehingga dapat dikatakan bahwa responden menilai bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada kondisi yang Baik. Namun, meskipun sudah dalam kategori Baik nilai rata-rata variabel belum maksimal, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar masih harus melakukan upaya penguatan indikator-indikator Kualitas Laporan Keuangan Daerah di lingkungan pemerintahan.

Indikator Relevan (Y1.1) memiliki item atau butir pertanyaan kuesioner sebanyak tiga buah. Pada indikator ini mayoritas responden menjawab Setuju kemudian disusul Sangat Setuju. Pada indikator ini juga tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Namun, pada beberapa item yang menjawab tidak setuju dengan jumlah yang sedikit. Nilai rata-rata skor indikator yang menunjukkan nilai 3,96 mengindikasikan bahwa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menilai bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan relevan di lingkungan pemerintah daerah.

Indikator kedua dari variabel ini yaitu laporan keuangan disajikan dengan andal (Y1.2) di mana memiliki item kuesioner sebanyak dua buah yang terlampir pada lampiran kuesioner. Pada indikator ini mayoritas responden menjawab setuju dan sangat setuju. Nilai rata-rata skor indikator yaitu 4,15 maka mengindikasikan bahwa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memberikan persepsi bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan andal. Indikator Y1.3, Y1.4, dan Y1.5 seluruhnya memiliki item sebanyak satu. Selanjutnya mayoritas menjawab Setuju dan Sangat Setuju. Rata-rata skor item dapat disajikan dalam bentuk Gambar 4.4.



Gambar 4.4. Grafik Rata-rata Skor Item Variabel Y1

3. Hasil Analisis SEM PLS dengan Pendekatan WarpPLS

a. Hasil Eksplorasi Indikator dari Setiap Variabel

Langkah awal dalam melakukan analisis SEM dengan pendekatan WarpPLS adalah melakukan eksplorasi indikator yang dapat digunakan sebagai pengukur variabel laten. Di mana indikator yang signifikan berarti dapat digunakan sebagai pengukur variabel laten. Selain itu, untuk mempermudah interpretasi hubungan antar variabel, maka indikator yang digunakan hanya indikator yang memiliki *factor loading* (muatan faktor) yang bertanda positif. *Factor loading* (muatan faktor) untuk model indikator reflektif. Hasil analisis eksplorasi ini secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3. Dimana bobot komponen setiap variabel seperti pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Hasil Eksplorasi Item Setiap Variabel pada Model SEM WarpPLS

Variabel	Item	Model Indikator	Bobot	P value	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	kuantitas dan kualitas staf (X1.1)	Reflektif	0.282	<0.001	Digunakan dalam model
	kewenangan yang dimiliki staf (X1.2)	Reflektif	0.278	<0.001	Digunakan dalam model
	informasi yang dimiliki staf (X1.3)	Reflektif	0.269	<0.001	Digunakan dalam model
	fasilitas fisik dan finansial (X1.4)	Reflektif	0.268	<0.001	Digunakan dalam model

Variabel	Item	Model Indikator	Bobot	P value	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	Kemudahan Penggunaan (X2.1)	Reflektif	0.533	<0.001	Digunakan dalam model
	Kebermanfaatan (X2.2)	Reflektif	0.533	<0.001	Digunakan dalam model
Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah (X3)	Inventaris aset (X3.1)	Reflektif	0.224	0.002	Digunakan dalam model
	legal audit (X3.2)	Reflektif	0.219	0.003	Digunakan dalam model
	penilaian aset (X3.3)	Reflektif	0.224	0.002	Digunakan dalam model
	Optimalisasi aset (X3.4)	Reflektif	0.225	0.002	Digunakan dalam model
	Pengawasan dan pengendalian (X3.5)	Reflektif	0.216	0.003	Digunakan dalam model
Kualitas Laporan Keuangan (Y1)	relevan (Y1.1)	Reflektif	0.362	<0.001	Digunakan dalam model
	andal (Y1.2)	Reflektif	0.356	<0.001	Digunakan dalam model
	dapat dipahami (Y1.3)	Reflektif	0.27	<0.001	Digunakan dalam model
	dapat dibandingkan (Y1.4)	Reflektif	0.286	<0.001	Digunakan dalam model
	sesuai dengan standar (Y1.5)	Reflektif	0.308	<0.001	Digunakan dalam model

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.10 tersebut dapat dilihat bahwa pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah, dan Kualitas Laporan Keuangan tidak terdapat indikator yang memiliki *factor loading* (muatan faktor)/bobot dengan tanda negatif dan tidak signifikan. Dengan demikian tidak terdapat indikator yang dikeluarkan dari model karena seluruh indikator telah memenuhi syarat untuk digunakan dalam mengukur variabel. Selanjutnya dilakukan analisis model *fit* dan *quality indices* dengan menggunakan indikator-indikator yang telah memenuhi syarat dapat digunakan sebagai pengukur variabel laten yaitu menggunakan data tanpa indikator yang tidak signifikan.

b. Model Fit and Quality Indices model WarpPLS

Sebelum dilakukan interpretasi terhadap hasil pengujian hipotesis, model harus memiliki *Goodness of Fit*. Terdapat 10 (sepuluh) ukuran Model *Fit* dan *Quality Indices* dalam analisis *WarpPLS* untuk mengukur kualitas model struktural (Solimun *et al.*, 2017). *Goodness of Fit* secara lengkap dapat dilihat pada analisis *WarpPLS* di Lampiran 3, secara ringkas terangkum pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Model Fit and Quality Indices

No.	Model Fit/ Indeks Kualitas	Value	Fit Criteria	Result
1	<i>Average path coefficient</i>	APC = 0.276 P < 0.001	P < 0.05	Signifikan
2	<i>Average R-squared</i>	ARS = 0.668 P < 0.001	P < 0.05	Signifikan
3	<i>Average adjusted R-squared</i>	AARS = 0.656 P < 0.001	P < 0.05	Signifikan
4	<i>Average block VIF</i>	AVIF = 1.699	<i>acceptable</i> jika AVIF ≤ 5 ideal jika AVIF ≤ 3.3	Ideal
5	<i>Average full collinearity VIF</i>	AFVIF = 4.363	<i>acceptable</i> jika AFVIF ≤ 5 ideal jika AFVIF ≤ 3.3	<i>Acceptable</i>
6	<i>Tenenhaus GoF</i>	GoF = 0.716	kecil jika GoF ≥ 0.1 medium jika GoF ≥ 0.25 besar jika GoF ≥ 0.36	Besar
7	<i>Sympson's paradox ratio</i>	SPR = 0.600	<i>acceptable</i> jika SPR ≥ 0.7 ideal jika SPR = 1	<i>Acceptable</i>
8	<i>R-squared contribution ratio</i>	RSCR = 0.899	<i>acceptable</i> jika RSCR ≥ 0.9 ideal RSCR = 1	<i>Acceptable</i>
9	<i>Statistical suppression ratio</i>	SSR = 1.000	<i>acceptable</i> jika SSR ≥ 0.7	<i>Acceptable</i>
10	<i>Nonlinear bivariate causality direction ratio</i>	NLBCDR = 1.000	<i>acceptable</i> jika NLBCDR ≥ 0.7	<i>Acceptable</i>

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Goodness of Fit yang dimaksud adalah untuk melihat indeks dan ukuran kebaikan model hasil analisis dikaitkan dengan fenomena yang diteliti. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa model adalah *fit*, yaitu seluruh model *fit* dan *quality indices* adalah terpenuhi. Dengan demikian model dikatakan baik dan dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena (sistem) yang dikaji dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

c. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Model struktural menyajikan hubungan antar variabel penelitian, dengan menyajikan koefisien jalur pengaruh langsung (*structural model*) dan nilai *p-value*. Besaran atau nilai koefisien jalur menyatakan derajat kuat lemahnya hubungan antar variabel, atau menyatakan derajat kuat lemahnya pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Di sisi lain, tanda koefisien jalur (positif/negatif) menunjukkan arah hubungan antar variabel. Semakin besar nilai koefisien jalur menunjukkan semakin kuat pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain.

Tanda positif pada koefisien jalur menunjukkan arah hubungan yang searah, yaitu jika semakin besar nilai suatu variabel maka akan makin besar pula nilai variabel yang dipengaruhi. Sebaliknya, tanda negatif pada koefisien jalur menunjukkan arah hubungan yang berlawanan, yaitu jika semakin besar nilai suatu variabel maka nilai variabel lain yang dipengaruhi justru makin kecil.

Nilai *p-value* digunakan untuk melihat hasil pengujian hipotesis, yaitu ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika *p-value* < 0.05 (alpha 5%), maka dapat dikatakan signifikan, yaitu bahwa terdapat pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya yang bermakna. Dalam SEM dikenal dua pengaruh, yaitu pengaruh langsung (*direct effect*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*). Pada Tabel 4.12 dan Tabel 4.13 berikut ini disajikan pengaruh langsung dan moderasi dari hasil analisis menggunakan WarpPLS.

Tabel 4.12. Uji Hipotesis pada Pengaruh Langsung Analisis WarpPLS

Pengaruh Langsung				
Variabel		Koefisien Jalur	P-value	Hasil Pengujian
Prediktor	Respon			
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	Kualitas Laporan Keuangan (Y1)	0.141*	0.039	Signifikan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	Kualitas Laporan Keuangan (Y1)	0.193**	0.008	Signifikan

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 (Lampiran 3)

Keterangan: * : signifikan pada α 5%

** : signifikan pada α 1%

^{ns} : tidak signifikan

Berdasarkan hasil uji hipotesis sebagaimana tersaji pada Tabel 4.12 dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

- 1) Terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan, karena pada hubungan ini diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.141 dan *p-value* 0.039. Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan positif. Artinya, semakin tepat implementasi Kompetensi Sumber Daya Manusia maka akan dapat memperbaiki Kualitas Laporan Keuangan. Dengan demikian, Hipotesis 1 Diterima.
- 2) Terdapat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan, karena berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada hubungan ini diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.193 dan *p-value* 0.008. Sehingga hasil pengujian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif. Artinya, dengan semakin tepat implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi akan mempengaruhi semakin tingginya variabel Kualitas Laporan Keuangan. Dengan demikian, Hipotesis 2 Diterima.

Tabel 4.13. Uji Hipotesis pada Pengaruh Moderasi Analisis WarpPLS

Pengaruh Moderasi (Variabel Interaksi)						
Variabel			Koefisien Jalur	<i>P value</i>	Hasil Pengujian	Keterangan
Prediktor	Moderasi	Respon				
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah (X3)	Kualitas Laporan Keuangan (Y1)	0.602**	<0.001	Signifikan	Moderasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah (X3)	Kualitas Laporan Keuangan (Y1)	0.432**	<0.001	Signifikan	Moderasi

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 (Lampiran 3)

Keterangan: * : signifikan pada α 5%

** : signifikan pada α 1%

^{ns} : tidak signifikan

Berdasarkan hasil uji hipotesis sebagaimana tersaji pada Tabel 4.13 dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

- 1) Analisis SEM dengan pendekatan *WarpPLS* tentang Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah sebagai moderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan, diperoleh koefisien jalur pengaruh interaksi sebesar 0.602 dan *p-value* <0.001. Karena *P-value* <0.01, maka Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah sebagai variabel moderasi. Mengingat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah juga signifikan dan positif, maka hal ini mengindikasikan bahwa Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah dapat memperkuat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Artinya adanya Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah, dapat meningkatkan kekuatan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan demikian, Hipotesis 3 Diterima.
- 2) Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah sebagai moderasi pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan,

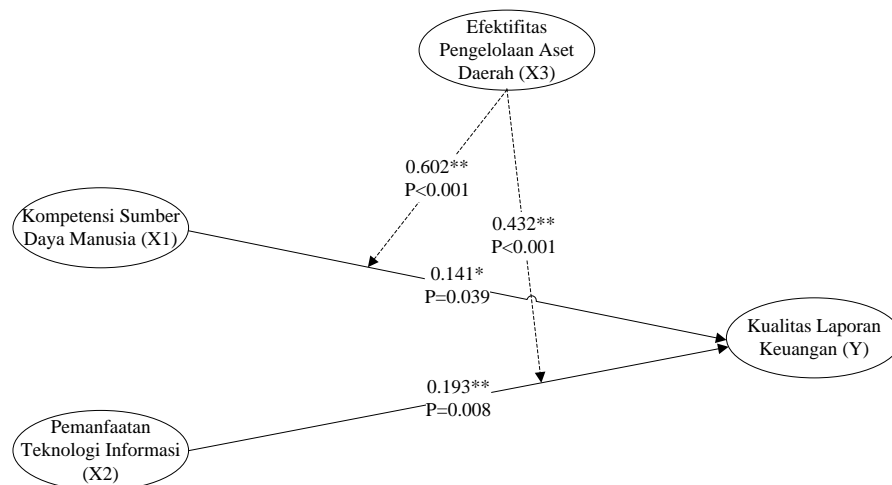
diperoleh koefisien jalur pengaruh interaksi (moderasi) sebesar 0.432 dan P-value <0.001. Dengan merujuk P-value <0.01, maka Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah sebagai variabel moderasi dalam hubungan ini. Berdasarkan hasil ditunjukkan bahwa pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah juga signifikan dan positif, maka hal ini mengindikasikan bahwa Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah dapat memperkuat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Artinya adanya Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah, dapat meningkatkan kekuatan pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan demikian, Hipotesis 4 Diterima.

d. Koefisien Determinasi

Kelayakan model juga dapat dianalisis dengan menghitung koefisien determinasi multivariate yang dinyatakan dengan Q-Square (Q^2). Q-Square merupakan pengukur seberapa baik model hasil penelitian bisa menjelaskan perilaku obyek penelitian (sistem) yang diteliti. $Q^2 > 0$ menunjukkan model mempunyai *predictive relevance*. Guna mengetahui seberapa besar keragaman data dapat menjelaskan model dapat penelitian ini menggunakan Q^2 .

Berdasarkan hasil analisis yang terlampir pada Lampiran 3, menunjukkan bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 66.8% atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data 66.8% dapat dijelaskan oleh model. Sedangkan sisanya 33,2% dijelaskan oleh variabel lain (yang belum terkandung dalam model) dan error. Dengan demikian model struktural yang telah terbentuk telah sesuai.

Secara grafis hasil pengujian hipotesis dalam model struktural SEM pendekatan *WarpPLS* dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5. Kerangka Konseptual Hasil Pengujian Hipotesis

Sumber: Data Primer Diolah, 2020 (Lampiran 3)

5. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil analisis pengujian SEM menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Tabel 4.12). Hal ini mengartikan bahwa secara empiris Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah faktor pendorong Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Setiap perubahan yang terjadi pada Kompetensi Sumber Daya Manusia maka akan memberikan pengaruh perubahan yang signifikan pada Kualitas Laporan Keuangan secara positif yang artinya semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki maka semakin tinggi pula Kualitas Laporan Keuangan begitu pula sebaliknya. Tanda pada koefisien yang positif berarti bahwa pengaruh tersebut searah. Semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Manusia maka akan berakibat pada Kualitas Laporan Keuangan yang semakin tinggi dan sebaliknya semakin rendah Kompetensi Sumber Daya Manusia maka akan mengakibatkan Kualitas Laporan Keuangan yang semakin rendah.

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dicerminkan terkuat oleh indikator kuantitas dan kualitas staf, karena memiliki nilai bobot terbesar dan signifikan (Tabel 4.10). Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas staf merupakan aspek terpenting di dalam implementasi dan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Secara lebih rinci indikator ini direfleksikan oleh: (1) Memahami penyusunan laporan keuangan, (2) Memahami kebijakan penyusunan laporan keuangan, (3) Mengetahui informasi yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, (4) Handal/kompeten untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyusunan laporan keuangan, dan (5) Melaksanakan segala pekerjaan/tugas yang diperintahkan. Namun demikian bila lebih dicermati, maka implementasi empat indikator variabel ini yaitu, kuantitas dan kualitas staf, kewenangan yang dimiliki staf, informasi yang dimiliki staf, dan fasilitas fisik dan finansial, relatif dalam kondisi seimbang. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai bobot/*loading* yang relatif hampir sama (berkisar pada nilai 0,28). SKPD di Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah memberlakukan keempat aspek tersebut secara seimbang dan proporsional untuk mendukung Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan sesuatu yang baik dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan.

Variabel Kualitas Laporan Keuangan dicerminkan terkuat oleh relevan, karena memiliki nilai bobot terbesar dan signifikan (Tabel 4.10). Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dengan relevan menjadi aspek terpenting di dalam implementasi dan pengembangan laporan keuangan yang lebih baik. Secara lebih rinci indikator ini direfleksikan oleh: (1) Laporan dapat membantu dalam pengambilan keputusan, (2) Laporan disajikan tepat waktu, dan (3) Laporan disajikan secara sistematis dan teratur. SKPD di Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah memberlakukan ketiga aspek tersebut secara seimbang dan proporsional untuk mendukung Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan sesuatu yang baik dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan.

Temuan penelitian ini, mendukung temuan penelitian terdahulu yaitu Reny (2019), Tumpal (2019), Elvin (2017), dan Hardyansyah (2016) yang menyatakan terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Yunita (2016: 51) Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu elemen yang penting dalam organisasi yang akan menentukan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan aset, kemampuan intelektual dan kemampuan fisik sangat dibutuhkan oleh aparatur pemerintahan untuk mengamankan dan mengoptimalkan asetnya.

Sedangkan, penyusunan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan kompetensi yang sesuai dengan tugas, termasuk pengetahuan yang sesuai, keterampilan, pengalaman, perilaku, sikap, dan sifat (Hastings., 2010:23). SDM dalam konteks pemerintahan biasanya disebut dengan aparatur negara. Selain itu, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas, dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi keuangan Pemerintahan Daerah (Nurillah, 2014). Oleh karena itu, pada penelitian ini memberikan bukti secara empiris bahwa terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka SKPD perlu memperhatikan mengenai kuantitas dan kualitas karyawan di lingkungan pemerintahan.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil analisis pengujian SEM menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Tabel 4.12). Hal ini mengartikan bahwa secara empiris Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah faktor pendorong Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Setiap perubahan yang terjadi pada Pemanfaatan Teknologi Informasi maka akan memberikan pengaruh perubahan yang signifikan pada Kualitas Laporan Keuangan secara positif yang artinya semakin tinggi Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dimiliki maka semakin tinggi pula Kualitas Laporan

Keuangan begitu pula sebaliknya. Tanda pada koefisien yang positif berarti bahwa pengaruh tersebut searah. Semakin tinggi Pemanfaatan Teknologi Informasi maka akan berakibat pada Kualitas Laporan Keuangan yang semakin tinggi dan sebaliknya semakin rendah Pemanfaatan Teknologi Informasi maka akan mengakibatkan Kualitas Laporan Keuangan yang semakin rendah.

Sedangkan untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dicerminkan terkuat oleh seluruh indikator yang dimiliki yaitu, kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan, karena memiliki nilai bobot/*loading factor* sebesar 0.533 dan signifikan (Tabel 4.10). Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan memiliki derajat kekuatan yang sama yaitu merupakan aspek terpenting di dalam implementasi dan pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh SKPD di Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Temuan penelitian ini, mendukung temuan penelitian terdahulu yaitu Dermawan (2016), Komarasari (2017), dan Kurniawan (2016) yang menyatakan terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan aset daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

c. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan moderasi Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah

Pada penelitian ini, bahwa hasil pengujian hipotesis Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah sebagai moderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah diterima, yaitu

Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah sebagai variabel moderasi (Tabel 4.13). Temuan ini mengindikasikan bahwa Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah memperkuat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan demikian potensi Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah sebagai moderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah terbukti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, akan tetapi pengaruh itu sangat kecil apabila tidak disertai dengan pengelolaan aset daerah yang efektif. Hal ini ditandai dengan nilai koefisien jalur pengaruh langsung kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang hanya sebesar 0,141. Akan tetapi jika kompetensi sumber daya manusia ketika disertai dengan pengelolaan aset daerah yang efektif, akan mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya nilai koefisien jalur pengaruh sumber daya manusia ketika dimoderasi oleh efektifitas pengelolaan aset daerah yakni sebesar 0,602. Temuan ini mengindikasikan bahwa apabila SKPD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memiliki Kompetensi Sumber Daya Manusia yang disertai dengan Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah yang baik terhadap pemerintah, maka dapat memunculkan potensi untuk menciptakan Kualitas Laporan Keuangan yang handal. Hal ini menjadi temuan baru dan menarik di dalam penelitian ini bagi pemerintah daerah. Aspek yang perlu diutamakan dari efektifitas pengelolaan aset daerah adalah inventaris aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian. Dimana aspek-aspek tersebut merupakan indikator-indikator dari variabel efektifitas pengelolaan aset daerah yang memiliki nilai *loading factor* relative sama besarnya yaitu 0.22 (Tabel 4.10), sehingga menunjukkan seluruh indikator memiliki derajat kepentingan yang sama untuk ditingkatkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan realita yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi tempat penelitian. Dimana Laporan

Keuangan Kabupaten Polewali Mandar selalu memperoleh predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP). Salah satu masalah terbesarnya adalah adanya pengelolaan aset tetap yang tidak efektif. Setelah dilakukan perbaikan dalam pengelolaan aset tetapnya, ditandai dengan adanya kegiatan inventarisasi ulang serta revaluasi nilai aset tetap yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, barulah pada Tahun 2016, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar memperoleh predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Temuan ini menjadi pengembangan teori *stewardship* yang menggunakan pendekatan *governance* atas dasar sosiologi dan psikologi, dimana manajemen sebagai *stewards* (pelayan) bisa termotivasi dalam bekerja sesuai dengan kemauan *principal* dan organisasi. Dampaknya pada penelitian ini adalah pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik bukan dilandasi untuk kepentingan ekonomi semata tetapi juga terdapat pertimbangan sosiologis maupun psikologis guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

d. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan moderasi Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah

Pada penelitian ini, bahwa hasil pengujian hipotesis Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah sebagai moderasi pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah diterima, yaitu Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah sebagai variabel moderasi. (Tabel 4.13) Temuan ini mengindikasikan bahwa Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah memperkuat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan demikian potensi Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah sebagai moderasi pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah terbukti.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, akan tetapi pengaruh itu sangat kecil apabila tidak disertai dengan pengelolaan aset daerah yang efektif. Hal ini ditandai dengan nilai

koefisien jalur pengaruh langsung Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan yang hanya sebesar 0,193. Akan tetapi ketika Pemanfaatan Teknologi Informasi ini disertai dengan pengelolaan aset daerah yang efektif, akan mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya nilai koefisien jalur Pemanfaatan Teknologi Informasi ketika dimoderasi oleh efektifitas pengelolaan aset daerah yakni sebesar 0,432.

Hasil penelitian ini sebenarnya merupakan jawaban atas salah satu masalah mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah baik di Kabupaten Polewali Mandar sendiri, maupun di daerah-daerah lainnya. Kabupaten Polewali Mandar, sesungguhnya telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu elemen penting dalam pengelolaan keuangannya, walaupun pada awal-awalnya masih sangat sederhana. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka pemanfaatan teknologi informasi juga semakin berkembang. Akan tetapi, dampak dari pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah belum terlalu signifikan dalam menghasilkan laporan yang berkualitas tanpa dibarengi dengan efektifitas dalam pengelolaan aset daerah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian nilai aset pemerintah daerah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan aset daerah sesungguhnya bukanlah merupakan pekerjaan yang relatif mudah. Tetapi dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi, akan membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan aset tetapnya secara efektif. Hal tersebut mendorong SKPD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk memaksimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang disertai dengan Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah yang baik terhadap pemerintah, maka dapat memunculkan potensi untuk menciptakan Kualitas Laporan Keuangan yang handal. Hal ini menjadi temuan baru dan menarik di dalam penelitian ini bagi pemerintah daerah.

Optimalisasi manajemen aset daerah merupakan kebijakan penting bagi pemerintah daerah karena di dalamnya terdapat sasaran strategis yang bisa diwujudkan dan dapat ditempuh dengan: identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah; penerapan sistem informasi manajemen aset daerah; pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset dan pelibatan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan penilai independen (Mardiasmo,2004). Laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan, dapat menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan oleh rakyat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini menguji empat hipotesis dengan menggunakan *structural equation model* (SEM) yang diolah dengan menggunakan *WarpPLS*. Hasil analisis faktor dari empat variabel yang digunakan menghasilkan pengujian empat hipotesis. Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara langsung maupun menggunakan variabel moderasi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- a. Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sumber daya manusia, akan mengakibatkan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan *model of man* pada *Stewardship Theory* yang didasarkan pada *steward* (pelayan) yang memiliki tindakan kolektif atau berkelompok, bekerja sama dengan utilitas tinggi dan selalu bersedia untuk melayani.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, akan mengakibatkan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan. Temuan penelitian ini sejalan dengan salah satu asumsi dasar Teori *Stewardship* yaitu struktur berupa fasilitas dan pemberdayaan. Teori ini menggunakan struktur yang memfasilitasi

dan memberdayakan, bahwa pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat memfasilitasi dan memberdayakan optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah guna menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Kemudian *Technology Acceptance Model* (TAM) menambahkan bahwa penerimaan seorang individu atas teknologi informasi yang berikan kepadanya akan dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan dalam penggunaannya (*perceived ease of use*).

- c. Efektifitas pengelolaan aset daerah merupakan variabel moderator antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian mengungkapkan nilai koefisien jalur bertanda positif sehingga efektifitas pengelolaan aset daerah memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menggunakan pendekatan *governance* atas dasar sosiologi dan psikologi yang telah dirancang untuk para peneliti dalam mengevaluasi situasi dimana manajemen sebagai *stewards* (pelayan) bisa termotivasi dalam bekerja sesuai dengan kemauan *principal* dan organisasi.
- d. Efektifitas pengelolaan aset daerah merupakan variabel moderator antara pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian mengungkapkan nilai koefisien jalur bertanda positif sehingga efektifitas pengelolaan aset daerah memperkuat pengaruh efektifitas pengelolaan aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan, kesimpulan serta keterbatasan penelitian, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh baik secara langsung maupun dengan dimoderasi oleh efektifitas pengelolaan aset daerah sebagai variabel moderasi terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu diharapkan bahwa pemerintah Kabupaten variabel Polewali Mandar dapat

- memberikan tupoksi kepada pegawainya sesuai dengan kompetensinya masing-masing.
- b. Diharapkan juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk memperhatikan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan serta pengelolaan aset daerah yang digunakan dapat menghasilkan informasi yang jelas dan akurat. Hal ini yang diharapkan akan meminimalisir kesalahan atau kekeliruan pengelolaan keuangan dan aset daerah pemerintah Kabupaten Polewali Mandar guna terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).
 - c. Peneliti membatasi variabel yang digunakan hanya pada dua variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan efektifitas pengelolaan aset daerah sebagai variabel moderasi. Sementara variabel lain yang juga berkaitan, tidak digunakan dalam penelitian ini sehingga perlu penelitian lebih lanjut.

REFERENSI

- Arens, Alvin A, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*, Edisi Keduabelas. Alih Bahasa: Herman Wibowo. Jilid 1. Jakarta. Erlangga
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Cohen, Daniel A. 2003. *Quality of Financial Reporting Choice: Determinants and Economic Consequences*.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi II. Jakarta. Indeks
- Dermawan, Joko. 2016. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja*

- Kementerian Negara/Lembaga Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Tesis. Unsyiah. Banda Aceh*
- Evicahyani, Sagung Inten. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan*. Universitas Udayana. Denpasar.
- Evira, Agnes. 2016. *Pengaruh Manajemen Aset Daerah Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menurut PP No. 71 Tahun 2010 dan PSAP No. 07 (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Grobogan)*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Structural Equation Modeling Metode Alternative dengan Partial Least Square*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haliah. 2013. *Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Faktor Yang Memengaruhinya*. Disertasi. Makassar: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Halim, Abdul & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, Ardi .2009. *Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura)*. Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi. UGM. 3.
- Hanis, Muhammad Hasbi. 2012. *A Public Asset Management Framework For Indonesian Local Governments*. Disertasi. Queensland University of Technology. Australia.
- Hastings, Nicholas A.J. 2010. *Physical Asset Management*. Melbourne: Springer.
- Japhet, Amos Nsanganzele & Jagero Nelso. 2011. *The Level of Factors that Contribute Towards Efficiency, Effectiveness and Strength of the Internal Control System (ICSs) with Regard to Non-Current Assets Safeguard and Management in Public Institution in Tanzania*. International Journal of

- Academic Research in Business and Social Science. October 2011, Vol. I No. 3, 109-117.
- Kaganova, O. & McKellar, J. 2006. *Managing Government Property Assets: International Experiences*. The Urban Institute Press 2006, Washington, DC
- Kieso and Weygandt, Jerry J and Donald E and Kimmel, Paul D. 2007. *Accounting Principles Pengantar Akuntansi*. Edisi Ketujuh. Jakarta Penerbit Salemba Empat.
- Kuasa, Nadirsyah dan Sukriy Abdullah. 2016. *Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan, Regulasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue*. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. pp 47 – 56.
- Mahmudi. 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Erlangga
- Mainar. 2016. *Pengaruh Sistem pengendalian Intern, Pemahaman Regulasi dan Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset (Studi pada SKPK Kabupaten Aceh Jaya)*. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Mansur, Much. and Mochammad , Ridwan and M.Rusdi, M.Rusdi (2014) *Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Pengelolaan Aset Tetap Milik Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)*. Universitas Bengkulu.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Martono dan Agus Harjito. 2010. *Manajemen Keuangan*. (Edisi 3) Yogyakarta: Ekonisia.
- Nurmandi, Achmad. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta. PT. Sinergi Visi Utama.
- Ouertani, Mohamed Zied, Ajith Kumar Parlikad dan Duncan Mcfarlane. 2008. *Towards an Approach to Select an Asset Information Management Strategy*. International Journal of Computer Science and Applications. Vol. 5, No. 3b: 25-44.
- Pekei, Beni, Djumilah Hadiwidjojo dan Sumiati Djumahir. 2014. *The Effectiveness Of Local Asset Management (A Study On The Government Of Jayapura)*. International Journal of Business and Management

Invention ISSN (Online) : 2319 – 8028, ISSN (Print): 2319 – 801X.
www.ijbmi.org. Volume 3 Issue 3. March. 2014. PP.16-26

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik daerah

Podrug, N. 2011. *The Strategic Role Of Managerial Stewardship Behaviour For Achieving Corporate Citizenship*. Ekonomski Pregled, Vol. 62 (7-8).

Prapto, Susilo. 2010. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sragen). Tesis. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Sekaran, U., 2006. *Research Methods for Business*. Terjemahan Yon, Kwan, Jakarta: Salemba Empat.

Sholeh, Ch. dan Rochmansjah, H. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokus media. Bandung.

Solimun, Achmad, Adji. R. F, Nurjannah. 2017. *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS*. Malang : UB Press.

Sutarman. 2013. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta. PT. Bumi Aksara

Sutrisno, Heru. 2016. Peningkatan Manajemen Aset Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan, Dengan Optimalisasi Aset Tetap Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Kabupaten Jepara. Universitas Muria Kudus.

Syahrini, S. 2015. *Pengaruh Inventarisasi Aset, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Takalar*. Tesis. Makassar : Universitas Hasanuddin.

- Tangke John Gamara, Halim dan Gina Lucita. 2015. *Pengaruh Optimalisasi Manajemen Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar*. Jurnal Administrasi Negara, Volume 21 Nomor 1, April 2015/ 1 – 5. STIA LAN Makassar.
- Yunita. 2016. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Palopo)*. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Zwell, Michael. 2000. *Creating a Culture of Competence*. New York: John Wiley & Sons, Inc

CHAPTER 4

PENGARUH AKUNTABILITAS, INDEPENDENSI DAN TEKANAN WAKTU TERHADAP KUALITAS HASIL AUDIT PADA KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN MAJENE

Musafir Perkasa¹

Herminawaty Abubakar²

Muhtar Sapiri³

^{1,2,3}Program Studi Magister Manajemen, Universitas Bosowa

Email: perkasa_musafir@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, independensi dan tekanan waktu terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat Kabupaten Majene. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengamatan bersifat potong lintang. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner sebanyak 51 eksamplar kepada auditor JFA atau JFP-2-UPD, dan atau pemeriksa lain yang berpengalaman memeriksa lebih dari dua tahun. Dari 51 eksamplar tersebut yang dikembalikan dan dinyatakan sah sebanyak 51 responden. Data dianalisis dengan menggunakan bantuan Software Statistic Program Service Solution (SPSS) versi 17 untuk windows, yaitu program komputer yang khusus dibuat untuk mengelolah data secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit, independensi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit, dan tekanan waktu berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat kabupaten Majene.

Kata kunci: akuntabilitas, independensi, tekanan waktu, kualitas audit.

A. PENDAHULUAN

Tuntutan dimasa demokrasi seperti saat ini, pemerintah dituntut untuk semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap pengelolaan dana

keuangan negara. Pemerintah yang berkompeten dalam menjalankan tugas sebagai fungsi pengawasan intern yang handal dan sistem pengendalian intern yang baik pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk pelaksanaan pemerintahan yang menjamin pelaksanaan kegiatan dapat merata keseluruh sektor publik serta telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Inspektorat sebagai internal audit pemerintah dan merupakan sumber informasi yang penting bagi auditor eksternal (BPK) dan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, karena hasil audit yang berkualitas merupakan sumber informasi penting dalam memberikan keyakinan kepada pihak pemerintah, DPRD dan BPK. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, jika kualitas audit sektor publik rendah, kemungkinan memberikan pelanggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan resiko tuntutan hukum terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya (Atmawinata, 2014).

Kualitas audit harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas, dan ringkas mungkin. Kualitas audit harus mencakup: 1) pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan, 2) tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan, 3) hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan, dan rekomendasi, 4) tanggapan pejabat yang bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan, 5) pelaporan informasi rahasia apabila ada (Bastian, 2014:93).

Kualitas audit sangat penting dalam kegiatan audit, karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan hasil audit yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Zeyn (2014) Kualitas audit menurut De Angelo (1981), adalah sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Kualitas audit dalam sector publik, Government Accountability Office (GAO), mendefinisikan sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon, et al, 2005).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, yaitu seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Adriyani dan Hardi, 2013).

Adanya temuan material yang tidak ditemukan dan dilaporkan oleh auditor internal (APIP) namun ditemukan oleh auditor eksternal (BPK) pada instansi pemerintah menjadi salah satu alasan publik mempertanyakan kualitas audit yang dihasilkan oleh internal pemerintah yang berjalan dengan baik akan menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif, dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah pada waktu yang akan datang. Fungsi pengawasan intern dilakukan oleh APIP harus lebih diberdayagunakan dan dilaksanakan bersinergi dengan kebutuhan pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK demi tercapainya laporan keuangan yang lebih berkualitas dan lebih jauh lagi demi tercapainya good governance yang tercermin pada terwujudnya transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena yang terjadi pada pelaksanaan pemeriksaan internal oleh Inspektorat Kabupaten Majene yaitu: 1) Hasil temuan audit tidak dapat didiskusikan secara optimal oleh masing-masing auditor sehingga hasil laporan audit tidak optimal menjelaskan masalah-masalah yang spesifik untuk ditindaklanjuti oleh klien atau obyek pemeriksaan, 2) Auditor Inspektorat dalam pemeriksaannya tidak memperhatikan laporan hasil tahun-tahun sebelumnya baik yang dibuat oleh Inspektorat sendiri maupun oleh BPK sehingga keadaan tersebut terbawah-bawah pada pelaporan tahun anggaran berikutnya. Ini terbukti pada pelaporan aset pemerintah kabupaten selalu menjadi sorotan oleh BPK, 3). Hasil laporan pemeriksaan

auditor Inspektorat yang diberikan kepada Bupati tidak dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh masing-masing pengguna anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah. Keadaan ini menyebabkan kesalahan-kesalahan selalu terbawah pada pelaporan keuangan tahun berikutnya.

Penelitian mengenai akuntabilitas pernah dilakukan oleh Diani dan Ria (2007), meneliti tentang akuntabilitas seseorang terhadap kualitas pekerjaan, yang mengungkapkan bahwa akuntabilitas yang dimiliki oleh seorang auditor dapat meningkatkan proses kognitif auditor dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini keputusan audit yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Kemudian Elisha dan Icut (2010) yang meneliti tentang akuntabilitas yang dilihat dari tiga aspek yaitu motivasi, pengabdian pada profesi dan kewajiban sosial juga berpengaruh terhadap kualitas audit baik secara parsial maupun simultan. Selanjutnya Aji (2010), meneliti tentang faktor yang mempengaruhi kualitas audit ditinjau dari persepsi auditor atas akuntabilitas, penelitian tersebut memberi hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit. Selain itu, variabel akuntabilitas yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap kualitas audit. Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Akuntabilitas pada penelitian Taufik Hidayat (2011), menggunakan dua indikator yaitu: Motivasi dan kewajiban sosial. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku

yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya.

Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Independensi merupakan sikap yang bebas dari pengaruh pihak lain secara intelektual, jujur dan obyektif dalam mempertimbangkan fakta dan opininya. Auditor dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dengan baik, dituntut untuk mempunyai hasil audit yang berkualitas. Sementara itu menurut Deis dan Groux (1992), bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Pelaksanaan audit seluruh auditor Inspektorat menggunakan Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 sebagai acuan. Standar umum dalam standar audit tersebut antara lain mengatur tentang independensi APIP. Standar umum tersebut menjelaskan tentang pentingnya independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan tugasnya yang berkaitan dengan audit. Hal ini mengandung arti bahwa independensi auditor diperlukan agar kualitas hasil pekerjaan auditor meningkat dan berkualitas.

Tidak mudah menjaga independensi yang melekat pada diri auditor. Alim dkk (2007), menyatakan bahwa kerjasama dengan obyek pemeriksaan yang terlalu lama dan berulang bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor. Belum lagi berbagai fasilitas yang disediakan obyek pemeriksaan selama penugasan dapat mempengaruhi auditor, serta bukan tidak mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukkan rendahnya independensi auditor

Dalam kegiatan audit, banyak auditor menghadapi kendala tentang batasan waktu yang sering diberikan untuk membuat laporan dengan waktu yang singkat. Adanya batasan waktu tersebut, auditor merasa adanya tekanan waktu dalam menemukan temuan audit sebagai bukti laporan audit. Tekanan waktu dapat menyebabkan penurunan kualitas audit, karena adanya *time budget pressure* dan *time deadline pressure*. *Time budget pressure* digunakan untuk menuntut auditor melakukan efisiensi waktu terhadap anggaran waktu yang telah disusun, hal ini terkait adanya pembatasan waktu. *Time budget pressure* berkaitan dengan kondisi dimana seorang auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya (Putra, 2012).

1. *Stewardship Theory* (Teori Pengelolaan)

Teori ini berdasarkan tingkah laku manusia (*behavior*), pola manusia (*model of a man*), mekanisme psikologi (motivasi, identifikasi dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peranan penting bagi sebuah pencapaian tujuan. Teori ini berakar dari ilmu psikologi dan sosiologi yang mengarah pada sikap melayani (Donaldson dan Davis, 1991). Teori ini bagaimana menciptakan struktur organisasi yang bisa membantu manajer untuk membuat keputusan serta pilihan-pilihan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*.

Teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan keinginan prinsipal. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerjasama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional, karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Donaldson (1991), mengemukakan *stewardship theory* bahwa auditor sebagai agen dari prinsipal yang bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat (prinsipal). Teori ini dianalogkan dimana pimpinan (eksekutif) tidaklah termotivasi untuk tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada kepentingan organisasi dan bertindak sesuai keinginan prinsipal (rakyat). Mengacu pada teori ini perilaku *steward* adalah kolektif, sebab *steward* berpedoman pada perilaku dimana tujuan organisasi dapat tercapai, *stewardship theory* mengasumsikan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan prinsipal.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Inspektorat Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, menghasilkan kualitas audit yang diamanahkan kepadanya, sehingga pelayanan publik dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *steward* mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya untuk dapat menghasilkan kualitas audit.

2. Teori Atribusi

Atribusi menurut Newstrom & Davis (1993), merupakan suatu proses dimana orang menafsirkan dan menilai sebab-sebab bagi munculnya perilaku yang tampak dari diri mereka sendiri maupun perilaku orang lain (Wijono, 2010:72). Teori atribusi menjelaskan cara kita mempertimbangkan apakah disebabkan faktor internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah faktor yang kita yakini dibawah kontrol pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan faktor eksternal adalah apa yang kita bayangkan adalah situasi memaksa individu melakukannya (Wibowo, 2014:62).

Perilaku yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi dari diri individu yang bersangkutan. Sebagai contoh pengaruh internal yaitu pengetahuan, kemampuan, motivasi, dan usaha, jika seorang pimpinan berkata bahwa seorang auditor adalah kompeten, pimpinan tersebut kemungkinan tidak

hanya merasakan kompetensi itu tetapi juga memberikan kesempatan bagi auditor untuk menunjukkan kompetensi dalam tugasnya. Perilaku yang dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat eksternal dilihat sebagai hasil dari tekanan situasi atau keadaan tertentu yang memaksa seseorang melakukan perbuatan tertentu. Pengaruh perilaku seseorang inilah yang diyakini dapat membuat seorang auditor dapat berlaku independen atau sebaliknya. Misalnya pengaruh eksternal yaitu kondisi sosial, tidak jarang ditemui kasus auditor yang berlaku curang dengan jalan mau melakukan keinginan klien yang tidak benar hanya karena kompensasi yang diberikan klien lebih besar jika auditor memenuhi keinginan klien dibandingkan melaporkan apa sebenarnya yang terjadi (Wijono, 2010:75).

Baron dan Byrne (1984), berpendapat bahwa perilaku manusia disebabkan oleh faktor internal, faktor eksternal atau oleh kedua faktor tersebut, yaitu faktor internal dan eksternal secara bersama-sama. Menurut Kelley ada atribusi internal, atribusi eksternal dan kombinasi atribusi internal dan eksternal. Kelly menggunakan tiga determinan untuk menentukan perilaku tersebut, yaitu : pertama konsensus (*consensus*), yaitu bagaimana individu bereaksi bila dibandingkan dengan orang lain terhadap stimulus tertentu, misalnya bila seseorang berperilaku tertentu sedangkan orang lain tidak berbuat demikian maka dapat dikatakan bahwa konsensus orang yang bersangkutan rendah. Kedua konsistensi (*consistency*), yaitu bagaimana individu berperilaku atau bereaksi terhadap stimulus yang sama dalam situasi atau keadaan yang berbeda. Bila individu bereaksi dengan cara yang sama terhadap stimulus yang sama pada kesempatan berbeda, maka orang tersebut mempunyai konsistensi yang tinggi. Ketiga adalah kekhususan (*distinctiveness*), yaitu, bagaimana individu bereaksi terhadap stimulus atau situasi yang berbeda-beda. Bila seseorang memberikan reaksi yang sama terhadap stimulus yang berbeda-beda, maka dapat dikatakan orang yang bersangkutan mempunyai kekhususan yang rendah.

Dasar penggunaan teori atribusi pada penelitian ini adalah perilaku yang dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat eksternal dilihat sebagai hasil dari tekanan situasi atau keadaan tertentu yang memaksa seseorang

melakukan perbuatan tertentu. Pengaruh perilaku seseorang inilah yang diyakini dapat membuat seorang auditor dapat berlaku independen atau sebaliknya. Misalnya pengaruh eksternal yaitu kondisi sosial, tidak jarang ditemui kasus auditor yang berlaku curang dengan jalan mau melakukan keinginan klien yang tidak benar hanya karena kompensasi yang diberikan klien lebih besar jika auditor memenuhi keinginan klien dibandingkan melaporkan apa sebenarnya yang terjadi.

3. Teori Sikap (*Theory of attitudes*)

Berkowitz (1972), menemukan adanya lebih dari tiga puluh definisi sikap. Puluhan definisi ini pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah-satu di antara tiga kerangka pemikiran sebagai berikut ini: "Kelompok pemikiran yang pertama diwakili oleh Louis Thurstone (1928), Rensis Likert (1932), dan Charles Osgood".

Menurut mereka, sikap sebagai suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut. Secara spesifik diformulasikan sikap sebagai derajat efek positif atau efek negatif terhadap suatu objek psikologis.

Kelompok pemikiran kedua diwakili oleh Chave (1928), Bogardus (1931), LaPiere (1934), Mead (1934), dan Gordon Allport (1935). Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon.

Kelompok pemikiran ketiga adalah kelompok yang berorientasi pada skema triadik (*triadic scheme*). Menurut kerangka pemikiran ini, sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi satu sama lain dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek. Secord & Backman (1964), mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran

(kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya” (Azwar, 2015:4).

Sikap merupakan sebagai suatu respons evaluatif. Respons hanya akan timbul apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual. Respons evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang dinyatakan sebagai sikap itu timbulnya didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik-buruk, positif-negatif, menyenangkan-tidak menyenangkan, yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap (Azwar, 2015:15).

Sikap terdiri dari komponen kognitif, merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap. Komponen afektif, merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional, dan komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Mann (1969), menjelaskan bahwa komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan *stereotype* yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Komponen afektif, merupakan perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin akan mengubah sikap seseorang. Komponen perilaku, merupakan tendensi atau sesuatu kecenderungan untuk bertindak atau untuk bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu (Azwar, 2015:24).

Selanjutnya dijelaskan bahwa sikap mengandung tiga komponen, yaitu: kognitif, afektif, dan konatif (Azwar, 2015:5). Pengaruh sikap seseorang inilah yang diyakini dapat membuat seorang pimpinan dapat merespon konsisten/stabil pada komitmen untuk mempercayai tugas dan tanggung jawab bawahan. Sebaliknya, bawahan perlu memiliki sifat yang akuntabel dan menjaga sikap yang independen.

4. Path-Goal Theory

Path-goal theory didasarkan pada gagasan *expectancy theory of motivation* dengan meningkatkan usaha akan meningkatkan kinerja dan harapan akan

hasil meningkat. Karena itu perilaku pemimpin diharapkan dapat diterima ketika pekerja memandang sebagai sumber kepuasan atau menyiapkan jalan pada kepuasan di waktu yang akan datang. Perilaku pemimpin diperkirakan bersifat motivasional apabila : a) menurunkan hambatan yang mencampuri pencapaian tujuan, b) memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan pekerja, c) mengikat *reward* pada pencapaian tujuan (Wibowo, 2014:279).

House (1971), berpendapat teori *path-goal* adalah teori yang menyatakan bahwa tugas pemimpin untuk membantu anggotanya dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memberi arah dan dukungan atau keduanya yang dibutuhkan untuk menjamin tujuan mereka sesuai dengan tujuan kelompok atau organisasi secara keseluruhan. Teori ini menjelaskan dampak perilaku pemimpin pada motivasi bawahan, kepuasan dan kinerjanya. Motivasi inilah yang akan membuat seseorang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, berkomitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. Sehingga dengan demikian kompetensi yang seharusnya ada dalam diri seorang auditor untuk melakukan pekerjaan profesionalitasnya juga akan meningkat, seiring dengan adanya motivasi pencapaian tujuan untuk meningkatkan kualitas audit yang diberikan.

5. Kualitas Audit

De Angelo (1981), mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada system akuntansi *auditee*. Sedangkan Deis dan Groux (1992), menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. *AAA Financial Accounting Commite* (2000), menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh 2 (dua) hal yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Persepsi pengguna laporan keuangan atas

kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor, sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar *auditing* dan standar pengendalian mutu.

Beberapa penelitian seperti De Angelo (1981); Goldman dan Barlev (1974); Nichols dan Price (1976), umumnya mengasumsikan bahwa auditor dengan kemampuannya akan dapat menemukan suatu pelanggaran dan kuncinya adalah auditor tersebut harus independen.

De Angelo (1981), berargumentasi bahwa kualitas audit secara langsung berhubungan dengan ukuran dari perusahaan audit, dengan proksi untuk ukuran perusahaan audit adalah jumlah klien. Perusahaan audit yang besar adalah dengan jumlah klien yang lebih banyak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan audit yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan audit yang kecil. Karena perusahaan audit yang besar jika tidak memberikan kualitas audit yang tinggi akan kehilangan reputasinya, dan jika ini terjadi maka dia akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan kehilangan klien.

Laporan hasil audit adalah sarana mengomunikasikan hasil audit kepada pemakai laporan secara tertulis. Para pemakai laporan mengharapkan informasi yang akurat dan objektif yang akan digunakan dalam melaksanakan fungsi bidang masing-masing (BPKP, 2009:148). Hal ini sejalan pendapat Adriyani dan Hardi (2013), bahwa kualitas hasil audit adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil audit dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip laporan audit harus mampu menyakinkan manajemen, memberikan peringatan kepada manajemen, memberikan saran kepada manajemen dan mendukung langkah perbaikan yang dibuat manajemen

(BPKP, 2009:149). Kualitas audit harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, menyakinkan, serta jelas dan ringkas mungkin. (BPKP, 2009:155).

Standar pemeriksaan keuangan negara nomor 3 alinea 24 menyatakan definisi kualitas audit yaitu :“Laporan hasil audit yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan”.

Cara yang paling efektif untuk menjamin bahwa suatu laporan hasil audit telah dibuat secara wajar, lengkap, dan obyektif adalah dengan mendapatkan revidi dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa. Tanggapan atau pendapat dari pejabat yang bertanggung jawab tidak hanya mencakup kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan, atau tidak ketidakpatutan yang dilaporkan oleh pemeriksa, tetapi juga tindakan perbaikan yang direncanakan. Pemeriksa harus memuat komentar pejabat tersebut dalam laporan hasil auditnya. Pemeriksa harus meminta pejabat yang bertanggung jawab untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap temuan, simpulan, dan rekomendasi, termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh manajemen entitas yang diperiksa. Tanggapan yang diperoleh harus dievaluasi secara seimbang dan obyektif. Tanggapan yang berupa suatu janji atau rencana untuk tindakan perbaikan tidak boleh diterima sebagai alasan untuk menghilangkan temuan yang signifikan atau rekomendasi yang berkaitan.

Apabila tanggapan dari entitas yang diperiksa bertentangan dengan temuan, simpulan, atau rekomendasi dalam laporan hasil audit dan menurut pemeriksa, tanggapan tersebut tidak benar atau apabila rencana tindakan perbaikannya tidak sesuai dengan rekomendasi, maka pemeriksa harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan dan rencana tindakan perbaikan tersebut beserta alasannya. Ketidaksetujuannya tersebut harus disampaikan secara seimbang dan obyektif. Sebaliknya, pemeriksa

harus memperbaiki laporannya apabila pemeriksa berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar (AAIPI, 2013:38).

6. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan organisasi, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Pengertian akuntabilitas menurut Lawton dan Rose dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam

pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris.

Prinsip akuntabilitas menuntut 2 (dua) hal, yaitu : 1) kemampuan menjawab dan 2) konsekuensi. Komponen pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah digunakan dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan.

Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Akuntabilitas, sebagai salah satu prasyarat dari penyelenggaraan negara yang baru, didasarkan pada konsep organisasi dalam manajemen, yang menyangkut :

- a) Luas kewenangan dan rentang kendali (span of control) organisasi.
- b) Faktor-faktor yang dapat dikendalikan (controllable) pada level manajemen atau tingkat kekuasaan tertentu.

Pengendalian sebagai bagian penting dari masyarakat yang baik saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa pengendalian tidak dapat berjalan dengan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik, demikian pula sebaliknya.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasi secara jelas.

7. Independensi

Independensi merupakan keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi, 2002:26). Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Independen berarti mandiri atau tidak tergantung pada sesuatu yang lain atau tidak bias dalam bersikap. Auditor yang independen akan memungkingkan yang bersangkutan bersikap objektif. (BPKP, 2009:12). Standar Profesi Akuntan Publik 1999 seksi 220 PSA No.04 Alinea 2, dijelaskan bahwa: "Independensi itu berarti tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bilamana tidak demikian halnya, bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya."

Independensi memiliki tiga dimensi, yaitu independensi dalam membuat program, independensi dalam melakukan pemeriksaan dan independensi dalam membuat laporan. Independensi dalam membuat program meliputi bebas dari campur tangan dan perselisihan dengan *auditee* yang dimaksudkan untuk membatasi, menetapkan dan mengurangi berbagai bagian audit; bebas dari campur tangan dengan atau suatu sikap yang tidak kooperatif yang berkaitan dengan prosedur yang dipilih dan

bebas dari berbagai usaha yang dikaitkan dengan pekerjaan audit untuk *me-review* selain dari yang diberikan dalam proses audit.

Independensi dalam melakukan pemeriksaan meliputi akses langsung dan bebas terhadap semua buku, catatan, pejabat, dan karyawan serta sumber-sumber yang berkaitan dengan kegiatan, kewajiban dan sumber daya yang diperiksa; kerjasama yang aktif dari pimpinan yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan; bebas dari berbagai usaha pihak diperiksa untuk menentukan kegiatan pemeriksaan atau untuk menentukan dapat diterimanya suatu bukti dan bebas dari kepentingan dan hubungan pribadi yang mengakibatkan pembatasan pengujian atas kegiatan dan catatan.

Independensi dalam membuat laporan meliputi bebas dari berbagai perasaan loyal atau kewajiban untuk mengurangi dampak dari fakta-fakta yang dilaporkan; pengabaran penggunaan yang sengaja atau tidak sengaja dari bahasa yang mendua dalam pernyataan fakta, pendapat dan rekomendasi serta dalam penafsirannya dan bebas dari berbagai usaha untuk menolak pertimbangan auditor sebagai kandungan yang tepat dari laporan audit, baik dalam hal yang faktual maupun opininya (Halim dan Ikkal, 2012:72).

Sehubungan dengan hal tersebut, independensi auditor dapat ditinjau dan dievaluasi dari dua sisi yaitu independensi praktisi dan independensi profesi. Secara lengkap hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, (BPKP, 2008:47) :

Independensi Praktisi, yakni independensi yang nyata atau faktual yang diperoleh dan dipertahankan oleh auditor dalam seluruh rangkaian kegiatan audit, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pelaporan. Independensi dalam fakta ini merupakan tinjauan terhadap kebebasan yang sesungguhnya dimiliki oleh auditor, sehingga merupakan kondisi ideal yang perlu diwujudkan oleh auditor. Apabila auditor sungguh-sungguh memiliki kebebasan demikian, maka independensi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit dapat terpenuhi.

Independensi Profesi, yakni independensi yang ditinjau menurut citra (*image*) auditor dari pandangan publik atau masyarakat umum terhadap

auditor yang bertugas. Independensi menurut tinjauan ini seringpula dinamakan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Independensi menurut tinjauan ini sangat krusial karena tanpa keyakinan publik bahwa seorang auditor adalah independen, maka segala hal yang dilakukannya serta pendapatnya tidak akan mendapatkan penghargaan dari publik atau pemakainya. Agar independensi menurut tinjauan penampilan ini dapat memperoleh pengakuan publik, maka cara yang efektif untuk mewujudkannya adalah dengan menghindari segala hal yang dapat menyebabkan penampilan auditor dalam kaitannya dengan kliennya mendapat kecurigaan dari publik.

Kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor (internal maupun eksternal) berhubungan langsung dengan pemeriksaan dan salah satu elemen pengendali mutu yang penting adalah independensi. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan sikap seseorang untuk bertindak jujur, tidak memihak, dan melaporkan temuan-temuan hanya berdasarkan bukti yang ada.

8. Tekanan Waktu

Tekanan waktu adalah suatu kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Tekanan Anggaran Waktu adalah bentuk tekanan yang muncul dari keterbatasan pada sumber daya untuk melakukan dan menyelesaikan tugas audit dimana auditor dituntut melakukan efisiensi pada anggaran waktu. Sumber daya yang terbatas untuk berbagai situasi, termasuk masalah profitabilitas, keterbatasan personil dan kendala biaya. Penerapan Time Budget Pressure yang dilakukan dengan baik dapat memberikan keuntungan yang sangat efisien untuk melakukan penjadwalan staff, menjadi panduan dalam melakukan hal-hal penting dari berbagai area audit, membantu staff auditor untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Keberadaan time pressure memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secepatnya sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan prosedur audit seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya

bila prosedur audit dilakukan dalam kondisi tanpa time pressure. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil (Lestari,2010).

Berikut ini beberapa pengertian Time Budget Pressure dari beberapa sumber buku:

- a) Menurut Nirmala dan Cahyonowati (2013), Time Budget Pressure adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku.
- b) Menurut Alderman dkk (1990), Time Budget Pressure adalah suatu bagian dari perencanaan yang digunakan auditor yang menetapkan panduan dalam satuan waktu jam untuk setiap seksi dari audit. Jumlah jam harus dialokasikan dengan persiapan skedul kerja yang menunjukkan siapa yang melaksanakan serta apa dan berapa lama hal tersebut dilakukan. Kemudian total jam tersebut dianggarkan pada kategori utama di prosedur audit dan disusun dalam bentuk skedul mingguan.
- c) Menurut Herningsih (2006), Time budget pressure adalah keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat.
- d) Menurut Rahayu dan Suhayati (2010), Time budget pressure adalah suatu audit disusun dengan memprediksi waktu yang dibutuhkan pada setiap tahap dalam program audit untuk berbagai tingkat auditor dan menjumlahkan prediksi tersebut, yaitu dengan mengestimasi jumlah jam yang dibutuhkan oleh setiap level staf dan mengestimasi *out of pocket cost*.

9. Pengertian Audit

Auditing didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi

dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah didapatkan (Arens dan Loebbecke, 1997:1). Sedangkan, audit pada sektor publik didefinisikan sebagai suatu proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik (Bastian, 2014:4).

Pengertian audit menurut Mulyadi (2002:9), bahwa audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Mulyadi (2002:9), menyebutkan beberapa unsur-unsur audit: (1) Suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi, (2) Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, (3) Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, (4) Menetapkan tingkat kesesuaian (5) Kriteria yang telah ditetapkan, (6) Penyampaian hasil (atestasi), (7) Pemakai yang berkepentingan.

Audit dibagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut. Pertama, audit laporan keuangan (*financial audit*), merupakan audit yang menjamin sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Kedua, audit kepatuhan (*compliance audit*), merupakan audit yang memverifikasi/memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. Ketiga, audit kinerja (*performance audit*), merupakan perluasan dari audit keuangan dalam tujuan dan prosedurnya (Halim dan Ikbal, 2012:65).

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan penelitian adalah pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) untuk memastikan hubungan sebab akibat dan untuk memastikan independensi dari beberapa variabel. Penelitian ini menggunakan *investigation type* yang bersifat kausalitas, yaitu yang menunjukkan arah hubungan antar variabel berdasarkan konstruksi model penelitian. Pengamatan bersifat *cross section* di mana informasi atau data yang diperoleh adalah hasil pengumpulan data yang dilakukan pada satu waktu tertentu. Penulis menggunakan desain (rancangan) penelitian ini untuk memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh akuntabilitas, independensi dan tekanan waktu terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat Kabupaten Majene.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Majene yang berjumlah 51 orang. Alasan pemilihan populasi tersebut karena perannya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Majene yang senantiasa menjalankan tugas secara terpadu, berkala, dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengendalian internal di seluruh Desa se Kabupaten Majene.

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, dengan kriteria sampel yang dipilih adalah :

(1) Auditor yang memiliki sertifikat atau pernah melalui ujian sertifikasi JFA, atau (2) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD), atau (3) PNS selain auditor JFA dan JFP2UPD yang sudah sering melakukan pemeriksaan dengan pengalaman minimal dua tahun melaksanakan pekerjaan pemeriksaan (audit) agar lebih memahami proses kerja dalam pemeriksaan (audit).

Tabel 3.1 Rincian Sampel Penelitian

No.	Responden	Jumlah	Persentase
1.	Jabatan Fungsional Auditor	24	47
2.	Jabatan Fungsional P2UPD	11	21,6
3.	Lainnya	16	31,4
Total		51	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2019

3. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

a. Variabel Penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai sebagai berikut :

1. Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam menemukan variabel yang mempengaruhinya (Sekaran, 2013:116). Variabel dependennya adalah kualita hasil saudit (Y).
2. Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat (Sekaran, 2013:117). Variabel independennya adalah akuntabilitas (X_1), independensi (X_2) dan tekanan waktu (X_3)

b. Defenisi Operasional

Dalam definisi operasional variabel ada dua yang diteliti yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dalam membuat penelitian ini peneliti perlu memberikan gambaran dan batasan dari variabel yang menjadi pembahasan nanti. Setelah variabel-variabel diklasifikasi dan diidentifikasi maka variabel-variabel tersebut perlu didefenisikan secara operasional. Hal ini perlu karena defenisi operasional akan menunjuk alat pengambil data mana yang cocok untuk digunakan. Penjelasan defenisi operasional untuk masing-masing variabel dan indikatornya adalah sebagai berikut :

1). Kualitas Audit (Y)

Kualitas Audit adalah jumlah respon yang benar yang diberikan oleh auditor intern pemerintah dalam penyelesaian kegiatan audit (pemeriksaan)

yang dibandingkan dengan standar audit intern pemerintah atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Kualitas Audit APIP diukur dengan 10 (sepuluh) item pernyataan yang diturunkan dari 2 (dua) indikator yaitu: 1) kesesuaian pemeriksaan dengan standar Audit, dan 2) kualitas laporan hasil pemeriksaan. Pernyataan tersebut menggambarkan persepsi auditor intern terhadap kesesuaian audit dengan standar audit intern mulai dari proses audit, hasil audit, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (audit) APIP, yang diadopsi dari penelitian Sukriah dkk (2009), dengan beberapa modifikasi berdasarkan SAIPI dan SPKN. Responden diberikan pernyataan tentang persepsi mereka yang diukur dengan skala *likert 5 point*.

2). Akuntabilitas (X_1)

Akuntabilitas adalah dorongan psikologi atau kewajiban yang mana bisa mempengaruhi auditor untuk mempertanggungjawabkan tindakannya serta dampak yang ditimbulkan akibat tindakannya tersebut kepada lingkungan dimana auditor tersebut melakukan aktifitasnya. Pertanggungjawaban individu tidak hanya berfokus pada tindakan dan keputusan yang diambil tetapi juga atas dampak yang ditimbulkan akibat tindakan dan keputusan yang diambil. Ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas auditor yaitu : 1) motivasi, 2) kewajiban sosial 3) pegabdian pada profesi (Feni dan Yohanes, 2012 dan Taufik, 2011).

3). Independensi (X_2)

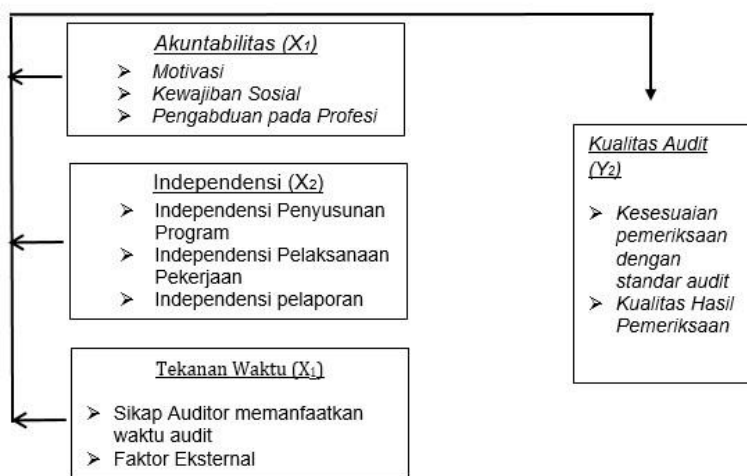
Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggungjawab audit intern secara objektif. Independensi APIP diukur dengan 9 (sembilan) item pernyataan berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu: 1) independensi penyusunan program, 2) independensi pelaksanaan pekerjaan, dan 3) independensi pelaporan. Pernyataan-pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana independensi auditor mulai dari penyusunan program audit, pelaksanaan pekerjaan, sampai pada pelaporan (kesimpulan dan rekomendasi) yang diadopsi dari penelitian Sukriah dkk (2009), dengan

beberapa modifikasi berdasarkan SAIPI dan SPKN. Responden diberikan pernyataan tentang persepsi mereka yang diukur dengan menggunakan skala *likert 5 point*.

4) Tekanan Waktu

Konsep variabel takanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan lisensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu yang sangat ketat atau kaku, Andini (2011). Tekanan Waktu diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu 1) Sikap auditor memanfaatkan waktu audit, 2) Faktor eksternal.

Berdasarkan definisi operasional tersebut di atas, maka model penelitian dan pengukuran variabel yang dirancang dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Model Penelitian dan Pengukuran Variabel

4. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data penelitian menggunakan instrumen berupa kuesioner. Kuesioner berisi sejumlah pernyataan yang dikembangkan dari kisi-kisi instrumen. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab (Sekaran, 2014:82).

Model skala yang digunakan adalah Skala Likert, dengan 5 (lima) butir respon, yaitu dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Penskoran dilakukan dengan cara sangat setuju diberi skor 5 dan sangat tidak setuju diberi skor 1. Penskoran secara lengkap adalah Sangat Setuju (5), Setuju (4), Ragu-ragu (3), Tidak Setuju (2) dan Sangat Tidak Setuju (1) bilamana pernyataan bersifat positif (*favorable*). Sebaliknya bilamana pernyataan bersifat negatif (*unfavorable*), maka penskorannya adalah Sangat Setuju (1), Setuju (2), Ragu-ragu (3), Tidak Setuju (4) dan Sangat Tidak Setuju (5). Skala Likert yang digunakan memiliki skala/ukuran data interval mengingat antar kategori jawaban (1-5) adalah *equally space* (jarak yang sama), sehingga data memenuhi skala ukur interval

Evaluasi secara kuantitatif terhadap kuisisioner yang telah dirancang dilakukan dengan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali, 2013:52), sedangkan menurut (Indriantoro dan Supomo, 2002), hasil penelitian valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Uji validitas dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi terkoreksi antara skor indikator dengan skor total untuk masing-masing variabel. Instrumen penelitian (indikator) dikatakan valid jika memiliki koefisien korelasi terkoreksi $r \geq 0,30$ (Indriantoro dan Supomo, 2002). Ghozali (2013:47) menyatakan instrumen reliabel adalah jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Reliabilitas kuisisioner diuji dengan metode internal konsistensi, dilakukan dengan menghitung koefisien *Alpha Cronbach*. Instrumen penelitian berupa kuisisioner setiap variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai $\alpha \geq 0,70$ (Ghozali, 2013:48).

5. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Sumber Data primer adalah data yang diambil dari lapangan (*enumerator*) yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan kusioner (Sani, 2010:191) dan sumber sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh instansi terkait/atau pihak lain). Sumber data primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini diperoleh dari kusioner yang diberikan kepada seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten Majene. Data yang didapat berupa jawaban Aparat Inspektorat Kabupaten Majene Aparat Inspektorat Kabupaten Majene pada pernyataan tentang pengaruh akuntabilitas, independensi dan tekanan waktu terhadap kualitas hasil audit pengelolaan dana desa. Dalam data sekunder ini peneliti mengambil data dari jurnal, buku, internet yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah sejarah atau latar belakang instansi dan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Majene.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengisi kuesioner dan melakukan wawancara langsung secara terstruktur kepada beberapa responden. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh sampel yaitu Jabatan Fungsional Auditor (JFA), atau Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) atau PNS selain JFA dan JFP2UPD yang telah memiliki pengalaman sebagai pemeriksa lebih dari 2 (dua) tahun yang berjumlah 51 orang.

Kuesioner disusun dalam skala likert yang didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 (lima) titik/point. Jawaban diberi skor dengan menggunakan 5 (lima) point skala likert. Pilihan jawaban dan skor penelitian yang digunakan untuk setiap pertanyaan/pernyataan adalah skor 1 (satu) untuk jawaban sangat tidak setuju (STS), skor 2 (dua) untuk jawaban tidak setuju (TS), skor 3 (tiga)

untuk jawaban Netral (N), skor 4 (empat) untuk jawaban setuju (S), dan skor 5 (lima) untuk jawaban sangat setuju (SS).

Daftar pertanyaan/pernyataan (kuesioner) dalam penelitian ini disusun dengan mengacu kepada struktur operasional variabel penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya direkapitulasi dalam bentuk *coding sheet* yang disusun secara *cross sectional* selanjutnya diolah dan dianalisis.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Software Statistic Program Service Solution* (SPSS) versi 17 untuk windows, yaitu program komputer yang khusus dibuat untuk mengelolah data secara statistik.

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan suatu metode statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen dan menggunakan nilai-nilai variabel independen yang telah diketahui untuk meramalkan nilai variabel dependen. Persamaan dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Kualitas Hasil Audit

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Independensi

X_3 = Tekanan Waktu

a = Koefisien konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi

e = Error / tingkat kesalahan

b. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan untuk mengetahui validitas dan konsistensi instrument yang digunakan dalam penelitian. Uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reliabilitas.

1) Uji Validitas

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur kuesioner adalah validitas isi (*content validity*). Content validity merupakan salah satu konsep pengukuran validitas dimana suatu instrumen dinilai memiliki *content validity* jika mengandung butir-butir pernyataan yang memadai dan representatif untuk mengukur construct sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 dengan kriteria jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item-item pernyataan yang terdapat dalam instrument berkorelasi signifikan terhadap skor total, maka instrumen atau item-item pernyataan dikatakan tidak valid (Rosadi, 2016).

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas alat penelitian adalah ketepatan atau keajekan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya kapanpun alat penilaian tersebut akan digunakan akan memberikan hasil relatif yang sama (Taniredja & Mustafidah, 2014 : 135). Instrumendipercaya jika jawaban dari responden atas pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji ini dilakukan dengan metode *cronbach alpha*. Cara mengukur reliabilitas dengan *Cronbach Alpha* dengan kriteria lebih dari 0,7 reliabel (Ghozali, 2013).

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji ini dilakukan guna mengetahui apakah nilai residu (perbedaan yang ada) yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak normal. Nilai residu yang berdistribusi kalau digambarkan akan berbentuk lonceng (Wibowo, 2012:61). Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Kolmogrov Smirnov* yang menggunakan kriteria uji normalitas dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) dari hasil uji tersebut. Data akan berdistribusi normal apabila $Sig > 0,05$.

2) Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi dikemukakan adanya korelasi antara variabel bebas (Independen) (Ghozali, 2013). Dengan menghitung nilai *tolerance* dan *Variance Factor* (VIF). Persamaan regresi baru dapat digunakan jika terjadi linear dari masing-

masing variabel bebas. Suatu regresi dikatakan terdeteksi multikolonieritas apabila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menjauhi 1 (satu) atau angka *tolerance* menjauhi 1 (satu) pada *Output coefficient*. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai (VIF) diatas 10, maka dikatakan terjadi multikolinearitas dan sebaliknya apabila nilai VIF < 10 maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homokedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Untuk memenuhi asumsi heteroskedastitas atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian akan dilakukan dengan dilihat melalui uji glejser. Apabila sig $\geq 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

a. Deskriptif Berdasarkan Jenis Kelamin

Deskripsi berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 : Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi (%)
Laki – Laki	32	63
Perempuan	19	37
Jumlah	51	100

Pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden jenis kelamin terbanyak pada laki-laki berjumlah 32 orang atau 63 %, sedangkan sisanya 19 orang atau 37 % dipenuhi oleh jenis kelamin perempuan. Artinya sebagai besar responden yang mengisi kuesioner adalah laki-laki.

b. Deskriptif Berdasarkan Umur

Deskripsi berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 : Umur

Usia	Frekuensi	Presentasi (%)
20-30 Tahun	0	0
31-45 Tahun	29	57
46-55 Tahun	18	35
Lebih dari 55 Tahun	4	8
Jumlah	51	100

Pada tabel 3.4 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan usia terbesar berada pada responden berusia 31-45 tahun sebanyak 29 orang atau 57%. Responden yang berusia 46-55 tahun sebanyak 18 orang atau 35%. Kemudian responden yang berusia lebih dari 55 tahun sebanyak 4 orang atau 8%. Sedangkan responden berusia 20-30 tahun tidak ada (0%).

c. Deskriptif Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Deskripsi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 : Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi (%)
SLTA	8	16
D3	0	0
S1	27	53
S2	16	31
S3	0	0
Jumlah	51	100

Pada tabel 3.5 dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan terbesar berada responden S1 sebanyak 27 orang atau 53%, responden yang tingkat pendidikan SLTA sebanyak 8 orang atau 16%, responden yang tingkat pendidikan S2 sebanyak 16 orang atau 31%. Dari

51 Responden. Sedangkan responden yang tingkat pendidikan D3 dan S3 tidak ada (0%).

2. Deskriptif Variabel

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengaruh akuntabilitas, independensi dan tekanan waktu terhadap kualitas hasil audit inspektorat Kabupaten Majene pada pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu Akuntabilitas (X1), Independensi (X2), dan Tekanan Waktu (X3). Sedangkan Kualitas Audit (Y) adalah sebagai variabel dependennya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari aparat Inspektorat Kabupaten Majene dan Data Sekunder yang diperoleh dari hasil hitungan program SPSS Versi 26 For Windows melalui hasil jawaban pegawai yang diberikan melalui koesioner.

a. Akuntabilitas (X1)

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Deskripsi terhadap variabel akuntabilitas, dilakukan dari hasil jawaban responden mengenai pertanyaan indikator-indikator variabel akuntabilitas dengan nilai rata-rata sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tanggapan Responden atas Akuntabilitas

Indikator	Jawaban					Jumlah
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
1. Motivasi						
X1.1	9 (17,64%)	33 (64,7%)	6 (11,76%)	2 (3,92%)	1 (1,96%)	51 (100%)
X1.2	13 (25,49%)	24 (47,05%)	8 (15,68%)	4 (7,84%)	2 (3,92%)	51 (100%)
X1.3	14 (29,41%)	19 (37,25%)	10 (19,6%)	5 (9,8%)	3 (5,88%)	51 (100%)
X1.4	16 (31,37%)	21 (41,17%)	9 (17,64%)	4 (7,84%)	1 (1,96%)	51 (100%)
X1.5	12 (23,52%)	26 (50,98%)	9 (17,64%)	2 (3,92%)	2 (3,92%)	51 (100%)
X1.6	16 (31,37%)	22 (43,13%)	9 (17,64%)	2 (3,92%)	2 (3,92%)	51 (100%)
Rata-rata	26,46%	47,38%	7,51%	6,2%	3,59%	100%
2. Kewajiban Sosial						
X1.7	15 (29,41%)	25 (49,01%)	9 (17,64%)	2 (3,92%)	0	51 (100%)
X1.8	20 (39,21%)	21 (41,17%)	8 (15,68%)	1 (1,96%)	1 (1,96%)	51 (100%)
X1.9	19 (37,25%)	25 (49,01%)	7 (13,72%)	0	0	51 (100%)
Rata-rata	35,29%	46,39%	15,68%	1,96%	0,65%	100%
3. Pengabdian pada profesi						
X1.10	28 (54,9%)	20 (39,21%)	2 (3,92%)	1 (1,96%)	0	51 (100%)
X1.11	22 (43,13%)	16 (31,37%)	9 (17,64%)	3 (5,88%)	1 (1,96%)	51 (100%)
X1.12	26 (50,98%)	20 (39,21%)	3 (5,88%)	2 (3,92%)	0	51 (100%)
X1.13	20 (39,21%)	19 (37,25%)	8 (15,68%)	3 (5,88%)	1 (1,96%)	51 (100%)
X1.14	19 (37,25%)	22 (43,13%)	5 (9,8%)	4 (7,84%)	1 (1,96%)	51 (100%)
X1.15	19 (37,25%)	23 (45,09%)	4 (7,84%)	3 (5,88%)	2 (3,92%)	51 (100%)
Rata-rata	43,78%	39,21%	10,12%	5,22%	3,26%	100%
Total Rata-rata X1	35,15%	43,91%	13,85%	4,96%	2,22%	100%

Sumber: Hasil dari pengolahan data primer, 2020

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai akuntabilitas, kebanyakan responden memberikan jawaban setuju dengan rata-rata 43,91%.

b. Deskripsi variabel independensi auditor

Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggungjawab audit intern secara objektif.

Deskripsi terhadap variabel independensi auditor dilakukan dari hasil jawaban responden mengenai pertanyaan indikator-indikator independensi auditor dengan nilai rata-rata sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden atas Variabel Independensi Auditor

Indikator	Jawaban					Jumlah
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
1. Independensi penyusunan program						
X2.1	18 (35,29%)	33 (64,7%)	6 (11,76%)	3 (5,88%)	1 (1,96%)	51 (100%)
X2.2	14 (25,92%)	29 (56,86%)	5 (9,8%)	1 (1,96%)	2 (3,92%)	51 (100%)
X2.3	18 (35,29%)	27 (52,94%)	3 (5,88%)	2 (3,92%)	1 (1,96%)	51 (100%)
Rata-rata	32,16%	58,16%	9,14%	3,92%	2,61%	100%
2. Independensi pelaksanaan pekerjaan						
X2.4	11 (21,56%)	31 (60,78%)	5 (9,8%)	3 (5,88%)	1 (1,96%)	51 (100%)
X2.5	12 (23,52%)	29 (56,86%)	7 (13,72%)	2 (3,92%)	1 (1,96%)	51 (100%)
X2.6	11 (21,56%)	33 (64,7%)	4 (7,84%)	2 (3,92%)	1 (1,96%)	51 (100%)
Rata-rata	22,21%	60,78%	10,45%	4,57%	1,96%	100%
3. Independensi pelaporan						
X2.7	15 (29,41%)	29 (56,86%)	4 (7,84%)	2 (3,92%)	1 (1,96%)	51 (100%)
X2.8	20 (39,21%)	21 (41,17%)	8 (15,68%)	1 (1,96%)	1 (1,96%)	51 (100%)
X2.9	20 (39,21%)	19 (37,25%)	8 (15,68%)	3 (5,88%)	1 (1,96%)	51 (100%)
Rata-rata	35,94	45,09%	13,06%	3,92%	1,96%	100%
Rata-rata X2	30,10%	54,68%	10,01%	4,13%	2,17%	100%

Sumber: Hasil dari pengolahan data primer, 2020

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai akuntabilitas, kebanyakan responden memberikan jawaban setuju dengan rata-rata 54,68%.

c. Deskripsi variabel tekanan waktu

Konsep variabel tekanan anggaran waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan lisensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu yang sangat ketat atau kaku.

Deskripsi mengenai tekanan waktu akan diuraikan berdasarkan jawaban responden mengenai tekanan waktu dalam setiap indikator yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tanggapan Responden atas Tekanan Waktu

Indikator	Jawaban					Jumlah
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
1. Sikap auditor memanfaatkan waktu audit						
X3.1	16 (31,37%)	21 (41,17%)	9 (17,64%)	4 (7,84%)	1 (1,96%)	51 (100%)
X3.2	12 (23,52%)	26 (50,98%)	9 (17,64%)	2 (3,92%)	2 (3,92%)	51 (100%)
X3.3	20 (39,21%)	19 (37,25%)	8 (15,68%)	3 (5,88%)	1 (1,96%)	51 (100%)
X3.4	20 (39,21%)	58 (44,62%)	11 (8,46%)	1 (1,96%)	1 (1,96%)	51 (100%)
X3.5	28 (54,9%)	20 (39,21%)	2 (3,92%)	1 (1,96%)	0	51 (100%)
X3.6	20 (39,21%)	21 (41,17%)	8 (15,68%)	1 (1,96%)	1 (1,96%)	51 (100%)
Rata-rata	37,9%	42,4%	16,64%	3,92%	1,96%	100%
2. Faktor eksternal						
X3.7	28 (54,9%)	20 (39,21%)	2 (3,92%)	1 (1,96%)	0	51 (100%)
X3.8	20 (39,21%)	19 (37,25%)	8 (15,68%)	3 (5,88%)	1 (1,96%)	51 (100%)
X3.9	19 (37,25%)	22 (43,13%)	5 (9,8%)	4 (7,84%)	1 (1,96%)	51 (100%)
Rata-rata	43,78%	39,86%	9,8%	5,22%	1,3%	100%
Rata-Rata X3	39,86%	41,55%	13,04%	4,35%	1,74%	100%

Sumber: Hasil dari pengolahan data primer, 2020

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai kepuasan kerja, kebanyakan responden memberikan jawaban setuju dengan rata-rata 41,55%
d. Deskripsi variabel kualitas audit

Kualitas Audit adalah jumlah respon yang benar yang diberikan oleh auditor intern pemerintah dalam penyelesaian kegiatan audit (pemeriksaan) yang dibandingkan dengan standar audit intern pemerintah atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Berikut disajikan deskripsi kualitas audit yang digambarkan dari jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan mengenai indikator pengukuran variabel kualitas audit.

Tabel 4.7

Tanggapan Responden atas Variabel Kualitas Audit APIP

Indikator	Jawaban					Jumlah
	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)	
1. Kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit						
Y1	19 (37,25%)	25 (49,01%)	7 (13,72%)	0	0	51 (100%)
Y2	28 (54,9%)	20 (39,21%)	2 (3,92%)	1 (1,96%)	0	51 (100%)
Y3	20 (39,21%)	19 (37,25%)	8 (15,68%)	3 (5,88%)	1 (1,96%)	51 (100%)
Y4	20 (39,21%)	21 (41,17%)	8 (15,68%)	1 (1,96%)	1 (1,96%)	51 (100%)
Y5	15 (29,41%)	19 (37,25%)	10 (19,6%)	5 (9,8%)	2 (3,92%)	51 (100%)
Rata-rata	39,99%	40,77 %	13,72%	3,92%	1,56%	100%
2. Kualitas laporan hasil pemeriksaan						
Y6	16 (31,37%)	21 (41,17%)	9 (17,64%)	4 (7,84%)	1 (1,96%)	51 (100%)
Y7	11 (21,56%)	33 (64,7%)	4 (7,84%)	2 (3,92%)	1 (1,96%)	51 (100%)
Y8	15 (29,41%)	29 (58,86%)	4 (7,84%)	2 (3,92%)	1 (1,96%)	51 (100%)
Y9	18 (35,29%)	23 (45,09%)	6 (11,76%)	3 (5,88%)	1 (1,96%)	51 (100%)
Y10	14 (27,45%)	29 (58,86%)	5 (9,8%)	1 (1,96%)	2 (3,92%)	51 (100%)
Rata-rata	29,01%	53,73%	10,97%	4,70%	2,35%	100%
Rata-rata Y	34,50%	47,25%	12,34%	4,31%	1,96%	100%

Sumber: Hasil dari pengolahan data primer, 2020

Berdasarkan dari tanggapan responden mengenai kinerja pegawai, kebanyakan responden memberikan jawaban setuju dengan rata-rata 47,25%.

3. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Validasi

Pengujian validasi data dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan alat ukur dapat mengungkapkan gejala atau kejadian yang di ukur. Validasi konstruk dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *bivariate person (korelasi product momen person)*, dimana menurut Sugiono (2016) adalah cara yang dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing item dengan nilai total penjumlahan keseluruhan item yang diolah menggunakan program SPSS, dimana dikatakan valid apabila memiliki nilai *corrected item total correlation* melebihi atau di atas dari 0,30.

Secara statistik angka korelasi yang diperoleh harus diuji terlebih dahulu untuk menyatakan apakah nilai korelasi yang dihasilkan signifikan

atau tidak. Jika angka korelasi yang diperoleh di bawah atau kurang dari 0,30 maka pernyataan tersebut tidak valid atau tidak konsisten dengan pernyataan yang lain, sedangkan apabila di atas atau melebihi dari 0,30 berarti indikator yang digunakan sudah valid.

Untuk hasil lengkap dari uji validasi atas gaya kepemimpinan, motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Validasi

Variabel	Corrected Item-Total Correlation	Nilai r Standar	Keterangan	Interpretasi
X1.1	0,442	0,30	> 0,30	Valid
X1.2	0,418	0,30	> 0,30	Valid
X1.3	0,305	0,30	> 0,30	Valid
X1.4	0,455	0,30	> 0,30	Valid
X1.5	0,434	0,30	> 0,30	Valid
X1.6	0,425	0,30	> 0,30	Valid
X1.7	0,462	0,30	> 0,30	Valid
X1.8	0,371	0,30	> 0,30	Valid
X1.9	0,416	0,30	> 0,30	Valid
X1.10	0,486	0,30	> 0,30	Valid
X1.11	0,356	0,30	> 0,30	Valid
X1.12	0,367	0,30	> 0,30	Valid
X1.13	0,346	0,30	> 0,30	Valid
X1.14	0,546	0,30	> 0,30	Valid
X1.15	0,401	0,30	> 0,30	Valid
X2.1	0,576	0,30	> 0,30	Valid
X2.2	0,558	0,30	> 0,30	Valid
X2.3	0,437	0,30	> 0,30	Valid
X2.4	0,604	0,30	> 0,30	Valid
X2.5	0,739	0,30	> 0,30	Valid
X2.6	0,590	0,30	> 0,30	Valid
X2.7	0,370	0,30	> 0,30	Valid
X2.8	0,365	0,30	> 0,30	Valid
X2.9	0,309	0,30	> 0,30	Valid
X3.1	0,413	0,30	> 0,30	Valid
X3.2	0,412	0,30	> 0,30	Valid
X3.3	0,598	0,30	> 0,30	Valid
X3.4	0,529	0,30	> 0,30	Valid
X3.5	0,471	0,30	> 0,30	Valid
X3.6	0,529	0,30	> 0,30	Valid
X3.7	0,471	0,30	> 0,30	Valid
X3.8	0,598	0,30	> 0,30	Valid
X3.9	0,465	0,30	> 0,30	Valid
Y1	0,493	0,30	> 0,30	Valid
Y2	0,431	0,30	> 0,30	Valid
Y3	0,324	0,30	> 0,30	Valid
Y4	0,472	0,30	> 0,30	Valid
Y5	0,537	0,30	> 0,30	Valid
Y6	0,495	0,30	> 0,30	Valid
Y7	0,448	0,30	> 0,30	Valid
Y8	0,451	0,30	> 0,30	Valid
Y9	0,492	0,30	> 0,30	Valid
Y10	0,417	0,30	> 0,30	Valid

Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

Dari tabel uji validasi diatas, tergambarakan variabel akuntabilitas, independensi, tekanan waktu terhadap kualitas audit memiliki nilai corrected item total correlation yang lebih besar dibandingkan dengan r

standar. Sehingga dapat disimpulkan bahwan semua indikator atau koesioner yang digunakan pada setiap variabel valid.

b. Uji Realibilitas

Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui apakah indikator atau kuesioner yang digunakan dapat dipercaya atau handal sebagai alat ukur variabel. Realibilitas suatu indikator atau kuesioner dapat dilihat dari nilai *cronbach's alpha* (α), dimana menurut Sugiono (2016) bahwa suatu konstruk atau indikator dikatakan realibel yaitu apabila nilai *cronbach's alpha* (α) lebih besar ($>$) 0,60 maka indikator atau kuesioner adalah realible, sedangkan apabila nilai *cronbach's alpha* (α) lebih kecil ($<$) 0,60 maka indikator atau kuesioner tidak realible. Secara keseluruhan uji realibilitas dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Realibilitas

Variabel	Cronbachs Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	Standar Realibilitas	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,711	0,778	0,60	Realibel
Independensi (X2)	0,627	0,759	0,60	Realibel
Tekanan Waktu (X3)	0,796	0,605	0,60	Realibel
Kualitas Audit (Y)	0,796	0,797	0,60	Realibel

Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

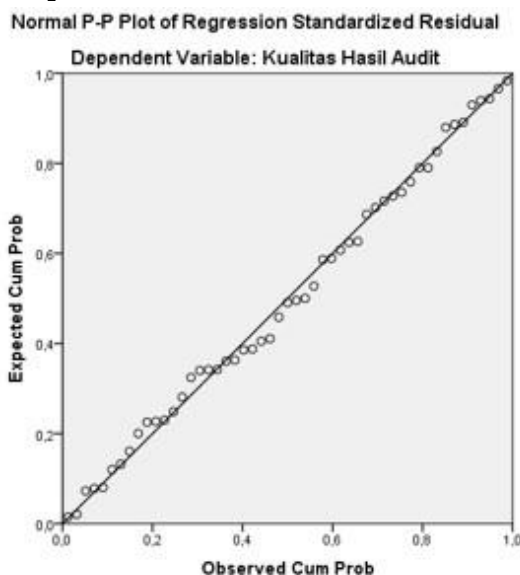
Nilai cronbach's alpha semua variabel yang ditunjukkan tabel diatas, yaitu gaya kepemimpinan, motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai lebih besar dari nilai standar realibilitas yaitu lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator atau koesioner semua variabel handal atau dapat digunakan sebagai alat ukur.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan sebagai syarat dalam menggunakan model regresi agar hasil regresi yang diperoleh merupakan estimasi yang tepat.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan distribusi pada grafik *P-P plot*. Berikut ini hasil uji normalitas menggunakan grafik *P-P Plot* menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 26:



Gambar 4.1
Grafik P-P Plot

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal pada grafik histogram, hal ini menunjukkan bahwa pola distribusi normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan grafik *P-P plot*, model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas berguna untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Cara mengetahui ada tidaknya penyimpangan uji multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan *VIF* masing-masing variabel independen, jika nilai *Tolerance* > 0.10 dan nilai *VIF* < 10, maka data bebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinieritas

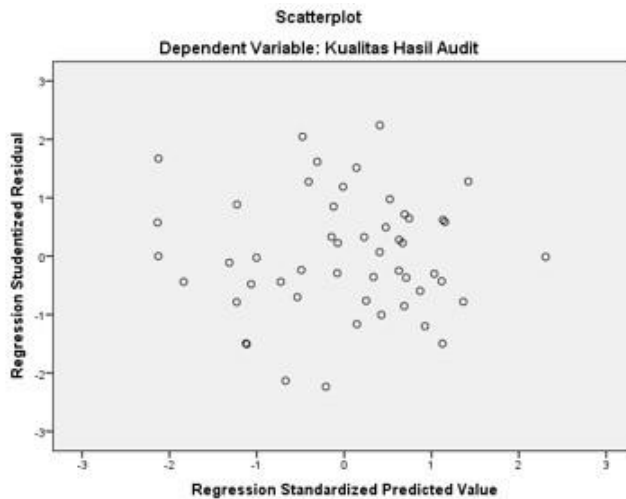
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4,790	4,244		1,129	,265		
Akuntabilitas	,165	,097	,213	1,697	,096	,438	2,282
Independensi	,480	,075	,581	6,439	,000	,846	1,181
Tekanan Waktu	-,228	,129	,233	1,765	,084	,397	2,521

a. Dependent Variable: Kualitas Hasil Audit

Melihat hasil pada tabel 4.9, hasil perhitungan nilai *Tolerance* tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0.10 dengan nilai *Tolerance* masing-masing variabel independen bernilai Akuntabilitas sebesar 0.438, Independensi sebesar 0.846, dan Tekanan Waktu sebesar 0.397. Sementara itu hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal serupa yaitu tidak adanya nilai VIF dari variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 dengan nilai VIF masing-masing variabel independen bernilai Akuntabilitas sebesar 2.282, Independensi sebesar 1.181, dan Tekanan Waktu sebesar 2.521. Merujuk hasil perhitungan nilai *Tolerance* dan VIF dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan melihat Grafik *Plot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu *ZPRED* dengan residualnya *SRESID*. Tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di antara angka 0 pada sumbu Y.



Gambar 4.2
Scatterplot

Berdasarkan gambar 4.2 di atas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik tersebut menyebar di antara angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi linear ada atau tidak korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ atau periode sebelumnya. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. Berikut hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.11
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,822 ^a	,676	,655	1,93472	1,755

a. Predictors: (Constant), Tekanan Waktu, Independensi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Kualitas Hasil Audit

Berdasarkan tabel 4.10 di atas nilai Durbin Watson sebesar 1.755, pembandingan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 51 (n), dan jumlah variabel independen 3 ($k=3$), maka di tabel *Durbin Watson* akan

didapat nilai du sebesar 1.42. Karena nilai DW 1.755 lebih besar dari batas atas (du) 1.67 dan kurang dari 4 – 1.42 (2.58), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

5. Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh akuntabilitas, independensi, tekanan waktu terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Majene, dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis dilakukan berdasarkan nilai dari standardized coefficients hasil regresi antara akuntabilitas, independensi, tekanan waktu terhadap kualitas audit.

Untuk lebih jelas akan disajikan hasil olahan data dengan menggunakan program *statistical package for the social sciences* (SPSS) antara akuntabilitas, independensi, tekanan waktu terhadap kualitas audit dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Olahan Data Regresi

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	4.790	4.244		31.129	.265
	Akuntabilitas	.165	.097	.213	7.697	.030
	Independensi	.480	.075	.581	6.439	.000
	Tekanan Waktu	-.228	.129	-.233	-6.765	.048

a. Dependent Variable: Kualitas Hasil Audit

Dari hasil olahan diatas, maka dimasukkan data pada rumus regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 4.790 + 0.165X_1 + 0.480X_2 + -0.228X_3$$

- 1) Konstanta (a) sebesar 4,790 artinya jika semua variabel bebas yaitu akuntabilitas, independensi, tekanan waktu memiliki nilai 0, maka kualitas audit (Y) memiliki nilai sebesar 4,790.
- 2) Koefisien regresi (b1) untuk variabel akuntabilitas (X1) sebesar 0,165; artinya jika akuntabilitas mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka

kualitas audit (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,165. Koefisien bernilai positif antara akuntabilitas dan kualitas audit.

- 3) Koefisien regresi (b2) untuk variabel independensi (X2) sebesar 0,480; artinya jika independensi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kualitas audit (Y) akan naik sebesar 0,480. Koefisien bernilai positif antara independensi dan kualitas audit.
- 4) Koefisien regresi (b3) untuk variable tekanan waktu (X3) sebesar -0,228, artinya jika tekanan waktu mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kualitas audit (Y) akan naik sebesar -0,228. Koefisien bernilai positif antara tekanan waktu dan kualitas audit.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara akuntabilitas, independensi, tekanan waktu terhadap kualitas audit pada kabupaten Majene dapat dilihat dari tabel berikut:

Table 4.13
Nilai Koefisien Determenasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.822 ^a	.676	.655	1.93472

a. Predictors: (Constant), Tekanan Waktu, Independensi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

Berdasarkan hasil analisis kolerasi yang dikutip pada table diatas, maka dapat dikatakan bahwa kolerasi atau hubungan antara variable akuntabilitas, independensi, tekanan waktu mempunyai hubungan yang cukup tinggi terhadap kualitas audit, karena diperoleh nilai koefisien kolerasi (r) sebesar 0,822.

Dari tabel koefisien determinasi di atas, diketahui Adjusted R square adalah 0,655 atau 65,5%. Hal ini berarti sumbangan pengaruh dari variabel independen yaitu akuntabilitas, independensi, tekanan waktu terhadap kualitas audit kabupaten Majene adalah 65,5% sedangkan sisanya 34,5%

dipengaruhi oleh variable-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

6. Pengujian Hipotesis

Pembuktian hipotesis yang di sajikan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji parsial (t) dan uji simultan (F) yang diuraikan sebagai berikut:

a. Uji Parsial (t)

Analisis uji parsial (t) dilakukan untuk membuktikan pengaruh signifikan antara variable independen (akuntabilitas, independensi, tekanan waktu) terhadap variable dependen (kualitas audit). Dengan melakukan perbandingan antara nilai t hitung (t_{hitung}) dan t tabel (t_{tabel}). Penunjukan diterimahnya hipotesis jika t hitung lebih besar dari t table ($t_{hitung} > t_{table}$), t table (t_{table}) diperoleh dari banyaknya observasi dikurang banyaknya variable yang digunakan ($n - k - 1$), yaitu $51 - 4 - 1 = 46$, maka diketahui t table adalah 2.01290 (2,019). Dimana derajat signifikan yang digunakan adalah lebih kecil $\alpha = 0,05$, artinya nilai signifikan harus lebih kecil dari derajat kepercayaan (α) atau probabilitas. Untuk hasil yang dikelola, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Uji t coefficient

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t hitung	t table	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	4.790	4.244	.213	31.130		.265	Hipotesa diterima
Akuntabilitas	.165	.097	.581	7.697	2,019	.030	Hipotesa diterima
Independensi	.480	.075	.233	6.439	2,019	.000	Hipotesa diterima
Tekanan Waktu	-.228	-.129		6.765	2,019	.048	Hipotesa diterima

a. Dependent Variable: Kualitas Audit

Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Akuntabilitas (X_1)

Terlihat pada tabel coefficient tersebut bahwa derajat signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan atau probabilitas ($\text{sig} < \alpha$) = $0,030 < 0,05$

maka hipotesis 1 diterima. Dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$) = $7,697 > 2,019$, Terlihat bahwa variabel X_1 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

2. Independensi (X_2)

Terlihat pada tabel coefficient tersebut bahwa derajat signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan atau probabilitas ($sig, < \alpha$) = $0,000 < 0,05$ maka hipotesis 2 diterima. Dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$) = $6,439 > 2,019$. Terlihat bahwa variabel X_2 memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_2 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

3. Tekanan Waktu (X_3)

Terlihat pada tabel coefficient tersebut bahwa derajat signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan atau probabilitas ($sig, < \alpha$) = $0,048 < 0,05$ maka hipotesis 3 diterima. Dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$) = $-6,765 > 2,019$, Terlihat bahwa variabel X_3 memiliki kontribusi terhadap Y, Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X_3 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tekanan waktu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit.

b. Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, Dalam penelitian ini variabel independen terdiri dari akuntabilitas (X_1), independensi (X_2), dan tekanan waktu (X_3), sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit (Y). Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau tidak, maka F hitung harus lebih besar dari F tabel ($F_{hitung} > F_{tabel}$) melalui $sig, \alpha = 0,05$. Untuk mengetahui nilai F tabel (F_{tabel}) dilakukan dengan melihat tabel titik persentase distribusi F

dengan probabilitas 0,05 dimana df_1 adalah $k - 1$ ($4 - 1$) = 3 dan df_2 adalah $n - k$ ($51 - 4$) = 47 sehingga diperoleh F tabel (F_{tabel}) = 2,90.

Hasil uji F antara akuntabilitas (X_1), independensi (X_2), dan tekanan waktu (X_3) terhadap kualitas audit (Y) dapat dilihat tabel anova hasil perhitungan dari SPSS sebagai berikut:

Tabel 4.15 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.249	3	.418	32.704	.000 ^b
	Residual	175.927	47	3.743		
	Total	543.176	50			

a. Predictors: (Constant), akuntabilitas, independensi, tekanan waktu

b. Dependent Variable: Kualitas audit

Sumber: Data primer tahun 2020 diolah melalui SPSS V.26

Untuk membuktikan Hipotesis penelitian yang telah diketahui sebelumnya dapat dilihat berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 32,704 dengan F tabel ditentukan sebesar 2,90. Maka dapat lihat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel ($F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$) = 32,704 > 2,90. Dengan demikian hipotesis 5 penelitian diterima, artinya variabel akuntabilitas, independensi dan tekanan waktu secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit kabupaten Majene.

Sementara itu berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa nilai probabilitas (Sig,) yang dihasilkan sebesar 0,000, Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05) diperoleh nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa dalam penelitian ini variabel akuntabilitas, independensi dan tekanan waktu secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, atau dapat dikatakan bahwa berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, diterima.

7. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini membahas tentang sejauh mana pengaruh akuntabilitas, independensi dan tekanan waktu terhadap peningkatan kualitas audit pada kabupaten Majene. Jenis penelitian ini adalah asosiatif, dimana dalam penelitian ini mencoba untuk menerawang hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis dalam penelitian ini, melihat hubungan akuntabilitas terhadap kualitas audit, hubungan independensi terhadap kualitas audit, hubungan tekanan waktu terhadap kualitas audit, dan hubungan ketiga variabel independen yaitu akuntabilitas, independensi dan tekanan waktu secara bersamaan terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit.

Penelitian ini mengambil sampel sebagai responden sebanyak 51 orang untuk menjadi alat ukur dengan berbagai karakteristik. Berdasarkan karakteristik tingkatan umur diketahui jumlah responden yang memiliki tingkatan umur antara 31 sampai 45 tahun sebanyak 29 orang dengan persentase 57%. Usia yang dianggap produktif karena mampu menyerap dan menerima hal yang baru serta memiliki semangat yang tinggi. Selanjutnya pada karakteristik tingkat pendidikan, pada tingkat strata satu (S1) memiliki angka yang lebih banyak yaitu 27 orang dengan persentase 53%. Tingkat pendidikan yang tinggi dianggap lebih produktif dalam melaksanakan dan memahami pekerjaannya. Karakteristik pada jenis kelamin jumlah laki-laki jauh lebih banyak yaitu sebesar 32 orang dengan persentase 63%. Umumnya laki-laki lebih produktif dibandingkan perempuan. Hal ini dikarenakan faktor fisik laki-laki jauh lebih besar dari pada perempuan, terutama bidang pekerjaan yang lebih menguras tenaga.

Pada analisis masalah selanjutnya dalam penelitian ini, mencoba mengetahui seberapa besar variabel akuntabilitas, independensi dan tekanan waktu berpengaruh pada variabel kualitas audit pada kabupaten Majene. Untuk menguji penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda, uji F atau uji simultan dan uji t atau uji parsial. Secara umum hasil penelitian ini memuaskan. Segala hipotesis yang

digambarkan diterima berdasarkan analisis hasil jawaban responden pada kabupaten Majene yang terkelola.

a. Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit

Dari hasil analisis persamaan regresi maka diperoleh hasil bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Majene. Dapat dikatakan bahwa indikator motivasi, kewajiban sosial, dan pengabdian pada profesi, membentuk akuntabilitas telah menjadi bukti empirik sebagai syarat peningkatan kualitas audit.

Hasil dari penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Singgih dan Bawono (2010) mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

b. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit

Dari hasil pengelolaan data regresi diperoleh hasil bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Majene. Dapat dikatakan bahwa indikator independensi penyusunan program, independensi pelaksanaan pekerjaan, dan independensi pelaporan, membentuk independensi telah menjadi bukti empirik sebagai syarat peningkatan kualitas audit.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tinangon (2012), yang melakukan penelitian pada Inspektorat di Sulawesi Utara untuk menguji motivasi dan independensi auditor terhadap hasil audit auditor Inspektorat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan independensi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap hasil audit. Implikasi atas temuan ini yaitu auditor Inspektorat yang tidak bertindak independensi terhadap pelaksanaan audit akan berdampak pada laporan hasil auditnya.

c. Pengaruh Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Audit

Tekanan waktu terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Majene memiliki hasil berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini berdasarkan hasil yang ditunjukkan melalui analisis persamaan regresi. Artinya bahwa makin besar tekanan waktu, maka makin besar pula penurunan kualitas audit yang dapat terjadi. Dapat dikatakan bahwa sikap auditor memanfaatkan waktu audit dan faktor eksternal menjadi indikator tekanan waktu dalam meningkatkan kualitas audit. Artinya dalam tekanan waktu terdapat suatu kecenderungan untuk melakukan tindakan seperti mengurangi prosedur audit yang dibutuhkan, mengurangi ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti audit yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas audit.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirmala (2013) menjelaskan dalam tekanan waktu terdapat suatu kecenderungan untuk melakukan tindakan seperti mengurangi prosedur audit yang dibutuhkan, mengurangi ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti audit yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas audit.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan atas hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Majene. Artinya akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Independensi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Majene. Artinya auditor Inspektorat yang tidak bertindak independensi terhadap pelaksanaan audit akan berdampak pada laporan hasil auditnya..

- c. Tekanan waktu terhadap kualitas audit memiliki hasil berpengaruh secara negatif dan signifikan, bahwa makin besar tekanan waktu, maka makin besar pula penurunan kualitas audit yang dapat terjadi. Artinya dalam tekanan waktu terdapat suatu kecenderungan untuk melakukan tindakan seperti mengurangi prosedur audit yang dibutuhkan, mengurangi ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti audit yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Majene.

2. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan penelitian, direkomendasikan beberapa saran kepada penelitian berikutnya yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas audit Inspektorat, yaitu :

- a. Inspektorat Kabupaten Majene haruslah memperkuat timnya melalui peningkatan akuntabilitas dengan menjaga motivasi aparat pengawasnya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya serta memperhatikan fungsinya dalam kewajiban sosial dan pengabdian dalam profesi sehingga dapat memperoleh kualitas audit sesuai yang diharapkan.
- b. Pola penungasan aparat Inspektorat dalam melakukan audit, sebaiknya dilakukan oleh auditor yang sudah berpengalaman dan dipandang mempunyai pengetahuan yang memadai. Apabila diberikan pada auditor junior sebaiknya didampingi oleh minimal seorang auditor, dengan maksud untuk menjaga kualitas dan kredibilitas hasil audit di mata para pengguna informasi laporan keuangan, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada junior auditor untuk menambah pengalaman dan pengetahuannya sebagai auditor. Disamping itu, harus dilakukan telaah hasil pemeriksaan auditor untuk menjamin bahwa pemeriksaan dan bentuk independensi khususnya indikator penyusunan program yang dilakukan telah sesuai dengan standar audit dan kode etik yang berlaku dan berkualitas.
- c. Manajemen Inspektorat Kabupaten Majene, agar kualitas audit berkualitas seperti yang diharapkan perlu membangun kemampuan

- aparatus pengawasan dalam memanfaatkan waktu audit dan faktor eksternal dalam mengendalikan tekanan waktu.
- d. Peneliti selanjutnya hendaknya menghindari pengambilan data disaat para responden sedang sibuk melaksanakan tugas pengauditan (pemeriksaan), sehingga proses wawancara untuk mendukung data kuesioner dapat dilakukan. Selain itu kemungkinan adanya jawaban asal-asalan dapat dihindari.
 - e. Bagi auditor intern dalam lingkup Aparatus Pengawasan Intern Pemerintahan di daerah khususnya Inspektorat Kabupaten Majene agar memperhatikan indikator-indikator pembentuk akuntabilitas, independensi, tekanan waktu dan juga kualitas audit yang telah terbukti secara empirik berpengaruh terhadap peningkatan kualitas audit.

REFERENSI

- AAA Financial Accounting Standard Committee. 2000. *Response to the SEC Concepts Release on International Accounting Standards*. Journal American Accounting Association Accounting Horizons, Vol. 14, No. 4, Hal. 489-499.
- Allen, J.N., and Meyer, J. P. 1990. *The Measurement and Antecedents of affective, Continuance and Normative Commitment to The Organization*. Journal of Occupational Psychology. Vol. 63, No. 1, Pp 1-18.
- Arens, A. A., dan Loebbecke, J.K. 1997. *Auditing (Edisi 2)*. Diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Arens, A. A., dan Loebbecke, J.K. 2003. *Auditing: Suatu Pendekatan Terpadu (Edisi Indonesia)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. 2013. *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. 2014. *Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta.
- Azwar, S. 2015. *Sikap Manusia (Edisi 2)*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

- Badjuri, A. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi terhadap Kualitas Audit Auditor Independen pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah*. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan. Vol. 3, No. 2, Hal. 183-197.
- Baron, R. A., and Byrne, D. 1984. *Social Psychology: Understanding Human Interaction Fourth Edition*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Bastian, I. 2014. *Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan (Edisi 3)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Boynton, W. C., Johnson, R. N., and Kell, W. G. 2006. *Modern Auditing*, 8th Edition. USA; Richard D. Irwin Inc.
- BPK. 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*. Jakarta: BPK.
- BPKP. 2008. *Kode Etik dan Standar Audit (Edisi 5)*. Jakarta: Pusdiklat BPKP.
- BPKP. 2009. *Auditing (Edisi 5)*. Jakarta: Pusdiklat BPKP.
- BPKP. 2011. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Pusdiklatwas BPKP.
- Cahyat, A. 2004. *Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten*. Jakarta: Center For International Forestry Research.
- Carcello, J. V., Hermanson, R.H. and McGrath, N.T. 1992. *Audit Quality Attributes: The Perceptions of Audit Partners, Prepares, and Financial Statement Users*. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol. 11, No. 1, Hal. 1-15.
- DeAngelo, L.E. 1981. *Auditor Size and Audit Quality*. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 3, pp 183-199.
- Deis, D.R., dan Giroux, G.A. 1992. *Determinants of Audit Quality in the Public Sector*. *Journal The Accounting Review*, Vol. 67, No. 3, Pp. 462-479.
- Donaldson, L., and Davis, J. H. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Return*. *Australian Journal of Management*, Vol. 16, No. 1, pp 49-65.
- Ferdinand, 2002. *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen; Aplikasi Model-Model Rumit dalam Penelitian untuk Tesis Magister dan Disertasi Doctor (Edisi 2)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program (Edisi 7)*. Semarang. Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Goldman, A., and Barlev, B. 1974. *The Auditor-Firm Conflict of Interests: Its Implications for Independence*. The Accounting Review, Vol. 49, No. 4, pp. 707-718.
- Hair, Jr., J.F., R.E Anderson, R.L. Tatham and W.C. Black. 2006. *Multivariate Data Analysis with Reading*. Macmillan Pub. Company. New York.
- Hair, J.F. J, Lack, W.C., Babin, B.J., Anderson, R. E., and Tathan, R. L. 2008. *Multivariate Data Analysis (6th ed)*. New York:Pearson Prentice Hall.
- Hartono, J., dan Abdillah, W. 2009. *Konsep Dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris (Edisi 1)*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Hartono, J. 2011. *Konsep Dan Aplikasi Structural Equation Modeling Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis (Edisi 1)*. Yogyakarta: Penerbit STIM YKPN.
- Hartono, J. 2013. *Metodelogi Penelitian Bisnis (Edisi 5)*. Yogyakarta: Penerbit BPFE UGM.
- Hooper, D., Coughlan, J., and Mullen, M. 2008. *Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit*. *Elektronik Journal of Business Research Methods*. Vol 6, No. 1, pp. 53-60.
- IAI. 2001. *Standar Profesi Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- IAI. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. 1999. *Metodelogi Penelitian Bisnis (Edisi 2)*. Jogjakarta: BPFE UGM.
- Jaafar, H.T. R dan Sumiyati. 2005. *Kode Etik dan Standar Audit, Diklat Pembentukan Auditor Terampil*. *Jurnal Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP*.
- Kalbers, L. P., and Fogarty, T. J. 1995. *Professionalism Its Consequences Study: A Study of internal Auditors*. *Auditing: Journal of Practive*. Vol. 14, No. 1, pp 64-86.
- Kouzes., J. M., and Posner, B. Z. 2011. *Credibility, How Leader gains and Lose it, Why People Deman it*. Jossey-Bases, Inc.
- Lavin, D. 1976. *Perceptions of the Independence Auditor*. The Accounting Review. Vol. 51, No. 1, pp 41-50.

- Lowenshon, S., Johnson E.L., dan Elder, J.R. 2005. *Auditor Specialization and Perceived Audit Quality, Auditee Satisfaction, and Audit Fees in the Local Government Audit Market*. Departement of Accounting Colorado State University, No. 970, Hal. 491-748.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 2). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mautz, R.K., and Sharaf, H.A. 1993. *The Philosophy of Auditing*. American Accounting Association.
- Mayangsari, S. 2003. *Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Sebuah Kuasieksperimen*. The Indonesian Journal of Accounting Research, Vol. 6, No. 1, hal.1-22.
- Mulyadi. 2002. *Auditing* (Edisi 6). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nichols, D, R., and Price, K, H. 1976. *The Auditor-Firm Conflict: An Analysis Using Concepts of Exchange Theory*. The Accounting Review, Vol. 51, No. 2, Pp 335-346.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & RB.
- Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Ruland, R.G., and Lindblom. C., K. 1992. *Ethic and Disclosure: An Analysis of Conflicting Duties*. Critical Perspectives on Accounting. Vol. 3, pp 259-272.
- Salehi, M. 2010. *Reliability of Listed Companies on Tehran Stock Exchange*. Review of International Comparative Management. Vol. 11, No. 5, pp 940-960.
- Samelson, D., Lowensohn, S. and Johnson, L. E. 2006. *The Determinants of Perceived Audit Quality and Auditee Satisfaction in Local Government*. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Vol. 2, No. 18, Hal. 139-166.

- Sapariyah, R. A. 2012. *Pengaruh Good Governance dan Independensi Auditor terhadap Kinerja Auditor dan Komitmen Organisasi*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan, Vol. 19, No.16. Hal, 11-33.
- Sekaran, U. 2013. *Metodelogi Penelitian untuk Bisnis (Edisi 4)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sekaran, U. 2014. *Metode Penelitian untuk Bisnis (Edisi 4)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Singgih, E. M., dan Bawono, I. R. 2010. *Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Profesional Care dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit*. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XIII, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Soekrisno, A. 2004. *Auditing, Pemeriksaan Akuntansi oleh Akuntan Publik (Edisi 3)*. Jakarta: Penerbit LPFE-UI.
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasional (Edisi 1)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Stemple, J. J. D. 2004. *Job Satisfaction of High School Principals in Virginia*. Dissertation Faculty of Virginia of Polytechnic Institute and State University. Blacksburg, Virginia.
- Theodore, O.S. 2014. *Optimalisasi Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara*. Disertasi. Makassar: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Ulum, I. 2009. *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi 1)*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Wibowo. 2014. *Perilaku dalam Organisasi (Edisi 1)*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.

CHAPTER 5

ANALISIS TINGKAT FRAUD DANA DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Desa Bana, Kecamatan Bontocani)

Tahir¹

Thamrin Abduh²

Seri Suriani³

^{1,2,3}Program Studi Magister Manajemen, Universitas Bosowa

Email: tahirakbar5@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dan manfaat yang dirasakan masyarakat setelah adanya program dana desa serta untuk mengetahui pengaruh tingkat fraud dana desa terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat pada desa tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat cukup besar, dimulai dari perencanaan program kerja sampai dengan pelaksanaan program kerja dilaksanakan sesuai dengan aturan penggunaan dana desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Masyarakat setiap Dusun. Adapun manfaat yang dirasakan masyarakat cukup banyak karena semua Program Kerja yang dilaksanakan berdasarkan dengan permintaan Masyarakat setempat. Sedangkan hasil dari analisis tingkat fraud terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat ditemukan tidak signifikan. Meskipun keterlibatan masyarakat cukup besar dan manfaat yang dirasakan masyarakat cukup banyak sehingga mengurangi terjadinya fraud namun hal itu tidak berpengaruh terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: Keterlibatan, Manfaat, Fraud, Efektivitas, Masyarakat, Desa

A. PENDAHULUAN

Setiap Tahun Pemerintah mengeluarkan anggaran ribuan triliun dana untuk keperluan belanja negara. Anggaran yang dikeluarkan secara

umum dialokasikan dalam tiga bagian pokok yaitu untuk Kementrian/Lembaga, untuk Non Kementrian/Lembaga dan untuk Tansfer ke Daerah dan Dana Desa. Sesuai data Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama lima tahun terakhir, Total Dana yang telah dikeluarkan Pemerintah sebanyak Rp 10.897,5 Triliun sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Anggaran yang paling rendah selama 5 tahun terakhir ini adalah Rp 2.039,5 Triliun yaitu pada Tahun 2015, sedangkan angka yang tertinggi selama 5 Tahun terakhir ini adalah Rp 2.461,1 Triliun yaitu pada Tahun 2019.

Tabel 1.1.

Daftar Anggaran Belanja Negara Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Anggaran (satuan Triliun)
1	2015	2.039,5
2	2016	2.095,7
3	2017	2.080,5
4	2018	2.220,7
5	2019	2.461,1
Total		10.897,5

Sumber : APBN Kemenkeu 2020

Secara umum Anggaran Belanja merupakan biaya yang dianggarkan setiap tahun dan diperuntukkan dalam 3 alokasi secara umum, yang pertama yaitu untuk keperluan belanja Kementrian/Lembaga (K/L), yang kedua untuk keperluan belanja Non Kementrian/Lembaga (Non K/L) dan yang ketiga adalah untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pada informasi APBN Tahun 2016 diterangkan bahwa Belanja K/L terbagi atas 4 bagian, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja sosial sedangkan untuk Belanja Non K/L terbagi beberapa bagian yaitu, belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial penanggulangan bencana dan belanja lain-lain. Untuk transfer ke daerah dan dana desa diperuntukkan untuk dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY, dana insentif daerah, dana transfer khusus, dana alokasi khusus non fisik, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana transfer umum dan dana untuk desa.

Pada Tahun 2014 telah dibuat aturan tentang Desa yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada kata pengantar Buku Saku Dana Desa, Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan menerangkan bahwa “Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”. Seperti yang dicantumkan pada pasal 4 UU tentang Desa ini, Ada 9 poin tujuan dalam pembuatan aturan desa ini, inti pada tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut, yang pertama memberikan pengakuan dan penghormatan kepada Desa, kedua memberikan kejelasan dan kepastian hukum, ketiga melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat, keempat mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, kelima membentuk Pemerintah Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, keenam meningkatkan pelayanan publik, ketujuh meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, kedelapan memajukan perekonomian masyarakat Desa, dan kesembilan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Dari beberapa poin tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan UU tentang Desa adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada desa agar dapat menciptakan pengelolaan desa yang baik untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sedangkan pasal 72 ayat 1 pada UU ini diterangkan sumber pendapatan Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa
- b. Alokasi APBN
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
- f. Hiba dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dengan adanya beberapa sumber pendapatan desa terutama pada poin 2, yaitu alokasi APBN atau Dana Desa, diharapkan Pemerintah Desa mampu mengelola pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan layanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dana desa mulai dianggarkan sejak Tahun 2015, pada website Kementerian Keuangan pada laman berita hasil dana desa sejak 2015 yang dipublikasikan pada tanggal 7 Januari 2019, jumlah anggaran dana desa pada Tahun 2015 adalah sebanyak 20,7 triliun, dan bertambah setiap tahunnya, sampai pada Tahun 2019 sudah mencapai 73 triliun.

Tabel 1.2.

Daftar Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Anggaran (satuan Triliun)
1	2015	20,7
2	2016	47
3	2017	50
4	2018	60
5	2019	73

Sumber : Publikasi Kemenkeu 2019

Jika dilihat Daftar Anggaran Dana Desa mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, besar anggaran Dana Desa meningkat sekitar 353% dari anggaran tahun pertama dibandingkan dengan anggaran lima tahun berikutnya. Melihat anggaran yang melonjat drastis tentu hal ini menjadi menarik untuk ketahu output dari anggaran Dana desa tersebut.

Berdasarkan data APBN 2020, Anggaran Dana Desa telah digunakan untuk membangun jalan desa sepanjang 191,6 ribu kilometer (km), Jembatan desa 1.140,4 km, Pasar desa 8.983 unit, BUMDes 37.830 kegiatan, Tambatan perahu 5.371 unit, Embung 4.175 unit, Irigasi 58.931 unit, Sarana Olahraga 19.526 unit, Penahanan tanah 192.974 unit, Sumur 45.169 unit, Air bersih 959.600 unit, Pedidikan Usia Dini (PAUD) 50.854 unit, Sarana MCK 240.587 unit, Drainase 29.557,9 ribu meter, Polindes 9.692 unit, Pos Layanan Terpadu sebanyak 24.820.

Tabel 1.3.
Daftar Capaian Dana Desa Tahun 2020

No.	Program	Jumlah	Satuan
1	Jalan Desa	191.600	Km
2	Jembatan Desa	1.140,4	Km
3	Pasar Desa	8.983	Unit
4	BUMDes	37.830	Kegiatan
5	Tambatan Perahu	5.371	Unit
6	Embung	4.175	Unit
7	Irigasi	58.931	Unit
8	Sarana Olahraga	19.526	Unit
9	Penahanan Tanah	192.974	Unit
10	Sumur	45.169	Unit
11	Air Bersih	959.600	Unit
12	PAUD	50.854	Unit
13	Sarana MCK	240.587	Unit
14	Drainase	29.557.900	Meter
15	Polindes	9.692	Unit
16	Posyandu	24.820	Unit

Sumber : Informasi APBN 2020

Desa tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang dikelola dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pada data BPS Tahun 2014 tercatat 20.432 desa tertinggal sedangkan pada Tahun 2018 berkurang menjadi 13.232.

Tabel 1.4.
Daftar Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2014 Dan 2018

No.	Kategori Desa	Tahun 2014	Tahun 2018
1	Desa Tertinggal	20.432	13.232
2	Desa Tidak Tertinggal	53.661	60.438

Sumber : BPS Desa tertinggal 2014-2018

Berdasarkan Tabel Daftar Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2014 dan 2018 yang diperoleh dari BPS dijelaskan bahwa jumlah desa tertinggal pada Tahun 2014 berkurang sebanyak 7.200 desa pada Tahun 2018. Menurunnya jumlah desa tertinggal pada Tahun 2018 menggambarkan bahwa dengan adanya Dana Desa yang digelontorkan setiap tahunnya mampu menurunkan jumlah desa tertinggal yang tergolong cukup banyak. Disisi sudut pandang yang berbeda juga terlihat perubahan yang cukup drastis di persentase kemiskinan. Pada persentase kemiskinan di data BPS tercatat pada Tahun 2015 semester 2 adalah 14.09 % dan pada Tahun 2019 semester 2 adalah 12.60 %. Jika dibandingkan antara persentase kemiskinan Tahun 2015 dengan Tahun 2019 maka dapat dilihat bahwa angka kemiskinan menurun sebanyak 1,49% artinya selama 4 Tahun Masyarakat miskin yang ada di Indonesia berkurang sebanyak 1.49% dari seluruh penduduk Indonesia.

Tabel 1.5.
Persentase Penduduk Miskin Indonesia

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Penduduk Miskin	14,09 %	13,96 %	13,47 %	13,10 %	12,60 %

Sumber : BPS Nasional

Jelas terlihat bahwa persentase kemiskinan menurun setiap tahunnya, hal ini bisa menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa secara umum Dana Desa mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dua hal tersebut yaitu jumlah desa tertinggal dan persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan terhadap meningkatnya Dana Desa. Tetapi hal itu tidak menjadi acuan untuk menetapkan bahwa setiap wilayah mengalami penurunan persentase tingkat kemiskinan pada tingkat wilayah/kabupaten tertentu contohnya salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bone. Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Bone sesuai dengan data BPS Kabupaten Bone,

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bone, 2010-2018 update terakhir pada tanggal 9 Januari 2020 tercatat bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2018 terjadi peningkatan persentase tingkat kemiskinan dari 10,12% pada tahun 2015 menjadi 10,55% pada tahun 2018.

Tabel 1.6.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bone

Tahun	2015	2016	2017	2018
Persentase Penduduk Miskin	10,12 %	10,07 %	10,28 %	10,55 %

Sumber : BPS Kab. Bone 2020

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terluas di Provinsi Sulawesi dengan jumlah desa terbanyak di provinsi tersebut. Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Bone adalah sebanyak 328 Desa. Berdasarkan rincian dana desa per Kabupaten/Kota pada Buku Saku Dana Desa, Kabupaten Bone adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima anggaran Dana Desa terbesar diantara kabupaten lainnya yaitu sebesar Rp 286.729.589.000,- dengan Alokasi Dasar sebesar Rp 202.161.160.000,- Alokasi Formula sebesar 57.948.578,- dan Alokasi Afirmasi sebesar Rp 26.691.851.000,- adapun Alokasi Dasar per Desa yaitu sebesar Rp 616.345.000,-

Tabel 1.7.

Daftar Rincian Dana Desa Kabupaten Bone

No.	Jenis Alokasi	Anggaran (Rp)
1	Alokasi Dasar (328 Desa x Rp 616.345.000)	202.161.160.000,-
2	Alokasi Formula	57.948.578.000,-
3	Alokasi Afirmasi	26.619.851.000,-
Total		286.729.589.000,-

Sumber : Buku Saku Dana Desa

Berdasarkan pemaparan informasi anggaran Dana Desa yang setiap tahun bertambah dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone yang setiap tahun semakin meningkat sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Menurut pendapat Todaro (1997) menyatakan bahwa indikator kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, perbedaan sejarah, sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia, perbedaan sektor swasta dan negara, struktur industri, politik, kekuasaan dan kelambagaan dalam negari.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa salah satu faktor kemiskinan adalah faktor geografis. Berdasarkan pendapat tersebut maka lokasi penelitian yang diambil sebagai sampel adalah Kecamatan Bontocani, Bontocani merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone yang terluas diantara kecamatan lainnya. Kecamatan Bontocani juga merupakan kecamatan yang terjauh dari dari Ibu Kota Kabupaten Bone dengan jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten adalah 112 km. Kecamatan Bontocani terdiri dari 10 Desa dan 1 Kelurahan, diantara beberapa desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Bontocani, sesuai dengan data BPS Kecamatan Bontocani Desa Bana merupakan Desa yang terluas dan termasuk desa dataran tertinggi di Bontocani. Berdasarkan keterangan tersebut, hal ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai sasaran studi kasus dalam penelitian dengan judul Analisis Tingkat Fraud Dana Desa terhadap Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat studi kasus Kecamatan Bontocani.

1. Teori Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Commonwealth Fraud Control Guideliner Australia (2002) dalam tulisah hukum/infokum/tematik BPK RI mendefinisikan *fraud* sebagai pemerolehan keuntungan dengan cara penipuan/kecurangan atau sejenisnya, definisi ini meliputi pencurian, memperoleh properti, keuntungan dengan kecurangan, memberikan informasi yang tidak benar kepada publik, menggunakan dokumen palsu, penyuapan, korupsi atau penyalahgunaan jabatan tindakan melawan hukum dengan penggunaan komputer milik

publik, kendaraan, telpon dan properti atau jasa lainnya, tindakan pelanggaran atau penyelewengan yang mengakibatkan kebangkrutan dan tindakan lainnya yang sejenisnya.

Pada konsep *Fraud Triangle* (Segitiga Kecurangan), kecurangan terjadi disebabkan 3 faktor yaitu tekanan, kesempatan dan pembenaran. Tekanan dikategorikan sebagai salah satu faktor terjadinya kecurangan karena hal ini dapat mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Menurut Lister (2017) mendefinisikan Tekanan (*Pressure*) sebagai “sumber panas untuk api” namun tidak berarti karena tekanan yang ada pada diri seseorang, orang tersebut melakukan kecurangan. Ada tiga jenis tekanan yang memotivasi seseorang atau kelompok melakukan kecurangan diantaranya adalah:

- a. *Employment pressure*, dimana individu tertekan untuk melakukan kecurangan karena tuntutan pekerjaan atau target kerja.
- b. *External pressure*, seperti ancaman stabilitas keuangan, ekspektasi pasar
- c. *Personal pressure*, dimana seseorang melakukan kecurangan karena gaya hidup

Kesempatan atau peluang adalah situasi yang memungkinkan individu melakukan kecurangan pada manajemen pengelolaan program. Tuanakotta mendefinisikan kesempatan (*Opportunity*) sebagai peluang untuk melakukan kecurangan seperti dipresepikan pelaku kecurangan. Menurut Cressey ada dua komponen peluang melakukan kecurangan yaitu,

- a. *General Information*, yaitu pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi, pengetahuan ini diperoleh dari pelaku yang ia lihat atau dengar.
- b. *Technical Skill*, keahlian yang dimiliki seseorang dan menyebabkan seseorang tersebut mendapat kedudukan. Tanpa kemampuan yang memadai menyembunyikan kecurangan tentu tidak mungkin dilakukan apalagi kasus-kasus korupsi yang bersifat sistemik.

Pembenaran atau rasionalisasi merupakan faktor kecurangan yang sangat sulit untuk diukur, Rasionalisasi yang dilakukan seseorang dengan beragam alasan tetapi akan selalu ada pembenaran didalamnya. Menurut

Tunggal (2011) rasionalisasi merupakan sikap karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai melakukan tindakan yang tidak jujur atau mereka yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalkan tindakan yang tidak jujur. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mencari pembenaran untuk tindakannya melakukan kecurangan menurut Mustikasari (2013) antara lain sebagai berikut,

- a. Mencontoh atasan atau rekan kerja
- b. Merasa sudah berbuat banyak kepada organisasi
- c. Menganggap yang diambil tidak disengaja
- d. Dianggap hanya sekedar meminjam dan pada waktunya akan dikembalikan.

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan, pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa Inggris. Menurut Webster dalam Sedermayanti (2000:144) kata “Empower” mengandung dua arti yang pertama adalah “*To Give Power or Authority To*” yang dapat diartikan dengan memberi kekuasaan, memberi kekuatan, mendelegasi otoritas pada pihak lain. Arti yang kedua adalah “*To Give Ability To or Anable*” yang dapat diartikan sebagai upaya memberi kemampuan atau keberdayaan.

Dalam konteks pembangunan, Pemberdayaan pada dasarnya bukan istilah baru sejak adanya kesadaran bahwa faktor manusia sangat berperan penting dalam pembangunan. Yang dimaksud dengan Pemberdayaan oleh Carizon dan Macauley (1998:46) adalah membebaskan seseorang dari yang kaku dan memberi kebebasan orang untuk bertanggungjawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya. Hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Carver dan Clatter Back (1995:12) yaitu upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk

mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi.

Adapun pengertian lain yang terkait dengan pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995)
- b. Pemberdayaan merupakan suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupan (Rappaport, 1984)
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swif dan Levin 1987)
- d. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai, pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan orang yang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, Etal, 1994)

Pada laman wikipedia, Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Dikatakan berhasil jika masyarakat tersebut sudah menjadi penggerak, bukan penerima manfaat. Pada konsep Suhartono (2004), Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat desa yang tertulis pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah dituliskan di atas tentang pemberdayaan masyarakat, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk memberikan kekuatan kepada sekelompok orang pada suatu wilayah tertentu untuk dapat hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan dari pihak luar dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat menjadi subjek pembangunan.

3. Pengertian Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya pada perbedaan antara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagian 2001:24).

Menurut Ravianto, Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. (2014:11). Sedangkan menurut Gibson et.al, efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan "standar" maka mereka dinilai semakin efektif. (Bungkaes 2013:46) Menurut Wiyono, Efektivitas diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan. (2007:137). Menurut Abdurrahmat, Efektivitas adalah manfaat sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya. (2003:92)

Melihat dari beberapa pendapat para ahli yang telah ditulis sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengertian efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan dengan hasil yang diperoleh sesuai dengan target. Jika dikaitkan dengan program kerja maka efektivitas berarti terealisasinya suatu program kerja yang telah direncanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan serta sesuai dengan target yang diharapkan.

4. Dana Desa

Dana Desa adalah Anggaran yang dikeluarkan Pemerintah untuk dikelola oleh perangkat desa dengan tujuan membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan. Pada buku saku dana desa pengertian dana desa adalah Dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Adapun tujuan dana desa berdasarkan buku saku dana desa antar lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan layanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa

- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengubah paradigma pengaturan Desa. Desa yang dulunya hanya dianggap sebagai objek pembangunan sekarang sudah menjadi sasaran subjek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur, mengurus pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada 13 asas yaitu, Rekognisi, Kebersamaan, Subsidiaritas, Keberagaman, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Masyawarah, Demokrasi, Kemandirian, Parisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan dan Keberlanjutan. Adapun Dasar Hukum penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu

- Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa
- PP 47/2015 tentang Perubahan atas 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa
- Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permendes No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Permendes No. 2/2015 tentang Musyawarah Desa
- Permendes No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa
- Permendes No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes
- Permendes No. 19/2015 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa TA 2018
- Perka LKPP No. 13/2013/2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP no 22/2015.

- PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- PMK No. 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa.
- PMK No. 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- PKM No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK No. 112/PMK.07/2017

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono (2015), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

2. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Berdasarkan data BPJS Kabupaten Bone, Kecamatan Bontocani adalah daerah yang terluas diantara Kecamatan lainnya yaitu seluas 463,35 km² dengan persentase 10,16% dari luas wilayah Kabupaten Bone. Kecamatan Bontocani terdiri dari 10 Desa dan 1 Kelurahan yaitu kelurahan Kahu, Desa Pattuku, Desa Bonto Jai, Desa Bulu Sirua, Desa Bana, Desa Pammusureng, Desa Watang Cani, Desa Langi, Desa Ere Cinnong, Desa Lamoncong, dan Desa Mattiro Walie. Penelitian ini rencana akan dilakukan selama kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam hal ini merupakan sekumpulan objek pada suatu wilayah yang dijadikan sebagai tempat penelitian untuk memecahkan sebuah masalah dan menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang

dilakukan. Pada penelitian ini populasi yang dimaksud adalah Masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani. Berdasarkan data pada situs *bana.opendesa.id* jumlah penduduk desa tersebut tercatat 2.584 jiwa, yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan usia, yaitu usia 0-5 Tahun sebanyak 134 jiwa, usia 6-17 Tahun sebanyak 554 Jiwa, 18-30 Tahun sebanyak 620 jiwa dan kelompok terakhir 31-120 Tahun sebanyak 1.276. Jadi pengambilan sampel pada penelitian menggunakan kriteria umur dari usia 18 Tahun sampai 120 tahun karena populasi yang cukup banyak dan wilayah yang cukup luas maka peneliti menggunakan rumus slovin dengan asumsi tingkat kesalahan 10% dengan rumus sebagai berikut,

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{1.996}{1 + (1.996 \cdot 10\%^2)}$$

$$n = 95,2$$

Keterangan :

- n = Jumlah Sampel
- N = Jumlah Populasi penelitian
- e = Tingkat Kesalahan

Hasil perhitungan rumus slovin menerangkan bahwa dari 1.996 populasi penelitian dengan tingkat kesalahan 10%, mendapatkan nilai sebesar 95,2 karena nilai yang didapatkan adalah angka pecahan, maka angka tersebut dibulatkan menjadi 95. Dari hasil perhitungan tersebut ditarik kesimpulan bahwa jumlah masyarakat yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian ini adalah sebanyak 95 Orang. Adapun kriteria yang akan dijadikan sebagai sampel adalah berusia minimal berusia 18 tahun sampai dengan usia 64 Tahun.

4. Variabel Penelitian

Penelitian ini meliputi 2 variabel, pertama adalah variabel X meliputi keterlibatan Masyarakat dan Manfaat yang dirasakan Masyarakat sedangkan yang kedua adalah variabel Y yaitu meliputi tingkat fraud dan efektivitas perberdayaan masyarakat.

Keterlibaran Masyarakat merupakan ukuran untuk mengetahui peran Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan program-program yang didanai oleh anggaran dana desa. Adapun indikator untuk mengukur variabel ini adalah seberapa sering masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan dana desa tersebut yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

Manfaat yang dirasakan Masyarakat adalah segala hal yang dirasakan masyarakat maupun hal yang membuat masyarakat lebih mudah melakukan aktivitasnya atau lebih mudah memenuhi kebutuhannya. Indikator untuk mengukur variabel ini adalah melihat seberapa banyak dan seberapa sering program-program hasil Dana Desa yang digunakan.

Tingkat Fraud merupakan besarnya perbedaan antara laporan pertanggung jawaban pemerintah setempat dengan realisasi yang terjadi dilapangan. Indikator untuk mengukur variabel ini adalah jumlah program kerja yang terealisasi di lapangan dan jumlah program kerja yang dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.

Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat merupakan ukuran keberhasilan program dana desa untuk mencapai tujuannya. Indikator untuk mengukur variabel ini adalah membandingkan program kerja yang terealisasi dengan target program kerja.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari 3 instrumen yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mendapatkan informasi atau data dengan cara berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih luas guna untuk menunjang hasil penelitian yang lebih jelas.

2. Kuesioner

Kuesioner pada awalnya berasal dari kata *Questionnaire*, artinya suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan suatu topik

permasalahan yang diberikan kepada setiap individu dengan tujuan untuk memperoleh suatu informasi atau data.

3. Skala

Skala adalah sebuah nilai pada setiap jawaban yang diterima dari hasil pertanyaan yang diberikan kepada individu. Skala yang dipakai pada penelitian ini adalah skala Likert yaitu,

Tabel 3.1.
Skala Model Likert

Skala	Keterangan	Pernyataan Positif
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-Ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2017)

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data merupakan salah satu hal yang penting untuk menentukan metode pengumpulan data sehingga pada akhirnya bisa menunjang hasil olah data pada penelitian yang akan dilakukan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Kuantitatif, dalam penelitian ini juga digunakan data kualitatif yang diukur dalam bentuk angka. Adapun sumber data yang digunakan dalam metode pengumpulan data ialah sebagai berikut;

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan melalui observasi yang dilakukan di Desa tersebut, melalui hasil wawancara Masyarakat dan melalui hasil kuesioner yang dibagikan kepada Masyarakat Kecamatan Bontocani.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber informasi publik, data penelitian sebelumnya, dokumentasi atau data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait. Data yang dimaksud disini adalah data

yang diperoleh bukan langsung dari masyarakat setempat tetapi diperoleh dari data Kantor Kepala Desa, Kantor Camat dan BPS Kabupaten Bone.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data pada penelitian ini akan digunakan akan digunakan beberapa metode yaitu, observasi, interview, kuesioner dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Mengamati hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan pada penelitian termasuk aktivitas masyarakat, program-program yang telah terealisasi selama adanya Dana Desa termasuk sarana dan prasarana yang telah dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, penggunaan atau pemanfaatan sarana tersebut oleh masyarakat selain itu juga mengamati aktivitas Pemerintah dalam penggunaan dana desa.

b. Wawancara

Interviem atau yang biasa disebut dengan wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi atau data pendukung untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Teknik ini biasanya dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait, contoh untuk penelitian ini adalah Masyarakat, Badan Perwakilan Masyarakat dan Perangkat Desa. Selain dari itu wawancara merupakan suatu cara mendapatkan informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersusun kemudian ditanyakan kepada pihak yang terkait.

c. Kuesioner

Kuesioner atau Angket, teknik ini hampir sama dengan teknik wawancara hanya saja teknik ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah disusun secara sistematis untuk dijawab sesuai dengan pilihan yang telah disediakan. Kuesioner ini akan dibagikan kepada Masyarakat Kecamatan Bontocani dan kepada perangkat-perangkat Desa maupun Kecamatan.

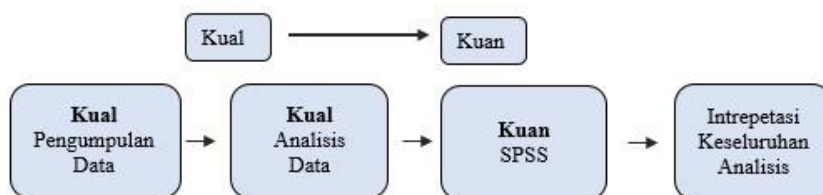
d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data-data yang telah diolah dan sudah terpublikasikan oleh sumber informasi baik itu berupa buku laporan, karya ilmiah atau arsip dan lain-lain. Dokumentasi ini bisa didapatkan di kantor Pemerintah setempat, Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi bisa juga dilakukan dengan cara yang sama dengan metode pengumpulan data dengan teknik keperpustakaan yaitu dengan melihat buku bacaan atau semacamnya yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penilaian yang akan dilakukan serta mejadi referensi untuk menyimpulkan hasil penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah metode pengumpulan data, metode selanjutnya ialah metode analisa data, untuk menganalisa kedua data menggunakan metode *“Sequential Exploratory Strategi”* yaitu menggunakan metode kualitatif pada tahap awal dan pada tahap selanjutnya menggunakan metode kuantitatif. Sepeti yang dijelaskan oleh Creswell, 2009, sebagai berikut,

“Sequential Exploratory Strategy in mixed methods research involves a first phase of qualitative data collection and analysis followed by a second phase of quantitative data collection and analysis that builds on the results of the first qualitative phase”.



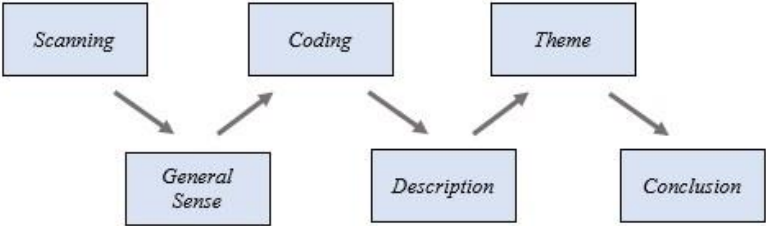
Gambar. 3.1.

Urutan Pembuktian Penelitian

Pada metode ini, tahap pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data kualitatif dan melakukan analisis data, sedangkan tahap kedua ialah menganalisis data kuantitatif dengan menggunakan software pendukung *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*. Selanjutnya adalah menganalisis data keseluruhan dan membuat

kesimpulan dari hasil analisis keseluruhan. Analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisa data dengan penjelasan yang diperoleh dari masyarakat setempat dengan metode wawancara sedangkan Analisa data Kuantitatif adalah untuk menghitung hasil skor dan persentase yang diperoleh setelah dilakukan analisa data untuk memperjelas hasil perolehan analisis kualitatif.

Menganalisa data kualitatif dapat dilakukan dalam beberapa cara diantaranya sebagai berikut,



Gambar 3.2.
Tahap Analisis Kualitatif

Pada tahap pertama *Scanning* melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung oleh indra manusia, melalui wawancara, pemindaian dokumen-dokumen serta melalui media-media informasi lainnya. Tahap kedua *General Sence* yaitu menentukan gagasan umum pada informasi yang diperoleh dari tahap pertama yang sebelumnya telah dikelompokkan sesuai keterkaitannya. Tahap ketiga *Coding* yaitu mengaitkan setiap gagasan umum yang diperoleh dari tahap ke dua, Tahap keempat *Descriptio* yaitu memberikan gambaran hasil penelitian setelah mengaitkan semua gagasan umum yang diperoleh. Tahap kelima *Theme* yaitu menentukan tema pada gambaran yang didapatkan dan tahap terakhir adalah *Conclution* yaitu menarik sebuah kesimpulan mulai tahap mengumpulkan informasi sampai dengan tahap pementuan tema pada hasil yang telah digambarkan.

Untuk menganalisa data kuantitatif terkait keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program kerja yang dibiayai dana desa serta manfaat yang dirasakan masyarakat setelah adanya program dana desa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Keterlibatan atau Manfaat (\%)} = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

% = Hasil persentase yang diperoleh

N = Jumlah skor Maksimal

n = Jumlah skor yang diperoleh

Selanjutnya menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat menurut Gibson 2013:46 efektivitas merupakan penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok serta organisasi, semakin dekat prestasi mereka terhadap suatu prestasi yang diharapkan (standar) maka itu dinilai semakin efektif. Pada analisis ini, mengukur efektivitas pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengaitkan antara target yang akan dicapai dengan hasil yang diperoleh setelah adanya Dana Desa, hasil yang dimaksud meliputi proses pemanfaatan sumber daya pada wilayah tersebut dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Adalapun perhitungannya dilakukan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$Efektif = \frac{\sum_{j=1}^n X}{\sum_{j=1}^n Y} \geq 1$$

Keterangan :

X = Output Dana Desa

Y = Target Dana Desa

Jika hasilnya sama dengan 1 (satu) atau lebih besar dari pada 1 (satu) maka dikatakan efektif tetapi jika hasilnya lebih kecil dari pada 1 (satu) maka dikatakan tidak efektif.

Untuk analisis tingkat fraud Dana Desa sesuai dengan skema *Association of Certified Fraud Examiners (ACFFE)*, menggunakan 3 indikator. Indikator yang dimaksud adalah *Corruption*, *Asset Misappropriation* dan *Fraudulent Statement*. Menentukan hasil analisa tersebut menggunakan analisa kuantitatif dan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Hasil dari pengumpulan data akan dianalisis menggunakan software *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*.

7. Validitas dan Reabilitas Data

Pada penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif yang perlu diperhatikan adalah valid, reliable dan objektif. Validasi adalah derajat ketepatan antara data yang terdapat dilapangan dan data yang dilaporkan oleh peneliti. Kalau dalam objek penelitian terdapat warna merah, penelitia akan melaporkan warna merah. Kalau dalam objek penelitian ditemukan tingkat kecurangan dalam pengelolaan anggaran dana desa tinggi maka akan penelili melaporkan bahwa tingkat kecurangan tinggi. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan objek data tersebut dinyatakan tidak valid. Pada dasarnya kegunaan data (setelah diolah dan dianalisi) ialah sebagai dasar yang objektif didalam proses pembuatan keputusan-keputusan atau kebijakan dalam rangka memecahkan persoalan oleh pengambil keputusan. Keputusan yang biak hanya bisa diperoleh dari pengambilan keputusan yang obejktif, dan didasarkan atas dasar data yang akurat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Responden

Kuesioner dibagikan kepada 95 masyarakat dengan karekteristik yang berbeda-beda, beberapa karekteristik yang telah dikelompokkan terdiri dari Jenis Kelamin, Umur dan Pendidikan Terakhir berdasarkan hasil analisis SPSS ditemukan hasil seperti berikut ini :

Tabel 4.1.
Klastersasi Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	L	54	56.8	56.8	56.8
	P	41	43.2	43.2	100.0
Total		95	100.0	100.0	

Sumber : Hasil kuesioner diolah SPSS

Jumlah responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan responden perempuan, jika dipersentasekan sebanyak 56,8% responden Laki-laki dan 43,2% responden Perempuan.

Tabel 4.2.
Klasterisasi Berdasarkan Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18-25	12	12.6	12.6	12.6
	26-35	17	17.9	17.9	30.5
	36-45	36	37.9	37.9	68.4
	46-55	23	24.2	24.2	92.6
	56-64	7	7.4	7.4	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Hasil kuesioner diolah SPSS

Pengelompokkan berdasarkan usia dibedakan menjadi lima bagian yaitu pertama responden yang berusia 18 Tahun sampai dengan 25 Tahun, kedua usia 26 – 35 Tahun, ketiga 36 - 45 Tahun, keempat 46 - 55 Tahun dan yang terakhir adalah usia 56 Tahun sampai dengan 64 Tahun. Yang mendominasi usia responden pada penelitian ini berusia 36-45 Tahun yaitu sebanyak 37,9% dari total responden.

Tabel 4.3.
Klasterisasi Berdasarkan Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S1	5	5.3	5.3	5.3
	SD	46	48.4	48.4	53.7
	SMA	10	10.5	10.5	64.2
	SMP	18	18.9	18.9	83.2
	TTSD	16	16.8	16.8	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

Sumber : Hasil kuesioner diolah SPSS

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar pada daerah penelitian didapatkan jenjang pendidikan responden terbanyak adalah tingkat Sekolah Dasar (SD) kemudian tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), selanjutnya jumlah responden urutan ketiga adalah responden yang Tidak Tamat Sekolah Dasar (TTSD), kemudian responden Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang paling sedikit adalah responden yang alumni Sarjana (S1).

Tabel 4.4.

Klasterisasi Berdasarkan Partisipasi Dana Desa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	61	64.2	64.2	64.2
	Ya	34	35.8	35.8	100.0
Total		95	100.0	100.0	

Sumber : Hasil kuesioner diolah SPSS

Dari 95 responden pada penelitian ini, 35,8% diantaranya yang pernah terlibat dalam pengelolaan anggaran dana desa sedangkan 64,2% adalah responden yang tidak pernah terlibat dalam pengelolaan anggaran.

2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan data yang didapatkan dari beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh dijadikan data awal untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk dapat hubungkan sehingga akan memudahkan menentukan kesimpulan pada kasus yang diteliti.

a. Observasi

Observasi dilakukan beberapa bulan sebelum penelitian dan ditemukan beberapa program-program pemerintah desa termasuk pembinaan masyarakat masih kurang dan dari sisi pembangunan, beberapa pembangunan jalanan sudah banyak yang rusak, tetapi beberapa juga program-program yang masih berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat seperti pengadaan alat dan pendistribusian hasil pertanian, pengembangan usaha budidaya lebah, pelatihan peternakan, pengelolaan kopi, pembuatan irigasi dan pengadaan alat pertanian sampai sekarang masih ada beberapa yang masih berjalan seperti usahan pengelolaan Kopi dan lain-lain.

b. Wawancara

Untuk hasil wawancara sedikit berbeda dengan hasil observasi, beberapa masyarakat mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sejak adanya dana desa sudah kelihatan hanya saja hasil dari program-program yang diadakan kurang memuaskan bagi sebagian masyarakat, tetapi dari sisi kepuasan masyarakat pemerintah desa sudah merasa bersyukur dalam pengelolaan Desa pada masa ini.

c. Kuesioner

Untuk hasil kuesioner, sebagian besar perangkat desa maupun masyarakat desa setuju dengan pengelolaan anggaran desa yang tidak sesuai dengan penggunaan anggaran dengan pencatatan. Dari 29 pertanyaan terdapat 10 pertanyaan untuk menganalisa tingkat fraud dana desa dan selebihnya adalah pertanyaan untuk menganalisa efektivitas pemberdayaan masyarakat. Pertanyaan yang ditujukan untuk perangkat desa serta orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dana desa diajukan sebanyak 10 pertanyaan untuk menganalisa tingkat kecurangan, sedangkan pertanyaan yang jumlah 19 untuk menganalisa efektivitas pemberdayaan diajukan kepada masyarakat. Pada kuesioner ini skala yang digunakan adalah skala likert. Dengan skala likert maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan. (Sugiono 2013:168). Adapun gambaran dari skala likert adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Simbol Skala Likert Yang Digunakan

Simbol	Keterangan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
RR	Ragu-ragu	3
TS	Sangat Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiono 2013:168

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen Pemerintah kecamatan maupun desa yang berkaitan dengan penelitian untuk dijadikan sebagai

bahan penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal, adapun beberapa dokumen-dokumen yang didapatkan akan dijelaskan sebagai berikut,

Tabel 4.6.
Jumlah Anggaran dan Realisasi
Dana Desa Bana

Tahun	Anggaran	Realisasi
2015	Rp 311.945.000,-	Rp 311.945.000,-
2016	Rp 679.377.000,-	Rp 679.377.000,-
2017	Rp 864.987.000,-	Rp 864.667.200,-
2018	Rp 1.359.860.000,-	Rp 1.359.145.300,-
2019	Rp 1.506.220.000,-	Rp 1.400.804.000,-

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Desa Bana

Pada tahun 2015 anggaran dana desa bana tergolong sangat kecil dibandingkan dengan anggaran dana desa lima tahun terakhir. Dari anggaran dana desa yang disediakan dapat dimanfaatkan dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari laporan realisasi penggunaan anggaran dana Desa Bana pada Tahun 2015. Jumlah anggaran disediakan sama besar dengan jumlah realisasi anggaran yaitu sebesar Rp 311.945.000,-.

Pada Tahun 2016 jumlah anggaran yang disediakan bertambah dua kali lipat dari tahun sebelumnya, dari Rp 311.945.000,- menjadi Rp 679.377.000 dengan jumlah anggaran yang terealisasi sama dengan jumlah yang dianggarkan. Beberapa program pemberdayaan yang dilakukan pada Anggaran Tahun 2016 adalah :

- Kegiatan pelatihan Kepada Desa, Perangkat Desa dan BPD
- Kegiatan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
- Pengadaan alat pengolahan hasil pertanian
- Kegiatan peningkatan kapasita masyarakat
- Kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Desa

Pada Tahun 2017 anggaran dana Desa Bana bertambah sebanyak Rp 185.160.000,- dari Tahun 2016. Dari laporan realsiasi penggunaan anggaran terdapat perbedaan jumlah anggaran yang disediakan dengan jumlah realisasi penggunaan anggaran, artinya anggaran pada Tahun 2017 masih

tersisa sebesar Rp 319.800,-. Adapun program-program pemberdayaan masyarakat pada Tahun Anggaran 2017 adalah:

- Pengadaan Bibit Tanaman Pangan dan Perkebunan
- Pelatihan sistem keuangan Desa (Siskeudes)
- Pelatihan pengembangan usaha budidaya lebah
- Pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan dan adat

Pada Tahun 2018, Anggaran dana desa meningkat dari sebelumnya tercatat Rp 864.987.000,- meningkat sebanyak Rp 494.873.000,- sehingga total dana yang dikololah oleh Pemerintah Desa Bana sebesar 1.359.860.000,- dalam satu tahun. Pengelolaan dana ditujukan untuk beberapa program, program yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat setempat diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pelatihan Kader Teknik
- Pelatihan Peternakan
- Pelatihan Pengolahan Kopi

Pada program ini, peserta yang dilibatkan tidak lain adalah masyarakat di daerah tersebut yaitu masyarakat desa Bana. Anggaran Dana pada Tahun 2018 merupakan anggaran yang pertama mencapai 1 Miliar selama adanya program Dana Desa, Anggaran dana desa sebelumnya hanya berkisaran ratusan juta rupiah. Adapun anggaran yang terealisasi pada Tahun 2018 hampir sepenuhnya tercapai, hanya tersisa sebesar Rp 714.700,-

Anggaran dana desa semakin hari semakin meningkat sehingga pada Tahun 2019 anggaran desapun kembali meningkat dibandingkan anggaran tahun-tahun sebelumnya, anggaran belanja negara pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.506.220.000,-. Seperti Tahun-tahun sebelumnya Anggaran Dana Desa diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan beberapa program-program pemberdayaan masyarakat pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Pengadaan Mesin pemotong Padi
- Pelatihan Pertanian
- Pembuatan irigasi 4 unit
- Bimtek Kepala Desa
- Pelatihan perangkat Desa

3. Pembahasan

Pada penelitian ini software yang akan digunakan untuk mengolah data dan menentukan hasil penelitian adalah *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*.

a. Uji Validitas Data Kuesioner

Uji validitas data merupakan suatu hal yang harus dilakukan pada penelitian yang menggunakan angket. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah angket yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti benar valid atau tidak. Berikut adalah hasil uji validitas menggunakan SPSS :

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Data Tingkat Fraud

		Total
X1	Pearson Correlation	.562**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X2	Pearson Correlation	.580**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X3	Pearson Correlation	.555**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X4	Pearson Correlation	.415**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X5	Pearson Correlation	.735**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X6	Pearson Correlation	.573**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X7	Pearson Correlation	.598**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X8	Pearson Correlation	.565**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X9	Pearson Correlation	.559**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95

X10	Pearson Correlation	.624**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Total	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	95

Sumber : Hasil kuesioner tingkat fraud diolah SPSS

Dapat dilihat dari Tabel 4.10 bahwa dari pernyataan X1 sampai dengan pernyataan X10 tidak ditemukan data yang tidak valid. Mementukan keputusan pada uji validitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan r hitung dengan r tabel, jika nilai r hitung > r tabel maka dinyatakan valid sedangkan sebaliknya jika r hitung < r tabel maka dinyatakan tidak valid. Sedangkan pada tabel 4.10. didapatkan r tabel sebesar 0,202 dan Total Pearson Correlation pada tabel tersebut tidak ada lebih kecil dari r tabel sehingga dinyatakan data X1 sampai dengan X2 dinyatakan valid.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Data Efektifitas Pemberdayaan
Masyarakat

		Total
X1	Pearson Correlation	.594**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X2	Pearson Correlation	.681**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X3	Pearson Correlation	.734**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X4	Pearson Correlation	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X5	Pearson Correlation	.673**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X6	Pearson Correlation	.410**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X7	Pearson Correlation	.688**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95

X8	Pearson Correlation	.702**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X9	Pearson Correlation	.478**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X10	Pearson Correlation	.618**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X11	Pearson Correlation	.827**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X12	Pearson Correlation	.750**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X13	Pearson Correlation	.695**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X14	Pearson Correlation	.694**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X15	Pearson Correlation	.772**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X16	Pearson Correlation	.857**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X17	Pearson Correlation	.747**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X18	Pearson Correlation	.778**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
X19	Pearson Correlation	.579**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	95
Total	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	95

Sumber : Hasil kuesioner efektivitas pemberdayaan masyarakat diolah SPSS

Untuk hasil kuesioner efektivitas pemberdayaan masyarakat dapat dilihat nilai r tabel yaitu 0.202 sedangkan hasil olahan data, menunjukkan total data *Pearson Correlation* semuanya lebih besar dari 0.202 atau data r hitung $>r$ tabel artinya data pada Tabel 4.11. yaitu X1 sampai dengan X19 dinyatakan valid.

1) Keterlibatan Masyarakat mengelola Dana Desa

Rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini adalah seberapa tingkat keterlibatan dalam masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa, untuk mengetahui hal tersebut beberapa data hasil kuesioner dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan rumusan masalah tersebut. Terdapat tujuh pernyataan yang dapat menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa yaitu :

- Pernyataan Pertama

Bukan suatu masalah bagi saya, apabila persiapan partisipan anggaran ditunjuk langsung oleh kepala desa tanpa ada proses seleksi. Dari pernyataan ini bisa dianalisa bahwa jika jawaban responden mengatakan sangat setuju itu artinya masyarakat tidak dilibatkan dalam penentuan partisipan sebaliknya jika jawaban responden mengatakan bahwa sangat tidak setuju berarti keputusan menentukan partisipan diserahkan kepada Masyarakat. Jadi jika jawaban masyarakat adalah sangat setuju maka skor yang diberikan adalah 1 begitu juga sebaliknya jika responden memberikan jawaban Sangat tidak setuju maka skor yang diberikan adalah 5.

- Pernyataan ke Dua

Bukan suatu masalah bagi saya, apabila program telah disusun kemudian tinggal kami setuju. Artinya jika responden menyetujui pernyataan ini maka skor yang diberikan adalah rendah dan apabila tidak menyetujui maka skor yang diberikan adalah tinggi sebab jika program bisa disetujui oleh masyarakat berarti masyarakat tidak ikut menyusun program yang dibutuhkan dengan kata lain masyarakat tidak dilibatkan dalam penentuan program yang akan dilaksanakan.

- Pernyataan ke Tiga

Sosialisasi Anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh desa sudah berjalan efektif. Jika Responden menyetujui maka skor yang didapatkan adalah tinggi sebaliknya juga seperti itu jika responden tidak menyetujui maka mendapatkan skor rendah karena jika sosialisasi dikategorikan efektif artinya informasi tentang dana desa sudah tersampaikan kepada seluruh masyarakat, hal ini sudah termasuk keterlibatan masyarakat pada proses sosialisasi baik perencanaan anggaran maupun sosialisasi penggunaan anggaran

- Pernyataan ke Empat

Proses Musyawarah desa perencanaan kegiatan alokasi Dana Desa berjalan melalui mekanisme yang benar. Mekanisme yang benar adalah melibatkan semua aspek-aspek dalam perencanaan kegiatan alokasi Dana Desa, tentu hal seperti ini jika dijawab Sangat setuju maka skor yang didapatkan adalah 5 begitu juga sebaliknya.

- Pertanyaan ke Lima

Proses pelatihan bagi pelaku alokasi Dana Desa sudah berjalan efektif artinya jika pelatihan berjalan efektif maka tentu yang dilibatkan adalah masyarakat.

- Pernyataan ke Enam

Sasaran bantuan alokasi Dana Desa yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin, artinya masyarakat dilibatkan dalam penggunaan anggaran Desa, jadi jika responden menyatakan sangat setuju maka skor yang diberikan adalah lima.

- Pernyataan ke Tujuh

Pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa dilaksanakan secara gotong royong. Jika responden setuju dengan pernyataan ini maka itu termasuk hal yang melibatkan masyarakat dalam merealisasikan kegiatan alokasi dana desa.

Dari beberapa pernyataan yang telah diberikan kepada masyarakat yaitu 7 pernyataan yang telah dijelaskan di atas maka hasil dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9

Rekapitulasi Hasil Kuesioner Keterlibatan Masyarakat

No	Pernyataan	Jumlah Skor
1	Pernyataan 1	296
2	Pernyataan 2	280
3	Pernyataan 3	360
4	Pernyataan 4	370
5	Pernyataan 5	369
6	Pernyataan 6	286
7	Pernyataan 7	396
Total Skor		2357

Sumber : Data Kuesioner Penelitian

Berdasarkan teknik analisis yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa untuk menghitung tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Keterlibatan (\%)} = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Dimana n adalah jumlah skor dari Pernyataan 1 sampai Pernyataan 7 yang diperoleh dan N adalah total skor maksimal, (jumlah responden x skor maksimal) x jumlah pernyataan. sehingga didapatkan nilai seperti dibawah ini :

$$\text{Nilai n} = 2.357$$

$$\text{Nilai N} = (\text{Jumlah Responden} \times \text{skor maksimal}) \times \text{Jumlah Pernyataan}$$

$$= (95 \times 5) 7$$

$$= 3.325$$

$$\text{Keterlibatan (\%)} = \frac{2.357}{3.325} \times 100\%$$

$$= 70,8 \%$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa jumlah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa berdasarkan analisis kuantitatif adalah sebesar 70,8 %, artinya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Bana adalah sangat besar, dari hasil

analisis berdasarkan hasil survei disimpulkan bahwa lebih dari setengah responden terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa.

2) Manfaat Dana Desa bagi Masyarakat

Dana Desa merupakan sebuah program pemerintah yang mulai terealisasi pada Tahun 2015, tentu hal ini merupakan waktu yang sudah lama dalam jika dibandingkan pada tahun sekarang. Beberapa tujuan diperuntukkan Dana Desa yaitu untuk pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Dari tujuan tersebut tentu sudah banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat sampai pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan maupun pemberdayaan. Dari pernyataan tersebut, penelitian ini akan mengukur besaran manfaat yang dirasakan masyarakat setelah adanya program dana desa, desa yang menjadi sampel penelitian adalah Desa Bana. Untuk menentukan keputusan yang akan diambil telah diedarkan kuesioner yang menunjang informasi yang akan didapatkan dalam menganalisa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Dari 29 pernyataan yang disiapkan dikuesioner terdapat 9 pertanyaan yang berkaitan dengan analisa yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk mengukur keterlibatan masyarakat. Berikut adalah pernyataan yang diberikan kepada Masyarakat;

- a) Alokasi Dana Desa mampu memberikan informasi, menjawab pertanyaan, memberikan ulasan, gambaran dan analisis maupun memberikan saran kongkrit dan realistis yang berkaitan dengan program. Artinya jika responden mengatakah bahwa sangat setuju maka diberikan skor 5, sebaliknya juga seperti itu.
- b) Alokasi Dana Desa mampu membantu masyarakat dalam mempelajari dan memahami keterlibatan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program.
- c) Alokasi dana desa Mampu membantu masyarakat dalam mempelajari dan memahami keterampilan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program
- d) Alokasi dana desa Mampu berperan sebagai orang yang dapat menengahi terjadinya perbedaan kepentingan antara kelompok atau individu di masyarakat.

- e) Alokasi dana desa Mampu merangsang dan mendorong masyarakat untuk menemukan serta mengenali potensi diri masyarakat.
- f) Alokasi dana desa Mampu menjalin hubungan komunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat.
- g) Alokasi dana desa mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
- h) Alokasi dana desa mampu meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
- i) Alokasi dana desa mampu memperluas kesempatan kerja.
- j) Alokasi dana desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari ke 9 pernyataan di atas jika responden pernyataan disetujui maka skor yang diperoleh tinggi sebaliknya jika pernyataan tidak disetujui maka skor yang diperoleh hanya sedikit. Berikut adalah rekapitan hasil kuesioner yang telah ditanggapi oleh Masyarakat :

Tabel 4.10

Rekapitulasi Hasil Kuesioner Berkaitan Manfaat

No.	Pernyataan	Jumlah Skor
1	Pernyataan 1	374
2	Pernyataan 2	383
3	Pernyataan 3	358
4	Pernyataan 4	372
5	Pernyataan 5	388
6	Pernyataan 6	387
7	Pernyataan 7	382
8	Pernyataan 8	366
9	Pernyataan 9	376
Total		3.386

Sumber : Hasil Kuesioner Penelitian

Untuk menentukan besar manfaat yang dirasakan Masyarakat, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Besar manfaat (\%)} = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Dimana n adalah jumlah skor dari Pernyataan 1 sampai Pernyataan 9 yang diperoleh dan N adalah total skor maksimal, (jumlah responden x skor maksimal) x jumlah pernyataan. sehingga didapatkan nilai seperti dibawah ini :

$$\text{Nilai } n = 3.386$$

$$\text{Nilai } N = (\text{Jumlah Responden} \times \text{skor maksimal}) \times \text{Jumlah Pernyataan}$$

$$= (95 \times 5) \times 9$$

$$= 4.275$$

$$\begin{aligned} \text{Besar Manfaat (\%)} &= \frac{3.386}{4.275} \times 100\% \\ &= 79,2\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat berdasarkan analisa kualitatif adalah sebesar 79,2 % artinya sebagian besar masyarakat Desa Bana merasakan manfaat setelah adanya dana desa, dibuktikan dengan hasil analisis menggunakan beberapa metode.

3) Pengaruh Tingkat *Fraud* terhadap Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat

Secara kuantitatif menentukan pengaruh tingkat fraud terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan software SPSS, tetapi pada awalnya dibutuhkan rekapan data dari keusioner yang telah diisi oleh masyarakat, berikut adalah beberapa pernyataan yang ada pada kuesioner yang berkaitan dengan tingkat fraud;

- a) Suatu hal yang wajar di Desa saya, apabila untuk suatu tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari semestinya
- b) Bukan suatu masalah bagi desa saya, apabila pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang,
- c) Merupakan sesuatu yang wajar di Desa saya apabila pengguna anggaran memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai kedalam belanja program dana desa

- d) Suatu hal yang wajar apabila di Desa saya, para pengguna anggaran menggunakan kuitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan.
- e) Bukan suatu masalah bagi desa saya apabila perlengkapan, peralatan yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dibeli
- f) Tidak menjadi suatu masalah bagi desa saya apabila suatu transaksi dana desa memiliki bukti pendukung ganda
- g) Suatu hal yang wajar apabila di desa saya ditemukan adanya pengeluaran dana desa tanpa dokumen pendukung
- h) Bukan suatu masalah bagi desa saya, apabila sisa anggaran dibagikan.
- i) Bukan suatu masalah bagi saya, apabila partisipan anggaran ditunjuk langsung oleh kepala desa tanpa ada proses seleksi
- j) Bukan suatu masalah bagi saya, apabila program telah disusun kemudian tinggal kami setuju.

Dari 10 pernyataan diperoleh rekap data setiap pernyataan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Rekapitulasi Hasil Kuesioner Berkaitan *Fraud*

No	Variabel	Frekuensi	Persentase
1	X1	232	9,53%
2	X2	250	10,27%
3	X3	202	8,30%
4	X4	223	9,16%
5	X5	203	8,34%
6	X6	285	11,71%
7	X7	221	9,08%
8	X8	254	10,44%
9	X9	274	11,26%
10	X10	290	11,91%

Sumber : Hasil Kuesioner Penelitian

Dari hasil rekapitulasi kuesioner yang berkaitan dengan tingkat fraud diperoleh data terbesar yaitu 11,91 % pada variabel X10 artinya Nilai yang paling tinggi diantara sepuluh pernyataan yang ada pada kuesioner yang berkaitan dengan fraud adalah pernyataan ke 10 yaitu "Bukan suatu masalah

apabila program telah disusun kemudian tinggal kami setuju” maksud dari pernyataan ini adalah masyarakat tidak ikut memberikan sumbangsi usulan program-program dalam rencana program penggunaan anggaran dana desa. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan memang mekanisme dalam penyusunan rencana program jangka menengah dikatakan bahwa masyarakat dilibatkan dalam musyawarah tersebut namun tidak semua masyarakat ikut pada kegiatan tersebut.

Sedangkan pernyataan kuesioner yang berkaitan dengan efektivitas pemberdayaan masyarakat dapat dilihat berikut ini;

- a) Sosialisasi Anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh Desa sudah berjalan efektif.
- b) Proses musyawarah desa perencanaan kegiatan Alokasi Dana Desa berjalan melalui mekanisme yang benar
- c) Proses pelatihan bagi pelaku Alokasi Dana desa sudah berjalan efektif.
- d) Sasaran bantuan alokasi Dana Desa yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin
- e) Desa adalah lembaga yang dipercaya dan aspiratif untuk mendorong timbul dan berkembangnya partisipasi dan kemandirian masyarakat.
- f) Pelaksanaan kegiatan Alokasi dana desa dilaksanakan secara gotong royong.
- g) Pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa menggunakan teknologi yang sederhana, tepat, dan biaya murah
- h) Penggunaan dana pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa telah sesuai dengan rencana program sehingga bantuan tidak menyimpang
- i) Pengawasan pengadaan barang dan jasa kegiatan alokasi dana desa di lapangan cukup efektif untuk menghindari kecurangan
- j) Waktu pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa di lapangan sesuai dengan rencana program
- k) Alokasi dana desa Mampu memberikan informasi, menjawab pertanyaan, memberikan ulasan, gambaran analisis maupun memberikan saran yang kongkrit dan realistis yang berkaitan dengan program

- l) Alokasi dana desa Mampu membantu masyarakat dalam mempelajari dan memahami keterampilan baru dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program
- m) Alokasi dana desa Mampu berperan sebagai orang yang dapat menengahi terjadinya perbedaan kepentingan antara kelompok atau individu di masyarakat.
- n) Alokasi dana desa Mampu merangsang dan mendorong masyarakat untuk menemukan serta mengenali potensi diri masyarakat.
- o) Alokasi dana desa Mampu menjalin hubungan komunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat.
- p) Alokasi dana desa mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
- q) Alokasi dana desa mampu meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
- r) Alokasi dana desa mampu memperluas kesempatan kerja.
- s) Alokasi dana desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun rekapan hasil kuesioner dari 19 pernyataan yang berkaitan tentang efektivitas pemberdayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 4.12

Rekapitulasi Hasil Kuesioner Berkaitan Efektivitas

No.	Variabel	Frekuensi	Persentase
1	Y1	360	5,02%
2	Y2	370	5,16%
3	Y3	369	5,15%
4	Y4	386	5,39%
5	Y5	389	5,43%
6	Y6	396	5,53%
7	Y7	382	5,33%
8	Y8	379	5,29%
9	Y9	376	5,25%
10	Y10	373	5,21%
11	Y11	374	5,22%
12	Y12	383	5,34%
13	Y13	358	5,00%

14	Y14	372	5,19%
15	Y15	388	5,41%
16	Y16	387	5,40%
17	Y17	382	5,33%
18	Y18	366	5,11%
19	Y19	376	5,25%

Sumber : Hasil Kuesioner Penelitian

Dapat dilihat dari hasil rekapan Tabel 4.13 bahwa angka persentase yang paling tinggi adalah variabel Y5 hal ini menandakan bahwa masyarakat paling banyak yang sepakat bahwa “Desa adalah lembaga yang dipercaya dan aspiratif untuk mendorong timbul dan berkembangnya partisipasi dan kemandirian masyarakat.”

Adapaun rekapan hasil uji regresi linear antara variabel X dan Y adalah sebagai berikut :

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tingkat_Fraud ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Efektivitas

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.111 ^a	.012	.002	.54681

a. Predictors: (Constant), Tingkat_Fraud

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.345	1	.345	1.154	.285 ^a
	Residual	27.807	93	.299		
	Total	28.152	94			

a. Predictors: (Constant), Tingkat_Fraud

b. Dependent Variable: Efektivitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	4.226	.245		17.264	.000
	Tingkat_Fraud	-.100	.093	-.111	-1.074	.285

a. Dependent Variable: Efektivitas

Dari hasil analisis di atas menunjukkan pada kolom model yaitu constant menunjukkan angka 4.226 pada kolom Unstandardized Coefficients artinya angka ini merupakan angka konstan dari variabel Y (Efektivitas), apabila tidak ada nilai variabel X (Fraud) maka nilai variabel Y adalah 4.226. Pada kolom model yaitu Tingkat_Fraud memiliki nilai sebesar -0,100, angka ini berarti bahwa jika nilai variabel X bertambah 1 % maka variabel Y akan meningkat sebesar -0,100. Karena angka ini adalah angka negatif (-) maka dikatakan berpengaruh negatif. Artinya jika angka fraud meningkat maka efektivitas akan menurun. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) adalah jika nilai Sig. lebih kecil dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh fraud terhadap efektivitas sebaliknya jika Sig. lebih besar dari probabilitas 0,05 maka fraud tidak berpengaruh pada efektivitas. Pada hasil olah data ini didapatkan nilai Sig

adalah $0,285 >$ dari probabilitas $0,05$ jadi hasil uji statistik menggambarkan bahwa tingkat fraud tidak signifikan terhadap efektivitas.

Dari hasil wawancara pada masyarakat setempat menyatakan bahwa pengelolaan anggaran dana desa sudah cukup baik menurut mereka sebab semua proses-proses mulai dari perencanaan program sampai dengan pelaksanaan program selalu dilibatkan. Mereka juga menganggap bahwa penganggaran dan pertanggung jawaban pun sudah termasuk transparan karena beberapa tempat dibuatkan baliho yang berisi rincian anggaran dana desa. Adapun manfaat yang mereka sampaikan pada saat diwawancarai adalah lebih banyaknya usaha-usaha maupun ilmu-ilmu yang didapatkan selama adanya Desa.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa analisis pada Bab sebelumnya ditemukan beberapa hal yang bisa menjadi kesimpulan dalam penelitian ini antara lain;

- a. Dari hasil analisis keterlibatan masyarakat ditemukan bahwa kebanyakan masyarakat menyetujui bahwa “Pelaksanaan kegiatan alokasi Dana Desa dilaksanakan secara gotong royong”. Hal tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat dilibatkan dalam menyusun perencanaan program kerja Desa.
- b. Berdasarkan analisis besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ditemukan bahwa masyarakat lebih banyak menyetujui “Alokasi dana desa Mampu merangsang dan mendorong masyarakat untuk menemukan serta mengenali potensi diri masyarakat”, hal ini berarti bahwa dengan adanya alokasi dana desa masyarakat bisa termotivasi untuk lebih mengenali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, dengan kata lain alokasi dana desa sangat bermanfaat bagi pengembangan sumber daya masyarakat.
- c. Keterlibatan masyarakat dan manfaat yang dirasakan masyarakat merupakan penunjang dalam menentukan hasil analisis pengaruh fraud dana desa terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat. Adapun hasil

uji statistik antara fraud dengan efektivitas pemberdayaan masyarakat hasilnya adalah tidak signifikan artinya pengaruh tingkat fraud sangat kecil sehingga dikategorikan tidak signifikan. Beberapa hal yang menjadi faktor sehingga hasil analisis tidak signifikan dapat dilihat dari tingkat karakteristik responden, dari jenis kelamin, tingkat umur, dan lebih yang penting adalah tingkat pendidikan.

2. Saran

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan besarnya anggaran dana desa yang semakin meningkat terhitung dari Tahun 2015-2019, ada pula daerah yang berbanding lurus dengan angka kemiskinan sehingga sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Adapun saran yang dapat dipetik dari hasil penelitian yaitu pengelolaan anggaran dana desa baiknya didampingi oleh pihak-pihak pemerintah daerah untuk memastikan bahwa mekanisme pengelolaan anggaran dana terlaksana dengan baik, selain itu pihak-pihak pemerintah mampu menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada di Desa serta menawarkan program-program yang bisa bermanfaat untuk masa depan bagi desa dan masyarakat.

REFERENSI

- Abdul Wahab, S. 1999. "Ekonomi Politik Pembangunan Bisnis Indonesia Era Orde Baru dan di Tengah Krisis Moneter". Malang Danar Wijaya. Brawijaya University Press.
- Amirullah dan Hanafi, Rindyah. 2002. "Pengantar Manajemen". Graha Ilmu Yogyakarta.
- Anonim, 2013. "Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat di Dalam dan di Sekitar Hutan". Departemen Kehutanan Direktorat Jendral Rehabilitas Lahan dan Perhutanan Sosial. Jakarta.
- Anwas, O.M. 2003. "Pemberdayaan Masyarakat di Era Global". Bandung. Alfabeta.

- As, Asdika. 2020. " Pengaruh Trust, Kepuasan Konsumen dan Brand Image terhadap Kinerja Pemasaran melalui Layalitas pada Perusahaan Transportasi Online di Makassar". Universitas Bosowa. Makassar.
- Awang, Sam Afri. 1995. "Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal dalam Program IDT". Jakarta. Adirya Media.
- Barthos, Basir. 1992. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pendekatan Mikro. Cetakan Kedua, Bumi Aksara. Jakarta.
- Debora. 2006. Pengaruh Pemberdayaan Kerja dan Psikologi terhadap Kepercayaan Organisasi dan Kepuasan Kerja Dosen Tetap Perguruan Tinggi Swasta. Palangkaraya.
- Handoko, T. Hany. 1996. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. BPFE- Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hidayani, Rhisma, 2018. "Efektivitas Penggunaan Program Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada Fakultas Teknik Universitas Hasanauddin. Universitas Bosowa. Makassar
- Ida Ndapa, Adriana. 2015. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". TAPM. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Ridha, Fahrul. 2019. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota. Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Rini. 2013. "Studi Pemberdayaan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja pada Sektetariat Kabupaten Polewali Mandar. Universitas 45 Makassar. Makassar.
- Prijono Onny, 1996. "Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi" Center for Strategic adn International Studies. Jakarta
- Sajogyo Pudjiwati. 1995. "Sosoiologi Pedesaa" Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sedarmayanti. 2003. Good Governmance (Kepermimpinan yang Baik) Rangka Otomoni Daerah. Mandar Maju. Bandung.
- Shuha, Khalida. 2018. "Analisis Pengelolaan Dana Desa studi kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alunh Kabupaten Padang Pariman". Ejournal. Universitas Negeri Padang. Padang.

- Tahir. 2017. "Analisis Program Pengembangan Klaster Ketahanan Pangan terhadap Peningkatan Pendatan Petani Bawang Merah di Kabupaten Enrekang. Skripsi. Universitas Bosowa. Makassar.
- Usman, Syahriani. 2017. "Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya *Fraud* di Sektor Pemerintahan" (Studi pada SKPD Kabupaten Luwu Timur). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.

CHAPTER 6

ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLMAN

Ratih Purwati Tahir¹

Hasanuddin Remmang²

Firman Menne³

^{1,2,3}Program Studi Magister Manajemen, Universitas Bosowa

Email: ratih.purwati@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu kegiatan mengumpulkan, mengolah dan kemudian menyajikan penelitian terhadap suatu objek tertentu, dimana dari data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan dalam analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan keuangan daerah adalah data target pendapatan asli daerah, realisasi pendapatan asli daerah, total penerimaan daerah, serta data realisasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Hasil penelitian berdasarkan Pedoman Penilaian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2018 dinyatakan efektif dan efisien.

Kata kunci: Efisiensi, Efektifitas, dan Pengelolaan Keuangan daerah

A. PENDAHULUAN

Anggaran APBD merupakan kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar semakin baik penyusunannya, pemantauan, pengendalian dan evaluasi yang mudah dilakukan.

Hariadi (2014:7) menyatakan bahwa anggaran pemerintah memiliki beberapa fungsi utama yaitu alat perencanaan alat pengendalian alat

kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta alat menciptakan ruang publik. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Munandar (2009:10) menyatakan bahwa anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat pengawasan kerja. Dengan melihat kegunaan pokok dari anggaran tersebut maka pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat berfungsi sebagai :

1. Fungsi perencanaan, dalam perencanaan APBD adalah penentuan tujuan yang akan dicapai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi yang bertambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai.
2. Fungsi koordinasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau setmen yang ada dalam organisasi, agar dapat berkerja secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan.
3. Fungsi komunikasi jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efisien maka saluran komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, pelaksanaan dan penyimpangan yang timbul dapat teratasi.
4. Fungsi motivasi anggaran berfungsi sebagai mana alat untuk memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan.
5. Fungsi pengendalian dan evaluasi , anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan perusahaan.

Perkembangan APBD terutama di sisi pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang akan terjadi pada satu tahun kedepan dan relatif sama

Anggaran belanja rutin adalah salah satu alternatif yang dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan di daerah secara keseluruhan menuju tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, kegiatan rutin yang akan dilaksanakan merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pembangunan di daerah.

Bertitik tolak dari hasil yang akan dicapai dengan tetap memperhatikan fasilitas keterbatasan sumber daya yang ada maka dalam rangka memenuhi tujuan pembangunan, baik secara nasional maupun regional, baik yang dilakukan oleh aparat tingkat atas maupun tingkat daerah serta jajarannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jaya (2009:11) menyatakan, bahwa sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan, adalah penerimaan daerah sendiri, karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya.

Sampai saat ini berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan daerah di bidang keuangan daerah, karena aspek keuangan daerah menjadi sesuatu yang penting, sebab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dibutuhkan dana atau biaya yang cukup besar, sehingga kepada daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam arti mengali dan mengelola pendapatan asli daerah guna membiayai pengeluaran –pengeluaran daerah.

Mardiasmo (2010:11) menyatakan, bahwa perubahan pola pengawasan yang mendasar adalah dengan diberikannya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka diperlukan peningkatan peran DPRD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah. Maka dapat dilihat perubahan tersebut juga memberikan efek lain pada unit-unit kerja diperintah daerah seperti tuntutan pegawai/ aparatur pemerintah.

1. Arti Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *outos* yang berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang. Menurut perkembangan sejarah pemerintah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundang-undangan juga mengandung arti pemerintahan atau perundang-undangan sendiri. Sesuai dengan pasal 1 butir (h) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan undang-undang Nomor 35 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri atau aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan itu, maka kepala daerah di berikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Untuk Pemerintah Provinsi hanya di berikan otonomi terbatas yang meliputi kewenangan lintas Kabupaten dan Kota Selain itu, kewenangan yang tidak atau belum di laksanakan oleh daerah kabupaten atau kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya (Pasal ayat 1 dan 2 UU No 32 Tahun 2004).

Hal tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah

tangga sendiri. Ini berguna untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapainya, maka titik berat otonomi diletakkan di daerah kabupaten dan kota dengan pertimbangan bahwa daerah kabupaten atau kota langsung berhubungan dengan masyarakat.

Menurut Utomo (2000), seluruh kasnah politik dan pemerintahan di Indonesia, termasuk manajemen pemerintahan daerah, membicarakan mengenai otonomi, desentralisasi atau demokrasi lokal yang harus menitik beratkan adanya kewenangan. Dengan kewenangan yang dimiliki, akan memotivasi daerah untuk menumbuhkan inisiatif dan kreativitas tidak saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga untuk tercapainya kemandirian daerah.

Meskipun tidak dapat di perlukan bahwa penyelenggaraan manajemen pemerintahan dapat terjadi suatu polemik "apa artinya kewenangan apabila tidak ada uang sebaliknya apa artinya memiliki uang kalau tidak memiliki kewenangan".

Kewenangan menjadi central issues dalam pelaksanaan otonomi karena untuk mengembalikan kekuasaan dari tangan penguasa kepada kedaulatan rakyat. Selama itu, untuk menumbuhkan kemandirian dan pemberdayaan daerah dan masyarakat daerah. Selama berapa tahun yang lalu, kewenangan belum pernah dirasakan dan dipegang oleh daerah, sehingga tidaklah mengherangkan apabila di era reformasi sering terjadi adanya euphrio yang berlebihan ataupun juga defence mechanism yang terlalu ketat, padahal kewenangan belum secara nyata di limpahkan.

Pada prinsipnya, hakekat ekonomi daerah ialah mempunyai sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk melaksanakan tugas ekonomi, serta mempunyai anggaran belanja yang di tetapkan sendiri. Dalam pelaksanaan otonom daerah, ada tiga faktor yang menentukan, yaitu perangkat, personalia, dan pembiayaan atau pendanaan daerah.

2. Keberhasilan Otonomi Daerah

Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Syamsi (1986:199) menegaskan beberapa ukuran sebagai berikut:

- a. Kemampuan struktural organisasi, daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah dan ragam unit cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
- b. Kemampuan aparatur pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang di inginkan.
- c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah harus mampu mendorong masyarakat agar memiliki kemauan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

Kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah harus membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber dana antara lain berasal dari PAD atau sebagian dari subsidi pemerintah pusat. Keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonom dapat di lihat dari beberapa hal yang mempengaruhi (Kaho, 2005), yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan serta faktor organisasi dan manajerial.

Pertama manusia adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan, serta sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan, kedua, keuangan yang merupakan bahasan pada lingkup penulisan ini sebagai faktor penting dalam melihat derajat kemandirian suatu daerah otonom untuk dapat mengukur, mengurus dan membiayai urusan rumah tangganya. Ketiga, peralatan adalah setiap benda atau alat yang di pergunakan untuk Memperlancar kegiatan pemerintahan

daerah, keempat, untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik maka di perlukan organisasi dan pola manajemen yang baik.

Kaho (2005) menegaskan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonom daerah ialah manusia sebagai pelaksana yang baik, Manusia ialah factor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai perilaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang di harapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang di inginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

Selanjutnya, faktor yang kedua ialah kemampuan keuangan daerah yang dapat mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Manulang (1995:23) yang menyebutkan bahwa dalam kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Semakin baik keuangan suatu Negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara tersebut. Sebaliknya kalau kondisi keuangan Negara buruk, maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang telah di berikan kepadanya.

Faktor ketiga ialah anggaran, sebagai utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang di hadapkan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) harus tepat dalam bentuk dan susunannya. Anggaran berisi rancangan yang di buat berdasarkan keahlian dengan pandangan kemuka yang bijaksana, karena itu untuk menciptakan pemerintah daerah yang baik untuk melaksanakan otonomi daerah, maka mutlak diperlukan anggaran yang baik pula, faktor peralatan yang cukup dan memadai, yaitu setiap alat yang dapat di gunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya, seperti alat-alat kantor yang dapat di gunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah.

Faktor organisasi dan manajemen baik, yaitu organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi yang jelas berupa susunan satuan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang, serta hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen merupakan proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah di tentukan dapat di capai. Mengenai arti penting dari manajemen terhadap penciptaan suatu pemerintahan yang baik, Manulang (1995:34) mengatakan bahwa baik atau tidaknya manajemen pemerintah daerah tergantung dari pimpinan daerah yang bersangkutan, khususnya tergantung kepada Kepala Daerah yang bertindak sebagai manajer daerah.

3. Desentralisasi Fisikal

Lahirnya kebijakan otonom daerah yang di tandai dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disusul dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari tuntutan reformasi yang bergulir mulai beberapa tahun sebelumnya.

Salah satu isu utama yang menjadi agenda reformasi adalah adanya perubahan sistem pemerintahan daerah dari sentralistik menuju desentralistik. Ternyata, semangat reformasi kian terus bergulir sehingga dua tahun kemudian terjadi revisi terhadap Undang-Undang di atas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Sebagaimana di ketahui bersama bahwa sistem pemerintahan Indonesia di era orde baru lebih bernuansa sentralistik, walaupun secara formal dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah salah satunya adalah prinsip desentralisasi.

Desentralisasi menurut jenisnya dapat di bedakan dalam beberapa konsep, Martinez-Vazquez dan McNab (2003). Desentralisasi geografis atau desentralisasi teritorial yakni pembagian suatu wilayah menjadi wilayah-wilayah yang ' lebih kecil dengan kewenangan yuridikasi yang jelas di

antara daerah-daerah tersebut, kemudian desentralisasi fungsional yakni pendistribusian kewenangan dan tanggung jawab negara kepada unit-unit fungsional yang berbeda-beda dalam suatu pemerintahan.

Desentralisasi politik dari administrasi. Desentralisasi politik berkenaan dengan kewenangan pembuatan keputusan yang bergeser dari pemerintah yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembuatan mendapat peluang yang sangat luas. Sedangkan desentralisasi administrative erat kaitannya dengan desentralisasi politik, bahkan secara faktual keduanya sulit di bedakan.

Desentralisasi finansial, yakni berkaitan dengan pelimpahan tanggung jawab pemerintah daerah. Bentuk-bentuk desentralisasi finansial ini antara lain Self-finansial beberapa penyelenggaraan pembangunan di daerah, cofinancing atau coproduction dengan pihak-pihak swasta. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak daerah dan retribusi, pinjaman daerah, serta transfer atau subsidi antar tingkatan pemerintah.

4. Keuangan Daerah

Salah satu aspek Pemerintah daerah yang harus dikelola secara Hati-hati adalah aspek pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah hendaknya bertujuan menjamin tersedianya keuangan daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah, pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, ats dan standar akuntansi serta meningkatkan Pendapatan asli daerah secara kreatif melalui panggilan potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi.

Menurut Memesa dalam Halim (2007;23) berpendapat bahwa Keuangan Daerah dapat dijadikan semaua hak dan kewajiban yang dapat dinilai uang juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak pihak lain sesuai ketentuan / peraturan perundang – undangan yang beralaku

Menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 5, keuangan daerah

adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mardiasmo (2002:48) berpendapat bahwa secara garis benar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas kedua komponen tersebut akan sangat menentukan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, efektif dan efisien. Dan oleh sebab itu dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah, konsep mendasar yang harus dipahami dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah
- 2) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya
- 3) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya
- 4) Kerangka Hukum dan Administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas
- 5) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan PNS Daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangannya.

- 6) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi- tahunan
- 7) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih professional.
- 8) Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD dan akutan public dalam pengawasan pemberian Opini dan rating kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada public.
- 9) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
- 10) Pengembangan system informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap pemyebarluasan informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta memudahkan mendapat informasi.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan Negara. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pengertian Keuangan Negara dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka pengertian Keuangan Daerah dapat didefinisikan yaitu Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Unsur yang paling penting

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat.

6. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.

b. Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

c. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

d. Hasil guna (Effectiveness) dan daya guna (efficiency)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendahrendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya

e. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

7. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dengan berlandaskan pada dasar hukum di atas maka penyusunan APBD sebagai rencana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut boleh dikatakan bahwa APBD sebagai alat / wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, di mana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum.

Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia menyebutkan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan Umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin, sehingga tujuan atau sarannya dapat dicapai secara berdayaguna dan berhasil guna.

Mardiasmo (2009:11) mengemukakan, bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan

pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Penentuan besarnya penerimaan/pendapatan dan pengeluaran/belanja daerah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari 4 bagian, yakni :

- a. Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Dana perimbangan;
- c. Pinjaman Daerah dan;
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 juga menyebutkan bahwa, penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Menurut struktur APBD yang berlaku sekarang, pengeluaran daerah terdiri dari 2 komponen yakni pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan total beban pemerintah daerah yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja non pegawai yang secara terus menerus dibiayai tiap periode. Pengeluaran pembangunan adalah total beban pemerintah daerah yang berupa proyek fisik maupun non fisik dalam suatu periode tertentu.

8. Fungsi Anggaran Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dalam pasal 16 mengenai azas umum dan struktur anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD), dinyatakan bahwa fungsi APBD adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Otorisasi, Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi Perencanaan, Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan, Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- d. Fungsi Alokasi, Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
- e. Fungsi Distribusi, Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi Stabilisasi, Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

9. Prinsip-Prinsip Penyusunan Anggaran Daerah

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010, tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2011, penyusunan Keuangan Daerah mengacu pada norma dan prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut :

a. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD dapat melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan APBD

b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis objek belanja serta korelasi antara

besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang diterapkan

c. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan antara lain :

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- 2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

4) Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar.

5) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

6) Taat Azaz

APBD sebagai kebijakan daerah yang diterapkan dengan Peraturan Daerah didalam penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

10. Pengertian Efisiensi dan Efektifitas

a. Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Deddy dan Ayuningtyas

(2010:161) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acan tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya.

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output/unit input* (Mahmudi: 2007). Dengan demikian Efisiensi atau daya guna adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. *Output* merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) 100 persen. Namun, semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Kriteria Rasio Efektifitas Keuangan Daerah menurut Mohamad Mahsun adalah:²⁹ "(a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif. (b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektifitas berimbang (c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif"

b. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif

apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

organisasi program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi: 2007:7). Dengan demikian efektifitas berfokus pada *outcome* atau hasil. Menurut Halim (2001:72), efektifitas adalah hubungan antara *output* pusat tanggungjawabnya dan tujuannya atau target. *Output* dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja. Makin besar kontribusi *output* terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut. Dengan demikian untuk menganalisis efektifitas Pengelolaan Keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menurut Mohamad Mahsun adalah:³⁴

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti efisien
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektifitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak efisien.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2017:12) yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap terhadap data tersebut, serta penempilan hasilnya.

2. Lokasi dan Jadwal Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah yang dimana peneliti akan dilakukan. Adapun penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah di kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulawesi Barat.

b. Jadwal Penelitian

Penelitian yang direncanakan memakan waktu kurang lebih selama 3 bulan dari bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020 untuk merumuskan masalah yang terjadi dan memperoleh berbagai data yang diperlukan. Kegiatan selanjutnya adalah analisa dan bimbingan hasil penelitian, selanjutnya dilakukan ujian tesis yang direncanakan pada maret 2020.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

NO	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Penulisan Proposal	November 2019
2	Seminar dan bimbingan proposal	Desember 2019
3	Penelitian dan tindakan	Desember 2019- Januari 2020
4	Analisis dan bimbingan hasil penelitian	Januari – Februari 2020
5	Ujian tesis	Maret 2020

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penulisan ini, tipe penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian deskriptif dan/bersifat studi kasus yang dikaji secara kuantitatif. Dalam hal ini dipaparkan posisi fiskal daerah dan juga kondisi keuangan Kabupaten polman, sedangkan secara kuantitatif dihitung kekuatan efisiensi dan efektifitas Pengelolaan Keuangan daerah di Kabupaten polman.

Unit Analisis pada penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten polman tahun 2011 sampai dengan tahun 2018.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif selama delapan tahun dari tahun 2011 sampai 2018, yang diperoleh dari badan pengelolaan keuangan polewali mandar data yang dipergunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Bantuan, Sumbangan Subsidi, Dana Alokasi Umum, APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan terhadap obyek yang sedang diteliti, dan bahkan peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas-aktivitas dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian.
- b. Studi dokumenter, yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta berbagai data yang relevan.

5. Metode Analisis Data

a. Analisis efisiensi

Efisiensi merupakan rasio yang dimana antaranya biaya dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemerintah Kabupaten polman yang meliputi belanja pegawai, belanja rutin berupa belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dan belanja operasional, ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Karena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu.

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain $\frac{\text{input}}{\text{Output}}$ merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja dan input

merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan Rasio Efisiensi adalah:

- 1) Menghimpun data keuangan disetiap kerja daerah yang memiliki unsur PAD.
- 2) Menghimpun data realisasi biaya yang dikeluarkan untuk program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD pada kerja daerah
- 3) Membuat tabel realisasi biaya untuk program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2018
- 4) Mengidentifikasi biaya untuk program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD dan realisasi penerimaan PAD yang ditetapkan untuk masing-masing tahun anggaran.
- 5) Membandingkan realisasi biaya untuk program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD yang ditetapkan untuk masing-masing tahun anggaran
- 6) Menganalisis hasil perhitungan rasio efisiensi penerimaan PAD

Kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 , yaitu tentang pedoman penilain kinerja keuangan. Berikut table yang menunjukkan kriteria rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 3.2

Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Presentase (%)	Penerapan Hasil
100 %	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien

< 60%	Sangat Efisien
-------	----------------

b. Analisis Efektivitas

Suatu organisasi program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi: 2007:7). Dengan demikian efektifitas berfokus pada *outcome* atau hasil.

Efektifitas adalah hubungan antara output pertanggung jawaban, tujuan atau target. Output dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja. Semakin besar kontribusi output terdapat tujuannya maka akan semakin efektif satu unit tersebut.

Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Pengelolaan Keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah}} \times 100\%$$

Langkah-langkah untuk melakukan rasio Efektifitas adalah :

- 1) Membuat tabel target anggaran dan realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2018.
- 2) Mengidentifikasi target anggaran dan realisasi anggaran untuk masing-masing komponen untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2018.
- 3) Membandingkan realisasi anggaran dengan target anggaran yang ditetapkan untuk masing-masing komponen pada setiap tahun anggaran
- 4) Menganalisis hasil perhitungan rasio efektifitas penerimaan keuangan daerah.

Adapun diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
- 2) Hasil perbandingan antara 90%-100% berarti efektif
- 3) Hasil perbandingan 80%-90% berarti cukup efektif
- 4) Hasil perbandingan 60%-80% berarti kurang efektif
- 5) Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada umumnya belanja daerah memiliki kecenderungan untuk selalu naik, alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemampuan organisasi untuk menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah, semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitu juga sebaliknya, dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

Tabel 4.1
Rasio Efisiensi Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Tahun 2011-2018

TAHUN	REALISASI PENDAPATAN	REALISASI BELANJA	RASIO
2011	652,239,752,824.91	666,857,754,229.96	102,16%
2012	700,392,998,631.49	707,787,591,198.96	101,05%
2013	808,539,104,564.72	804,645,688,307.74	99,52%
2014	951,506,827,323.99	897,546,705,500.91	94,33%
2015	1,081,510,420,174.01	1,001,930,426,085.00	92,64%
2016	1,296,792,509,811.83	1,173,529,058,680.00	90,49%
2017	1,331,125,381,014.85	1,138,234,922,201.00	85,51%
2018	1,445,622,898,941.37	1,238,335,985,195.00	85,66%

Sumber :Laporan target dan realisasi APBD 2011-2018 Kabupaten Polewali Mandar (Data Diolah)

Tabel 4.2
Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Presentase (%)	Penerapan Hasil
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah polewali mandar tahun 2011-2018 menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik dan senantiasa mengalami perkembangan yang mengarah pada tingkat efisien. Dimana pada tahun 2011 tingkatnya berada posisi 102,16% atau berada pada tingkat tidak efisien. Kemudian pada tahun 2012 mengalami perubahan meningkat menjadi 101,05 % akan

tetapi tingkat rasio masih dikategorikan tidak efisien. Di tahun 2013 mengalami perkembangan naik menjadi 99,52% atau kurang efisien. Pada tahun 2014 semakin membaik dimana tingkat rasio berada pada 94,33%. Pengamatan pada 2017 dan 2018 tingkat efisiensi bisa dikatakan cukup efisien karena tingkat efisien pada tahun 2017 dan 2018 berada pada angka 85,51% dan 85,66 % ini diakibatkan adanya penghematan belanja daerah sampai 4,98% dari tahun 2016 ke 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa system pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah kabupaten polewali mandar masih sering terjadi fluktuatif. Pola perkembangan keuangan daerah polewali mandar dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber : Data Olahan

Gambar 4.1

Perkembangan Efisiensi Pengelolaan Keuangan tahun 2011-2018

Pada gambar diatas, terlihat bahwa pola perkembangan efisiensi pengelolaan keuangan daerah kabupaten polewali mandar selama tahun 2011 sampai dengan 2018. Cenderung semakin meningkat dengan tingkat efisiensi 85,66 % pada tahun 2018 yang berarti cukup efisien karna hasil kurang dari 90%.

2. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Efektifitas pengelolaan keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelesaikan anggaran dibandingkan target anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Untuk menentukan efektif tidaknya pengelolaan keuangan daerah digunakan asumsi sebagai berikut:

- a) Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi anggaran) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target anggaran) maka dapat dikatakan pengelolaan keuangan semakin efektif
- b) Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi anggaran) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target anggaran) maka dapat dikatakan pengelolaan keuangan tidak efektif.

Rasio efektifitas yang dicapai 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan keuangan daerah termaksud menggali potensi daerah yang semakin baik. Beberapa komponen pendapatan daerah di kabupaten Polewali Mandar dapat diukur rasio efektifitasnya sebagai mana disajikan tabel berikut.

Tabel 4.3
Rasio Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2011

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	4,400,000,000,00	4,046,849,407,70	91,97 %
Pendapatan Retribusi daerah	20,323,100,000,00	11,787,633,035,69	58,00 %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1,414,825,050,00	1,417,889,050,00	100,21 %
Lain-Lain PAD yang Sah	6,609,156,730,00	3,814,758,109,52	57,72 %
Total Pendapatan Asli Daerah	32,747,081,780,00	21,067,129,602,91	64,33 %
PENDAPATAN TRANSFER			
Dana Bagi Hasil Pajak	36,675,665,659,00	29,444,562,567,00	80,28 %
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2,427,669,749,00	368,420,740,00	15,18 %
Dana Alokasi Umum	400,635,000,000,00	400,396,347,000,00	99,94 %
Dana Alokasi Khusus	53,733,000,000,00	53,720,400,000,00	99,98 %
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	493,471,335,408,00	483,929,730,307,00	98,10 %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9,743,352,000,00	8,648,900,190,00	88,77 %
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
Total Pendapatan Transfer	9,743,352,000,00	8,648,900,190,00	88,77 %
Lain-Lain Pendapatan Yang sah			
Pendapatan Hibah	6,862,237,805,00	1,625,186,700,00	23,68 %
Pendapatan Dana Darurat	-	-	
Pendapatan Lainnya	57,146,348,000,00	47,146,346,240,00	82,50 %
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	64,008,585,805,00	48,771,532,940,00	76,20 %
JUMLAH PENDAPATAN	692,494,117,993,00	652,239,752,824,91	94,19 %

Sumber: Laporan Target dan Realisasi APBD 2011 (Data Olahan)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen anggaran pendapatan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2011, yaitu:

a) Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian Target pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2011 mencapai 64,33%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi adalah dari komponen pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah 100,21% dan capaian terendah pada komponen Lain-lain PAD yang sah yang hanya mencapai 57,72% .

b) Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target pendapatan transfer Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2011 mencapai 98,10%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi dari komponen dana alokasi khusus yang mencapai 99,98% dan capaian terendah pada komponen dana bagi hasil SDM mencapai 15,18%.

c) Efektifitas Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 76,20% nilai pendapatan yang sah dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. pendapatan yang sah antara lain, pendapatan hibah, pendapatan darurat dan pendapatan lainnya. Adapun realisasinya pada tahun 2011 sebesar Rp 48,771,532,940.00.

Tabel 4.4
Rasio Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2012

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	4,612,000,000.00	6,051,680,108.59	131,22 %
Pendapatan Retribusi Daerah	20,306,746,000.00	15,091,441,030.00	74,32 %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1,718,653,174.00	1,722,826,174.67	100,24 %
Lain-Lain PAD yang Sah	7,136,792,000.00	3,069,006,609.67	43,00 %
Total Pendapatan Asli Daerah	33,774,191,174.00	25,934,953,923.00	76,79 %
PENDAPATAN TRANSFER			
Dana Bagi Hasil Pajak	34,079,700,964.00	28,494,079,622.00	83,61 %
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	277,657,007.00	403,703,157.00	145,40 %
Dana Alokasi Umum	484,998,228,000.00	484,998,228,000.00	100,00 %
Dana Alokasi Khusus	71,437,140,000.00	71,437,140,000.00	100,00 %
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	590,792,725,971.00	585,333,150,779.00	99,08
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	11,002,092,230.00	11,416,735,805.00	103,77 %
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
Total Pendapatan Transfer	11,002,092,230.00	11,416,735,805.00	103,77 %
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
Pendapatan Hibah	8,361,657,000.00	3,963,761,750.00	47,40 %
Pendapatan Dana Darurat	-	-	
Pendapatan Lainnya	3,116,400,000.00	43,969,374.00	1,41 %
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	11,478,057,000.00	4,007,731,124.00	34,92 %
JUMLAH PENDAPATAN	724,747,493,375.00	700,392,998,631.49	96,64 %

Sumber: Laporan Target dan Realisasi APBD 2012 (Data Olahan)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen anggaran pendapatan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012, yaitu

a) Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian Target pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2012 mencapai 76,79%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi adalah dari pendapatan pajak daerah dengan nilai 131,22% dan capaian terendah pada komponen Lain-lain PAD yang sah yang hanya mencapai 43,00%.

b) Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target pendapatan transfer Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 mencapai 99,08%. Nilai tersebut dapat dikatakan

efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi dari komponen Dana Bagi Hasil SDM yang mencapai 145,40% dan capaian terendah pada komponen dana bagi hasil pajak mencapai 83,61%.

- c) Efektifitas Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 34,92 %. Nilai pendapatan yang sah dapat dikatakan kurang efektif karna kurang dari 60% pendapatan yang sah antara lain, pendapatan hibah, pendapatan darurat dan pendapatan lainnya. Adapun realisasi pada tahun 2012 sebesar Rp 4,007,731,124.00

Tabel 4.5
Rasio Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2013

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	5,772,000,000.00	7,255,853,382.98	125,71 %
Pendapatan Retribusi Daerah	17,211,015,900.00	17,815,243,038.91	103,51 %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2,220,000,000.00	2,239,372,222.00	100,87 %
Lain-Lain PAD yang Sah	11,533,792,000.00	3,889,945,197.02	33,73 %
Total Pendapatan Asli Daerah	36,736,807,900.00	31,200,413,841.91	84,93 %
PENDAPATAN TRANSFER			
Dana Bagi Hasil Pajak	30,990,818,239.00	25,768,639,253.00	83,15 %
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	15,277,657,007.00	453,803,151.00	2,97 %
Dana Alokasi Umum	555,943,291,000.00	555,943,291,000.00	100,00 %
Dana Alokasi Khusus	81,957,270,000.00	81,957,270,000.00	100,00 %
Jumlah Pendapatan Transer Dana Perimbangan	684,169,036,246.00	664,123,003,404.00	97,07 %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	13,489,029,998.00	13,170,884,218.81	97,64 %
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
Total Pendapatan Transfer	13,489,029,998.00	13,170,884,218.81	97,64 %
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
Pendapatan Hibah	1,943,270,000.00	1,107,968,100.00	57,02 %
Pendapatan Dana Darurat	-	-	
Pendapatan Lainnya	11,296,900,000.00	11,296,900,000.00	100,00 %
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	13,240,170,000.00	12,404,868,100.00	93,69 %
JUMLAH PENDAPATAN	835,274,979,144.00	808,539,104,564.72	96,80 %

Sumber: Laporan Target dan Realisasi APBD 2013 (Data Olahan)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen anggaran pendapatan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013, yaitu

a) Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian Target pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2013 mencapai 84,93%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi adalah dari pendapatan pajak 125,71% dan capaian terendah pada komponen Lain-lain PAD yang sah yang hanya mencapai 33,73% .

b) Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target pendapatan transfer Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 mencapai 97,07%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi dari komponen dana alokasi khusus yang mencapai 100,00% dan capaian terendah pada komponen dana bagi hasil SDM mencapai 2,97%.

c) Efektifitas Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 93,69%. Nilai pendapatan yang sah dapat dikatakan sangat efektif karna lebih dari 60%. Pendapatan yang sah antara lain, pendapatan hibah, pendapatan darurat dan pendapatan lainnya. Adapun nilai realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp12,404,868,100.00

Tabel 4.6
Rasio Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2014

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	12,236,589,225.00	13,774,952,740.96	112,57 %
Pendapatan Retribusi daerah	11,566,740,333.00	3,690,189,980.00	31,90 %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2,480,000,000.00	2,483,181,947.00	100,13
Lain-Lain PAD yang Sah	66,490,597,799.00	76,650,963,806.03	115,28
Total Pendapatan Asli Daerah	92,773,927,024.00	96,599,288,473.99	104,12 %
PENDAPATAN TRANSFER			
Dana Bagi Hasil Pajak	22,147,226,840.00	15,793,959,900.00	71,31 %
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	800,000,000.00	1,570,870,094.00	196,36 %
Dana Alokasi Umum	603,283,760,000.00	603,283,761,000.00	100,00 %
Dana Alokasi Khusus	80,353,530,000.00	80,353,530,000.00	100,00 %
Jumlah Pendapatan Transer Dana Perimbangan	706,584,516,840.00	701,002,120,994.00	99,21 %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	16,951,827,662.00	18,037,515,506.00	106,40 %
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
Total Pendapatan Transfer	16,951,827,662.00	18,037,515,506.00	106,40 %
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
Pendapatan Hibah	3,932,060,000.00	837,476,350.00	21,30 %
Pendapatan Dana Darurat	-	-	
Pendapatan Lainnya	14,061,200,000.00	14,061,200,000.00	100,00 %
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	17,993,260,000.00	14,898,676,350.00	82,80 %
JUMLAH PENDAPATAN	955,272,757,526.00	951,506,827,323.99	99,61 %

Sumber: Laporan Target dan Realisasi APBD 2014 (Data Olahan)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen anggaran pendapatan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014, yaitu :

a) Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian Target pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2014 mencapai 104,12%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi adalah dari pendapatan Lain-lain PAD yang sah 115,28% dan capaian terendah pada komponen pendapatan retribusi daerah yang hanya mencapai 31,90% .

b) Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target pendapatan transfer Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014 mencapai 99,21%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi dari komponen dana bagi hasil SDM yang mencapai 196,36%, nilai tersebut dapat dikatakan sangat efektif karna lebih dari 100% dan capaian terendah pada komponen dana bagi hasil pajak mencapai 71,31%.

c) Efektifitas Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 82,80 %. Nilai tersebut dapat dikatakan sangat efektif karna lebih dari 60%. Pendapatan yang sah antara lain, pendapatan hibah, pendapatan darurat, pendapatan lainnya. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2014 Rp 14,898,676,350.00.

Tabel 4.7
Rasio Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2015

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	13,437,000,000.00	15,248,843,725.80	113,48 %
Pendapatan Retribusi daerah	8,052,230,800.00	4,007,743,107.00	49,77 %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2,905,655,958.00	2,905,655,958.70	100,00 %
Lain-Lain PAD yang Sah	84,929,039,513.00	84,830,651,028.51	99,88 %
Total Pendapatan Asli Daerah	109,323,926,271.00	106,992,893,820.01	97,87 %
PENDAPATAN TRANSFER			
Dana Bagi Hasil Pajak	15,987,620,000.00	11,745,280,350.00	73,46 %
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1,593,580,000.00	1,984,331,571.00	124,52 %
Dana Alokasi Umum	639,371,455,000.00	639,371,455,000.00	100,00 %
Dana Alokasi Khusus	128,713,719,050.00	124,138,972,000.00	96,45 %
Jumlah Pendapatan Transer Dana Perimbangan	785,666,374,050.00	777,240,038,921.00	98,93 %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26,206,126,653.00	31,586,398,433.00	120,53 %
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
Total Pendapatan Transfer	26,206,126,653.00	31,586,398,433.00	120,53 %
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
Pendapatan Hibah	1,911,500,000.00	1,129,091,400.00	59,07 %
Pendapatan Dana Darurat	-	-	
Pendapatan Lainnya	150,000,000.00	9,987,700.00	6,66 %
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	2,061,500,000.00	1,139,079,100.00	55,25 %
JUMLAH PENDAPATAN			

Sumber: Laporan Target dan Realisasi APBD 2015 (Data Olahan)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen anggaran pendapatan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015, yaitu

a) Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian Target pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2015 mencapai 97,87%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi adalah dari komponen pendapatan pajak daerah 113,48% dan capaian terendah pada komponen pendapatan retribusi daerah yang hanya mencapai 49,77% .

b) Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target pendapatan transfer Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 mencapai 98,93%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi dari komponen dana bagi hasil SDM yang mencapai 124,52% dan capaian terendah pada komponen dana bagi hasil pajak mencapai 73,46%.

c) Efektifitas Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 55,25% nilai tersebut dapat dikatan cukup karna kurang dari 60%. Pendapatan yang sah antara lain, pendapatan hibah, pendapatan darurat, dan pendapatan lainnya. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp 1,139,079,100.00.

Tabel 4.8
Rasio Efektifitas Pengelolaan pendapatan daerah
Tahun Anggaran 2016

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	15,715,000,000.00	17,238,342,813.00	109,69 %
Pendapatan Retribusi Daerah	9.719,500,000.00	8,416,685,548.00	86,60 %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3,327,000,000.00	3,217,556,872.00	96,71
Lain-Lain PAD yang Sah	96,053,274,571.00	97,175,388,580.73	101,17
Total Pendapatan Asli Daerah	124,814,774,571.00	126,047,973,813.73	100,99 %
PENDAPATAN TRANSFER			
Dana Bagi Hasil Pajak	12,886,722,000.00	13,494,899,402.00	104,72 %
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2,652,018,000.00	3,565,186,579.00	134,43 %
Dana Alokasi Umum	725,381,526,000.00	725,381,526,000.00	100,00 %
Dana Alokasi Khusus	375,567,913,000.00	280,221,005,074.00	74,61 %
Jumlah Pendapatan Transer Dana Perimbangan	1,116,488,179,000.00	1,022,662,617,055.00	91,60 %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	28,325,720,973.00	30,442,219,104.10	107,47 %
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
Total Pendapatan Transfer	28,325,720,973.00	30,442,219,104.10	107,47 %
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
Pendapatan Hibah	23,433,347,000.00	14,403,813,500.00	61,47 %
Pendapatan Dana Darurat	-	-	
Pendapatan Lainnya	150,000,000.00	30,488,650.00	20,33 %
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	23,995,847,000.00	14,434,302,150.00	60,15 %
JUMLAH PENDAPATAN			

Sumber: Laporan Target dan Realisasi APBD 2016 (Data Olahan)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen anggaran pendapatan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016, yaitu

a) Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian Target pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2016 mencapai 100,99%. Nilai tersebut dapat dikatakan sangat efektif karna lebih dari 100%. Capaian tertinggi adalah dari komponen pendapatan pajak daerah 109,69% dan capaian terendah pada komponen pendapatan retribusi daerah yang hanya mencapai 86,60% .

b) Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target pendapatan transfer Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016 mencapai 91,60%. Nilai tersebut dapat dikatakan

efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi dari komponen dana bagi hasil SDM yang mencapai 134,43% dan capaian terendah pada komponen dana alokasi umum mencapai 74,61%.

- c) Efektifitas Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 60,15%. Nilai tersebut dapat dikatakan cukup efektif karna lebih dari 60%. Pendapatan yang sah antara lain, pendapatan hibah, pendapatan darurat, pendapatan lainnya Adapun realisasi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp 14,434,302,150.00

Tabel 4.9
Rasio Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2017

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	18,392,100,000.00	18,849,732,901.00	102,49 %
Pendapatan Retribusi Daerah	11,553,055,510.00	9,074,857,129.00	78,55 %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3,600,370,943.87	3,600,370,943.87	100,00 %
Lain-Lain PAD yang Sah	184,570,967,525.14	171,693,528,824.06	93,02 %
Total Pendapatan Asli Daerah	218,116,493,979.01	203,218,489,797.93	93,17
PENDAPATAN TRANSFER			
Dana Bagi Hasil Pajak	11,795,459,000.00	12,987,577,449.00	110,11 %
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1,637,205,554.00	627,502,108.00	38,33 %
Dana Alokasi Umum	712,638,905,000.00	712,638,905,000.00	100,00 %
Dana Alokasi Khusus	243,861,311,000.00	231,871,820,995.00	95,08 %
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	969,932,880,554.00	958,125,805,552.00	98,78 %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33,580,824,135.05	34,487,370,039.92	102,70 %
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
Total Pendapatan Transfer	33,580,824,135.05	34,487,370,039.92	102,70 %
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
Pendapatan Hibah	4,774,770,600.00	4,020,259,625.00	84,20 %
Pendapatan Dana Darurat	-	-	
Pendapatan Lainnya	231,250,000.00	235,338,000.00	101,77 %
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	5,006,020,600.00	4,255,597,625.00	85,01 %
JUMLAH PENDAPATAN			

Sumber: Laporan Target dan Realisasi APBD 2017 (Data Olahan)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen

anggaran pendapatan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017, yaitu

1. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian Target pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2017 mencapai 93,17%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi adalah dari pendapatan pajak daerah 102,49% dan capaian terendah pada komponen pendapatan retribusi daerah yang hanya mencapai 78,55% .

2. Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target pendapatan transfer Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017 mencapai 98,78%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi dari komponen dana bagi hasil pajak yang mencapai 110,11%, nilai tersebut dapat dikatakan sangat efektif karna lebih dari 100% dan capaian terendah pada komponen dana bagi hasil pajak mencapai 38,33%.

3. Efektifitas Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 85,01%. Nilai tersebut dapat dikatakan sangat efektif karna lebih dari 60%, pendapatan yang sah antara lain, pendapatan hibah, pendapatan darurat, pendapatan lainnya. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp 4,255,597,625.00

Tabel 4.10
Rasio Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2018

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	20,629,440,000.00	21,670,391,884.00	105,05 %
Pendapatan Retribusi daerah	10,470,000,000.00	10,387,671,373.00	99,21 %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3,819,268,998.00	3,819,268,998.00	100,00 %
Lain-Lain PAD yang Sah	132,451,557,500.14	110,092,296,538.81	88,12 %
Total Pendapatan Asli Daerah	167,370,266,498.14	145,969,628,793.81	87,21 %
PENDAPATAN TRANSFER			
Dana Bagi Hasil Pajak	12,521,956,839.00	9,647,557,695.00	77,05 %
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1,076,027,434.00	750,302,391.00	69,73 %
Dana Alokasi Umum	713,339,396,000.00	713,339,396,000.00	100,00 %
Dana Alokasi Khusus	305,761,113,000.00	299,169,303,514.00	97,84 %
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1,032,698,493,273.00	1,022,906,559,600.00	99,05 %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	35,838,624,135.05	35,400,412,772.56	98,78 %
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
Total Pendapatan Transfer	35,838,624,135.05	35,400,412,772.56	98,78 %
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
Pendapatan Hibah	58,658,700,875.00	57,750,452,579.00	98,45 %
Pendapatan Dana Darurat	-	-	
Pendapatan Lainnya	1,000,000.00	25,752,196.00	2575,22 %
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	58,659,700,875.00	57,776,204,775.00	98,49 %
JUMLAH PENDAPATAN			

Sumber: Laporan Target dan Realisasi APBD 2018 (Data Olahan)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen anggaran pendapatan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018, yaitu :

1. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian Target pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2018 mencapai 87,21%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi adalah pendapatan pajak daerah 105,05% dan capaian terendah pada komponen lain-lain PAD yang sah yang hanya mencapai 88,12% .

2. Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target pendapatan transfer Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018 mencapai 99,05%. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karna lebih dari 60%. Capaian tertinggi dari komponen dana alokasi umum yang mencapai 100%, dan capaian terendah pada komponen dana bagi hasil SDM mencapai 71,31%.

3. Efektifitas Lain-lain

Pendapatan Yang Sah sebesar 98,49%. Nilai tersebut dapat dikatakan sangat efektif karna hampir mncapai 100%, pendapatan yang sah dapat antara lain, pendapatan hibah, pendapatan darurat, dan pendapatan lainnya. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2018 Rp 57,776,204,775.00.

Tabel 4.11

Rasio Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011-2018

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio
2011	692,494,117,993.00	652,239,752,824.91	94,19%
2012	33,774,191,174,00	25,934,953,923.49	76,79%
2013	36,736,807,900.00	31,200,413,841.91	84,93%
2014	97,773,927,024.00	96,599,288,473.99	104,12%
2015	1,114,953,977,974.00	1,081,510,420,174.01	97,00%
2016	1,400,162,444,544.00	1,296,792,509,811.81	92,62%
2017	218,116,493,979.01	202,218,489,797.93	93,17%
2018	1,478,137,231,781,19	1,445,622,898,941.37	97,80%

Sumber : Laporan Anggaran dan realisasi APBD tahun 2011-2018
Kabupaten Polewali Mandar (Data Olahan)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2011-2018 menunjukkan tingkat efektif yang sangat baik dan mengalami

perkembangan yang sangat efektif. Dimana pada tahun 2011 tingkatannya berada pada posisi 94,19% atau berada pada tingkat sangat efektif. Kemudian pada tahun 2012 sebesar 76,79% dapat dikatakan juga sebagai efektif karna lebih dari 60%. Di tahun 2013 mengalami perkembangan sebesar 84,93% dapat dikatakan efektif. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan draktis sebesar 104,12% sangat maksimal. Sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan 2018 rata-rata 90,50% dikatakan sangat efektif. Hal ini mengidentifikasi bahwa system pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masi sangat baik dan efektif.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disajikan beberapa kesimpulan dari hasil analisis yaitu sebagai berikut:

- a. Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah telah berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan tingginya rata-rata rasio efektivitas selama tahun 2011 sampai 2018.
- b. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai setiap program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan.
- c. Dalam hal kestabilan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam kurun waktu delapan tahun, didapati tingkat efisiensi yang dikategorikan sangat efesien didapati terjadi ketidakstabilan atau tidak konsisten tingkat efesien di tiap tahunnya. Sedangkan dalam hal tingkat efektifitas yang di kategorikan kurang efektif di dapati hampir stabil dan konsisten.

2. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Badan Keuangan disarankan terus mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dengan intensifikasi maupun

ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan dengan meningkatkan aspek kelembagaan, meningkatkan sistem pemungutan, pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan sumber daya manusia pengelola PAD sendiri. Serta terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah.

- b. Badan Keuangan diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar tingkat efektivitas yang sudah baik tetap terus konsisten terlebih bisa meningkat dan mengupayakan efisiensi pengelolaan keuangan daerah ditahun-tahun mendatang.
- c. Pemerintah Kabupaten Polewali mandar perlu memperhatikan setiap anggaran belanja secara khusus dalam pembelanjaan aparatur pemerintah diharapkan bisa efektif dan efisien, dan melakukan skala prioritas dalam penentuan anggaran pembelanjaan.
- d. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dihimbau agar lebih memprioritaskan belanja modal untuk kepentingan masyarakat berupa pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat karena Pendapatan Asli Daerah banyak bersumber dari masyarakat dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga masyarakat akan termotivasi untuk ikut serta dalam pembangunan.

REFERENSI

- Baratakusumah, Deddy Supriady et-all, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Baratakusumah, Otonomi Penyelenggaraan Anggaran Pemerintah Daerah, Gramedia pustaka utama, Jakarta
- Deddy dan Ayuningtyas (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta Salemba Empat
- Desentralisasi Fisikal di Indonesia Dilema Otonomi dan ketergantungan "Prisma" No 4. 3-17
- Hariadi, (2014). Pengelolaan Keuangan Daerah Penerbit Salema Empat. Yogyakarta

- Halim, (2007), Akuntansi Keuangan Daerah Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul (2001), Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Jaya,(2009). “Analisis Potensi Keuangan Daerah Pendekatan Makro “PPPEB UGM Yogyakarta
- Kaho, (2005). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mardiasmo (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: ANDI
- Mardiadmo,(2009). Anggaran Akuntansi Sektor Publik
- Mardiasmo, (2010). Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah, Untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Mardiasmo, (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Munandar,(2009). Realisasi Anggaran. Tersedia :
<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/realisasi-anggaran/>.
- Mahmudi, (2007), Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi I, Penerbit UPP STIM YKPM, Yogyakarta
- Manulang, M,. (1995). Manajemen Personalialia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Martinez-Vazques (2003). For a discussion of the pitfalls associated with the conventional measurement of fiscal decentralization.
- Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010.
- Otonomi Daerah (Undang-Undang No 32 dan Peraturan Pemerintah R.I No 6 Tahun 2005).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta

- Pemerintah Republik Indonesia. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.
- Syamsi, Ibnu, (1986). Pokok-pokok kebijakan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan tingkat Nasional. CV. Rajawali, Jakarta
- Utomo, Bambang. (2000). Otonomi Daerah dan Kondisin Fiskal Indonesia, Jakarta
- Yusak, (2012). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari.